BAB IV

PENUTUP

Penelitian tentang keberimbangan pemberitaan korupsi di media cetak, khususnya keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012 melalui sebuah proses panjang. Proses panjang tersebut pada akhirnya sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah penulis paparkan pada Bab III. Pada bagian ini, penulis merincikan kesimpulan atas hasil penelitian dan pada akhirnya membuat refleksi atas penelitian ini berupa saran dan kritik.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa ada keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa keberadaan unsur keberimbangan dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012 tersebut masih terasa timpang. Hal ini dikarenakan oleh tidak terpenuhinya semua alat ukur untuk melihat keberimbangan pemberitaan itu sendiri berdasarkan unit analisis dan defenisi operasional yang peniliti tentukan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2006:22), *balance* bisa diukur berdasarkan tiga elemen: *source bias, slant* dan representasi pro-kontra. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, SKH *Media Indonesia* hanya memenuhi setidaknya

dua unsur keberimbangan pemberitaan. Kedua unsur tersebut adalah *source bias* dan *slant*. Unsur *slant* sendiri hanya terpenuhi pada dua sub unit analisis yaitu adanya penilaian negatif dan pemberian kritik dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012.

Sedangkan beberapa unit analisis yang presentasinya kecil dalam pemberitaan Wisma Atlet Periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012 adalah unit analisis *slant* untuk sub unit analisis penilaian positif dan pemberian pujian serta unit analisis representasi pro-kontra. Fakta inilah yang mengarahkan peneliti untuk mencapai kesimpulan bahwa keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* muncul secara parsial. Artinya, meskipun ada indikasi keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet namun tidak semua unsur keberimbangan dipenuhi oleh SKH *Media Indonesia* dalam pemberitaan Wisma Atlet Periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012.

B. Saran

Sebagai sebuah proses panjang, penelitian ini tentunya bukan tidak menemui kesulitan dalam proses penelitiannya. Dalam proses penelitian ini, seringkali peneliti masih sulit menemukan unsur-unsur sebagai alat ukur untuk melihat aspek *balance* atau keberimbangan. Oleh karena itu, peneliti selalu berusaha fokus terhadap unit analisis dan defenisi operasional sebagai batasan konkret dalam penelitian ini.

Namun demikian, peneliti melihat bahwa unit analisis yang peneliti gunakan tersebut belum mencakup semua hal yang bisa dipakai untuk melihat keberimbangan pemberitaan. Kekurangan ini masih terlihat pada unit analisis *source bias*. Pada bagian unit analisis ini, penulis tidak memasukkan unsur pengukuran seperti pengutipan dari media lain sebagai sumber berita utama. Dalam unit analisis, unsur ini sangat mungkin dimasukkan sebagai bagian dari unit analisis *source bias*. Hasil pengukuran unsur tersebut memiliki potensi untuk menunjukkan sejauh mana kualitas dan kredibilitas media dalam melakukan peliputan. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap agar penelitian sejenis mendatang bisa memasukkan unsur ini dalam melihat keberimbangan pemberitaan media.

Kesulitan lain yang peneliti temukan terjadi saat melakukan pengkodingan berita. Bagi peneliti, kesulitan ini merupakan kesulitan terberat dalam proses penelitian. Sehingga tidak jarang dalam proses pengkodingan tersebut peneliti berulangkali membaca berita dengan seksama sebelum menentukan setiap kemunculan unit analisis dan sub unit analisis dalam berita. Tidak hanya itu, defenisi operasional dan prosedur dalam melakukan pengkodingan menjadi pegangan penting dalam proses ini. Dengan demikian, ketika menemui kesulitan menentukan kemunculan unit analisis dan sub unit analisis, peneliti bisa membaca kembali kedua panduan tersebut. Hal ini peneliti lakukan guna mendapatkan hasil pengkodingan yang akurat.

Pengkodingan yang akurat sendiri sangat berpengaruh pada hasil kuantifikasi untuk melihat adanya keberimbangan pemberitaan. Pada proses kuantifikasi, peneliti sangat terbantu dengan setidaknya kesamaan persepsi yang

ada di antara pengkoder sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam uji reliabilitas. Hal ini membuat peneliti lebih cepat melakukan kuantifikasi dan analisis terhadap 51 berita yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Hanya saja, ketika masuk pada bagian pembahasan peneliti beberapa kali merasa bimbang berkaitan dengan teknik analisis data. Teknik ini berkaitan dengan tabulasi silang yang peneliti pilih sebagai teknis analisis data dalam penelitian ini. Peneliti beberapa kali melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang nantinya akan peneliti silangkan dalam tabel tersebut. Namun akhirnya peneliti bisa menentukan variabel-variabel apa saja yang menarik untuk disilangkan agar dapat menemukan interpretasi dan makna yang baru dan menarik.

Dalam proses penelitian ini, peneliti kemudian menyadari pentingya kerangka teori sebagai landasan utama dalam hal ini. Keberadaan kerangka teori yang tepat sangat diperlukan dalam penelitian karena proses analisis sangat bergantung pada kerangka teori yang sesuai dan kuat.

Namun demikian, peneliti sadar bahwa kerangka teori yang peneliti gunakan ini sudah seringkali banyak dipakai dalam penelitian tentang *media performance*, objektivitas dan penelitian sejenis lainnya. Oleh karena itu, peneliti berharap pada peneltian selanjutnya yang berkaitan dengan keberimbangan pemberitaan, peneliti lain bisa mencoba untuk menggunakan teori lain yang kuat dan mendukung penelitiannya. Hal ini tidak saja akan memperkaya wawasan penelitian tentang keberimbangan pemberitaan tetapi juga menyediakan referensi lain yang tepat dan mendukung dalam penelitian sejenis.

Berdasarkan saran ini, peneliti mengusulkan agar peneliti lain yang tertarik bisa menggunakan salah satu referensi teori seperti teori objektivitas media yang dikemukakan oleh John Merill. John Merill menyusun enam kategori yang dapat digunakan untuk melihat bias media dalam hal ini kategori yang dapat membantu melihat objektivitas pemberitaan media sepert (Kriyantono, 2006: 247-248): (1) bias atribusi (*attribution bias*), (2) bias keterangan (*adverbial bias*), (3) opini tegas (*outright opinion*), (5) bias kontekstual (*contextual bias*), dan (6) bias fotografis (*photographic bias*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, H. M. Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Erianto, A. Dewi, Aritasius Sugiya, Sintha Ratnawati. 2012. *Buku Pintar Kompas 2011*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu - Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kovach, Bill dan T. Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Mubarok, M. Mufti. 2012. *Anak Kampung Paling Fenomenal: Berguru pada 10 Tokoh Inspiratif*. Surabaya: Java Putaka.

McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*.

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. Report Series. Engaging Media,

Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens' Rights. Research Collaboration of Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS Regional Office Southeast Asia, Funded by Ford Foundation. Jakarta: CIPG and HIVOS.

Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahayu. (ed). 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Krayon Grafika.

Saptono, Irawan. 2009. *Media, Pemilu, Politik: Kecenderungan Media dalam Pemilu 2009*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Siregar, Ashadi. 1988. *Bagaimana Meliput dan Menulis untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.

Subiakto, Henry & Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. 2012. Jakarta: Kencana.

LSPP, Tim. *Media Sadar Publik: Media Lokal Memberitakan Korupsi dan Pelayanan Publik*. 2005. Jakarta: LSPP.

Yanuarti, Sri, dkk. 1997. *Tentang Nepotisme: Analisis Isi Media Massa*. Jakarta: Institut Studi Studi Arus Informasi.

Artikel Surat Kabar

Azwar, Amahl S. 2011. *SBY Enggan Ultimatum Tim Pemburu Nazaruddin*. Media Indonesia, 1 Agustus 2011, hal. 12.

Azwar, Amahl S. 2011. *KPK Isolasi Nazaruddin*. Media Indonesia, 15 Agustus 2011, hal. 1.

Azwar, Amahl S. 2011. *Nazaruddin Janji tidak Seret Demokrat*. Media Indonesia, 18 Agustus 2011, hal. 1.

Azwar, Amahl S. 2011. *Nazaruddin Mengaku Lupa Semuanya*. Media Indonesia, 19 Agustus 2011, hal. 1.

Bhawono, Aryo. 2012. *Demokrat Galau*. Media Indonesia, 24 Februari 2012, hal. 1.

Bhawono, Aryo. 2012. *Strategi Ganti Pengacara di Tengah Jalan*. Media Indonesia, 12 Maret 2012, hal. 24.

Mukti, Hafizd. 2012. *Nasib Demokrat Terancam Nila Setitik. Media Indonesia*, 2 Februari 2012, hal. 4.

Mustain, Akhmad. 2012. *SBY Akui Demokrat Terpuruk*. Media Indonesia, 6 Februari 2012, hal. 5.

Mustain, Akhmad. 2012. *Gara-Gara Nazir, 4 Pejabat Dicopot*. Media Indonesia, 13 Februari 2012, hal. 4.

Mustain, Akhmad. 2012. *Anas Akui Belum Pecat Angie*. Media Indonesia, 20 Februari 2012, hal. 1.

Noor, Fardiansah. 2012. *Internal Demokrat Desak Anas Mundur*. Media Indonesia, 3 Februari 2012, hal. 1.

Nuraini, Ratna. 2011. *SBY Bisa Ganti Anas*. Media Indonesia, 10 Agustus 2011, hal. 2.

Wirawan, Jerome Eugene. 2011. *Nazaruddin Depresi*. Media Indonesia, 10 Agustus 2011, hal. 1.

Referensi Skripsi (Tidak Diterbitkan)

Ariesti, Bithari Viciana. 2012. *Profiling Dipo Alam pada SKH Media Indonesia: Studi Analisis Framing Profiling Dipo Alam dalam Pemberitaan SKH Media Indonesia mengenai Kasus Pemboikotan Tiga Media Nasional.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Dewi, Catharina Rinda Tirana. 2012. *Pemberitaan Penangkapan Nazaruddin terkait Kasus Suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang: Analisis Framing terhadap Pemberitaan Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait Kasus Suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang oleh MBM Tempo Edisi 22-28 Agustus 2011*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Dewi, Lucia Eltariza Ajeng Kumala. 2012. *Pemberitaan Studi Banding Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat ke Luar Negeri: Studi Analisis Isi Kecenderungan Sikap Media dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, Kompas, dan Koran Tempo Periode April-Mee 2011*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Lina, Gabriela Pipit. 2012. *Keberpihakan Pers dalam Pemberitaan mengenai Pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam di Republika dan Kompas: Analisis Isi Keberpihakan Pers pada Pemberitaan mengenai Pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam di Republika dan Kompas Periode September 2006-Desember 2006*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Artikel dalam Internet

Tim Lipsus *Kompas.com*. 2011. SEA Games Indonesia 2011: Saatnya Menjadi Juara. (Diakses 6 Mei 2013) dari (http://lipsus.kompas.com/seagames2011/about).

Ladjar, Angelina Merlyana. 2010. SEA GAMES Butuh Biaya Rp 2,1 Triliun. (Diakses 7 Mei 2013) dari (http://olahraga.kompas.com/read/2010/04/08/12252476/SEA.Games.Butuh.Biaya.Rp.2.1.T).

Madani, Mohamad Amin. 2013. Hakim Tipikor Vonis Angelina Sondakh 4,5 Tahun Penjara. (Diakses 7 Mei 2013) dari (http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/10/mgewvw-hakim-tipikor-vonis-angelina-sondakh-4-5-tahun-penjara).

Nugraha, Pepih. 2011. Inilah Akhir Kisah Pelarian Nazaruddin. (Diakses 7 Mei 2013) dari (http://nasional.kompas.com/read/2011/08/08/20402032/Inilah.Akhir.Kisah.Pelarian.Nazaruddin)

Rastika, Icha. 2011. Nazaruddin Diduga Terima Rp 4,3 Miliar. (Diakses 7 Mei 2013) dari (http://tekno.kompas.com/read/2011/07/13/16150351/Nazaruddin.Diduga.Terima.Rp.4.3.Milia).

Rastika, Icha. 2012. KPK Periksa Angelina sebagai Tersangka. (Diakses 7 Mei 2013) dari

(http://nasional.kompas.com/read/2012/04/27/07295045/KPK.Periksa.Angelina.sebagai.Tersangka).

Rastika, Icha, 2012. KPK Tetakpan Andi Mallarangeng Tersangka Hambalang. (Diakses 7 Mei 2012) dari (http://nasional.kompas.com/read/2012/12/06/19065844/KPK.Tetapkan.Andi.Mallarangeng.Tersangka.Hambalang)

Sitompul, Marlen. 2011. Inilah Kronologi Suap Nazaruddin. (Diakses 7 Mei 2013) dari (http://nasional.inilah.com/read/detail/1695532/inilah-kronologi-suap-nazaruddin).

LAMPIRAN

PROTOKOL PENGISIAN LEMBAR *CODING*

Keberimbangan Pemberitaan Korupsi di Media Cetak:

Analisis Isi Keberimbangan Pemberitaan Korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* Periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012

Pengantar

Analisis isi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat liputan surat kabar dalam berita mengenai korupsi Wisma Atlet yang terjadi di Indonesia. Lebih dari itu penelitian ini ingin melihat tentang keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet terutama mengenai penyebutan narasumber yang dikutip dalam berita.

Berita

Penelitian ini hanya menyertakan berita. Berita di sini didefenisikan sebagai semua produk yang dimuat oleh surat kabar selain iklan, dan dibuat oleh waratwan surat kabar (Eriyanto, 2011: 225).

Prosedur

Bacalah berita surat kabar dengan teliti. Bacalah juga petunjuk pengisian ini agar Anda dapat menempatkan berita dalam kategori yang tepat. Setelah itu, isilah lembar *coding* dengan menyilangkan pilihan jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

Q1. *Source Bias*

Source bias dalam berita lebih mengarah pada tipe peliputan yang digunakan oleh wartawan dan terepresentasi dalam berita.

Satu Sisi : Jika wartawan hanya mengumpulkan informasi dan fakta dari narasumber serta rujukan yang memiliki pandangan yang sama ataupun memperkuat pandangan yang sudah ada. Rujukan dapat juga dipahami sebagai perseorangan, data dari lembaga survei, dokumen serta sumber yang tak tak ingin namanya disebutkan (*blind source*).

Dua Sisi : Jika wartawan mengumpulkan informasi dan fakta dari narasumber atau rujukan yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya, wartawan Indonesia tidak hanya memuat satu sisi pandangan dalam berita tetapi juga memuat pandangan dari pihak yang berseberangan. Hal ini juga bisa dilihat dari usaha cek dan ricek yang dilakukan oleh wartawan dalam peliputannya.

Q2. *Slant*

Slant dalam berita merujuk pada kecenderungan media dalam menyampaikan penilaian positif, pemberian pujian, penilaian positif dan pemberian kritik dalam berita.

Penilaian Positif : Jika wartawan memberikan apresiasi positif atas kinerja, kasus, ataupun orang tertentu dalam berita.

Pujian : Jika wartawan memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat memuji terhadap kinerja, penanganan kasus, ataupun orang yang tertentu dalam berita.

Penilaian negatif : Jika wartawan memberikan nilai yang kurang memuaskan atas kinerja, kasus ataupun orang tertentu dalam berita.

Kritik : Jika wartawan memberikan tanggapan yang biasanya disertai dengan pertimbangan baik atau buruk terhadap topik yang ada dalam berita.

Q3. Representasi Pro dan Kontra

Kesamaan porsi yang diberikan wartawan kepada pihak pro dan pihak kontra terhadap suatu hal tertentu.

(a) Sama :

Jika porsi yang diberikan wartawan relatif sama. Hal ini bisa dilihat dari berapa banyak kesamaan alinea yang diakomodasikan bagi pihak yang memiliki pandangan pro maupun pihak yang memiliki pandangan kontra. Jika dikuantifikasi, maka peneliti menetapkan ukuran kesamaan porsi berdasarkan ukuran sama banyaknya banyaknya alinea yang diakomodasikan untuk kedua pihak, yaitu (1:1, 2:2, 3:3, dan seterusnya). Selain itu, suatu berita bisa dikatakan memberikan porsi yang sama jika perbedaan banyaknya porsi alinea minimal berbanding 1:2.

(b) Tidak Sama :

Jika porsi yang diberikan wartawan relatif tidak sama. Hal ini bisa dilihat dari berapa banyak perbedaan alinea yang diakomodasikan bagi pihak yang pro maupun pihak yang

kontra. Jika dikuantifikasi, maka peneliti menetapkan ukuran perbedaan porsi berdasarkan banyaknya perbedaan akomodasi yang mencapai 3-4 alinea bagi pihak yang pro maupun pihak yang kontra dalam pemberitaan.

LEMBAR *CODING*

Keberimbangan Pemberitaan Korupsi di Media Cetak:

Analisis Isi Keberimbangan Pemberitaan Korupsi Wisma Atlet

di SKH *Media Indonesia* Periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012

Nomor Identitas *Coder* :

Nama Surat Kabar : Media Indonesia

Edisi / Hari – Tanggal :

Judul Berita :

KEBERIMBANGAN

1. *Source Bias*

Sisi peliputan yang digunakan dalam berita

a. Satu Sisi

b. Dua Sisi

2. *Slant*

Ada tidaknya penilaian positif oleh wartawan *Media Indonesia* dalam berita

a. Ada

b. Tidak Ada

Ada tidaknya pemberian pujian oleh wartawan *Media Indonesia* dalam berita

a. Ada

b. Tidak Ada

Ada tidaknya penilaian negatif oleh wartawan *Media Indonesia* dalam berita

a. Ada

b. Tidak Ada

Ada tidaknya pemberian kritik oleh wartawan *Media Indonesia* dalam berita

a. Ada

b. Tidak Ada

3. Representasi Pro-Kontra

Kesamaan porsi bagi representasi Pro dan Kontra

a. Sama

b. Tidak Sama

PENGKODINGAN *CC*

No	**Edisi**	**Judul Berita**	**Souce Bias**
1	1 Agustus 2011	SBY Enggan Ultimatum Tim Pemburu Nazaruddin	2
2	3 Agustus 2011	Calon Pimpinan KPK Dituding Suap Anas	2
3	5 Agustus 2011	Komite Etik Pastikan Periksa Pimpinan KPK	2
4	9 Agustus 2011	Nazaruddin Ditangkap tanpa Pengawal	2
5	9 Agustus 2011	Wafid Bertemu Angie dan Nazaruddin	2
6	10 Agustus 2011	Nazaruddin Depresi	2
7	10 Agustus 2011	SBY Bisa Ganti Anas	1
8	13 Agustus 2011	Tim Gabungan Cegah Suaka Nazaruddin	2
9	14 Agustus 2011	Tangan Nazaruddin Diborgol	2
10	15 Agustus 2011	KPK Isolasi Nazaruddin	2
11	15 Agustus 2011	Chandra Hamzah Diminta Nonaktif	2
12	16 Agustus 2011	Nazaruddin Ketakutan Tampak Linglung	2
13	16 Agustus 2011	Nazaruddin dan Menpora Saling Koordinasi	2
14	16 Agustus 2011	Beny Akui Pertemuan Nazaruddin-KPK	2
15	18 Agustus 2011	Nazaruddin Janji tidak Seret Demokrat	2
16	18 Agustus 2011	Berlebihan, DPR Besuk Nazaruddin	2
17	19 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Lupa Semuanya	2
18	22 Agustus 2011	Nazaruddin Sebut Pernah Bertemu Busyro	2
19	22 Agustus 2011	Nazaruddin Amankan Barang Bukti di Singapura	2
20	23 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Terintimidasi di Tahanan	2
21	23 Agustus 2011	Nama Angelina kembali Disebut	2
22	24 Agustus 2011	Komite Etik Sebut Nazar Mengarang	2
23	24 Agustus 2011	SBY Sangsikan Pengurus PD	2
24	26 Agustus 2011	Nazaruddin Tuding Pimpinan KPK Takut	2
25	27 Agustus 2011	Menpora Akui Bertemu Nazar	2
26	1 Februari 2012	Anas Konsolidasi	2
27	1 Februari 2012	Demokrat Digerogoti Rayap dan Parasit	1
28	2 Februari 2012	Nasib Demokrat Terancam Nila Setitik	2
29	3 Februari 2012	Internal Demokrat Desak Anas Mundur	1
30	3 Februari 2012	Abraham Samad Janjikan Kejutan	2
31	6 Februari 2012	SBY Risau, Anas Asyik Berkicau	2
32	6 Februari 2012	SBY Akui Demokrat Terpuruk	2
33	7 Februari 2012	Ternyata Anas Belum Aman	2
34	7 Februari 2012	Angelina Seharusnya juga Dikurung KPK	2
35	8 Februari 2012	Internal Demokrat Terus Desak Anas Mundur	2
36	10 Februari 2012	Politik Uang Pintu Pemecatan Anas	2
37	11 Februari 2012	F-PD Dorong BK DPR Periksa M Nazir	2
38	12 Februari 2012	Gara-Gara Nazir, 4 Pejabat Dicopot	2
39	20 Februari 2012	Anas Akui belum Pecat Angie	1
40	24 Februari 2012	Demokrat Galau	2
41	24 Februari 2012	KPK dan Kejaksaan Bagi-Bagi Kasus Nazaruddin	2
42	29 Februari 2012	Angie -Rosa Diharapkan Jujur Bersaksi	2
43	1 Maret 2012	Angie Diingatkan soal Sanksi Berbohong	2
44	2 Maret 2012	KPK Periksa Yulianis di Hotel	1
45	2 Maret 2012	Majelis Hakim Harus Periksa Anas	2

46	6 Maret 2012	JK Sebut Kasus Korupsi Wisma Atlet Struktural	2
47	7 Maret 2012	Mantan Bawahan Nazaruddin Berbalik Arah	2
48	8 Maret 2012	Anas Arahkan Penggeledahan KPK	1
49	8 Maret 2012	Chandra Hamzah Bocorkan Pencekalan Nazaruddin	2
50	12 Maret 2012	Strategi Ganti Pengacara di Tengah Jalan	1
51	17 Maret 2012	KPK Pasti Panggil Anas 2 Bulan Lagi	2

***)DER* 1**

Slant				Representasi Pro-Kontra
Positif	**Pujian**	**Negatif**	**Kritik**	
2	2	1	1	1
2	2	1	1	1
2	2	1	2	2
2	2	1	2	1
1	2	2	2	1
2	1	2	2	1
1	1	1	2	2
2	2	1	1	2
2	2	2	2	1
1	2	1	1	1
1	2	2	2	1
2	2	1	2	2
1	2	1	1	2
1	1	2	2	2
2	2	2	1	2
2	2	1	1	2
2	2	1	1	2
1	1	1	2	2
2	1	2	1	2
2	2	1	1	2
1	2	1	2	2
2	1	1	2	1
2	2	2	1	1
2	1	1	1	2
1	2	1	2	1
2	2	1	2	1
2	1	2	2	2
2	1	1	2	1
1	2	1	2	2
1	1	2	2	1
2	2	1	1	2
1	1	2	2	2
2	1	1	1	1
1	2	1	1	1
2	1	1	2	2
1	1	1	1	2
2	2	1	2	1
2	1	1	1	2
1	2	1	1	2
2	2	1	1	1
1	2	2	2	1
1	1	2	1	2
1	2	2	2	2
2	2	1	1	2
1	2	2	1	2

1	1	2	2	1
2	2	1	2	2
2	2	1	2	2
2	2	1	2	1
2	2	1	1	2
2	2	1	1	2

PENGKODINGAN

No	Edisi	Judul Berita
1	1 Agustus 2011	SBY Enggan Ultimatum Tim Pemburu Nazaruddin
2	3 Agustus 2011	Calon Pimpinan KPK Dituding Suap Anas
3	5 Agustus 2011	Komite Etik Pastikan Periksa Pimpinan KPK
4	9 Agustus 2011	Nazaruddin Ditangkap tanpa Pengawal
5	9 Agustus 2011	Wafid Bertemu Angie dan Nazaruddin
6	10 Agustus 2011	Nazaruddin Depresi
7	10 Agustus 2011	SBY Bisa Ganti Anas
8	13 Agustus 2011	Tim Gabungan Cegah Suaka Nazaruddin
9	14 Agustus 2011	Tangan Nazaruddin Diborgol
10	15 Agustus 2011	KPK Isolasi Nazaruddin
11	15 Agustus 2011	Chandra Hamzah Diminta Nonaktif
12	16 Agustus 2011	Nazaruddin Ketakutan Tampak Linglung
13	16 Agustus 2011	Nazaruddin dan Menpora Saling Koordinasi
14	16 Agustus 2011	Beny Akui Pertemuan Nazaruddin-KPK
15	18 Agustus 2011	Nazaruddin Janji tidak Seret Demokrat
16	18 Agustus 2011	Berlebihan, DPR Besuk Nazaruddin
17	19 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Lupa Semuanya
18	22 Agustus 2011	Nazaruddin Sebut Pernah Bertemu Busyro
19	22 Agustus 2011	Nazaruddin Amankan Barang Bukti di Singapura
20	23 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Terintimidasi di Tahanan
21	23 Agustus 2011	Nama Angelina kembali Disebut
22	24 Agustus 2011	Komite Etik Sebut Nazar Mengarang
23	24 Agustus 2011	SBY Sangsikan Pengurus PD
24	26 Agustus 2011	Nazaruddin Tuding Pimpinan KPK Takut
25	27 Agustus 2011	Menpora Akui Bertemu Nazar
26	1 Februari 2012	Anas Konsolidasi
27	1 Februari 2012	Demokrat Digerogoti Rayap dan Parasit
28	2 Februari 2012	Nasib Demokrat Terancam Nila Setitik
29	3 Februari 2012	Internal Demokrat Desak Anas Mundur
30	3 Februari 2012	Abraham Samad Janjikan Kejutan
31	6 Februari 2012	SBY Risau, Anas Asyik Berkicau
32	6 Februari 2012	SBY Akui Demokrat Terpuruk
33	7 Februari 2012	Ternyata Anas Belum Aman
34	7 Februari 2012	Angelina Seharusnya juga Dikurung KPK
35	8 Februari 2012	Internal Demokrat Terus Desak Anas Mundur
36	10 Februari 2012	Politik Uang Pintu Pemecatan Anas
37	11 Februari 2012	F-PD Dorong BK DPR Periksa M Nazir
38	12 Februari 2012	Gara-Gara Nazir, 4 Pejabat Dicopot
39	20 Februari 2012	Anas Akui belum Pecat Angie
40	24 Februari 2012	Demokrat Galau
41	24 Februari 2012	KPK dan Kejaksaan Bagi-Bagi Kasus Nazaruddin
42	29 Februari 2012	Angie -Rosa Diharapkan Jujur Bersaksi
43	1 Maret 2012	Angie Diingatkan soal Sanksi Berbohong
44	2 Maret 2012	KPK Periksa Yulianis di Hotel
45	2 Maret 2012	Majelis Hakim Harus Periksa Anas
46	6 Maret 2012	JK Sebut Kasus Korupsi Wisma Atlet Struktural

47	7 Maret 2012	Mantan Bawahan Nazaruddin Berbalik Arah
48	8 Maret 2012	Anas Arahkan Penggeledahan KPK
49	8 Maret 2012	Chandra Hamzah Bocorkan Pencekalan Nazaruddin
50	12 Maret 2012	Strategi Ganti Pengacara di Tengah Jalan
51	17 Maret 2012	KPK Pasti Panggil Anas 2 Bulan Lagi

***NCODER* 2**

Souce Bias	Slant				Representasi Pro-Kontra
	Positif	Pujian	Negatif	Kritik	
2	1	1	1	1	2
2	2	2	1	2	2
2	1	2	1	2	2
2	2	2	1	2	2
2	2	2	1	2	2
1	1	2	1	2	1
1	1	2	1	1	1
2	1	2	1	1	2
1	1	2	2	2	1
2	2	2	1	1	2
1	1	2	1	1	1
2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	1	2	2	1	2
2	1	2	1	1	2
2	1	1	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	1	2	1	2	2
2	1	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	1	2	1	1	2
2	2	2	1	1	1
2	1	2	1	1	1
2	2	2	1	1	2
2	2	2	2	1	2
2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	1	2	1	1	2
2	2	1	1	2	2
2	1	1	2	1	2
2	1	2	1	1	2
2	1	2	1	2	2
2	1	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
1	1	2	1	1	1
2	1	2	1	1	1
2	2	2	1	1	2
2	1	2	1	2	2
2	1	2	2	1	2
2	1	2	1	2	2
2	1	2	1	1	2
1	2	2	1	2	1
2	1	2	1	2	1

2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2
2	2	2	1	2	2
1	2	2	1	1	1
2	2	2	1	2	2

PERHITUNGAN RELIABILITAS

1. Perhitungan Reliabilitas Keseluruhan

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2\ x\ 151}{180+180}$

$= \frac{302}{360}$

= 0, 83

2. Perhitungan Reliabilitas Masing-Masing Unit dan Sub Unit Analisis

a. Unit Analisis *Source Bias*

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2x28}{30+30}$

$= \frac{56}{60}$

= 0, 933

b. Unit Analisis *Slant*

❖ **Sub Unit Analisis Penilaian Positif**

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2\ x\ 23}{30+30}$

$= \frac{46}{60}$

= 0, 766

❖ **Sub Unit Analisis Pemberian Pujian**

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2\ x\ 23}{30+30}$

$= \frac{46}{60}$

= 0, 766

❖ **Sub Unit Analisis Penilaian Negatif**

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2\ x\ 23}{30+30}$

$= \frac{46}{60}$

= 0, 766

❖ **Sub Unit Analisis Pemberitan Kritik**

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2\ x\ 27}{30+30}$

$= \frac{54}{60}$

= 0, 9

c. Unit Analisis Representasi Pro-Kontra

CR $= \frac{2M}{N1+N2}$

$= \frac{2\ x\ 27}{30+30}$

$= \frac{54}{60}$

= 0, 9

PENCATATAN UNIT ANALISIS

REPRESENTASI PRO-KONTRA

(CODER 1)

No	Edisi	Judul Berita	Jumlah Alinea	
			Pro	Kontra
1	1 Agustus 2011	SBY Enggan Ultimatum Tim Pemburu Nazaruddin	4	3
2	3 Agustus 2011	Calon Pimpinan KPK Dituding Suap Anas	4	5
3	5 Agustus 2011	Komite Etik Pastikan Periksa Pimpinan KPK	4	0
4	9 Agustus 2011	Nazaruddin Ditangkap tanpa Pengawal	3	2
5	9 Agustus 2011	Wafid Bertemu Angie dan Nazaruddin	3	2
6	10 Agustus 2011	Nazaruddin Depresi	3	2
7	10 Agustus 2011	SBY Bisa Ganti Anas	6	0
8	13 Agustus 2011	Tim Gabungan Cegah Suaka Nazaruddin	5	2
9	14 Agustus 2011	Tangan Nazaruddin Diborgol	5	6
10	15 Agustus 2011	KPK Isolasi Nazaruddin	2	2
11	15 Agustus 2011	Chandra Hamzah Diminta Nonaktif	5	5
12	16 Agustus 2011	Nazaruddin Ketakutan Tampak Linglung	4	1
13	16 Agustus 2011	Nazaruddin dan Menpora Saling Koordinasi	3	0
14	16 Agustus 2011	Beny Akui Pertemuan Nazaruddin-KPK	4	2
15	18 Agustus 2011	Nazaruddin Janji tidak Seret Demokrat	4	1
16	18 Agustus 2011	Berlebihan, DPR Besuk Nazaruddin	2	4
17	19 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Lupa Semuanya	3	1
18	22 Agustus 2011	Nazaruddin Sebut Pernah Bertemu Busyro	5	3
19	22 Agustus 2011	Nazaruddin Amankan Barang Bukti di Singapura	4	1
20	23 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Terintimidasi di Tahanan	6	1
21	23 Agustus 2011	Nama Angelina kembali Disebut	4	0
22	24 Agustus 2011	Komite Etik Sebut Nazar Mengarang	2	3
23	24 Agustus 2011	SBY Sangsikan Pengurus PD	5	4
24	26 Agustus 2011	Nazaruddin Tuding Pimpinan KPK Takut	3	1
25	27 Agustus 2011	Menpora Akui Bertemu Nazar	3	2
26	1 Februari 2012	Anas Konsolidasi	2	2
27	1 Februari 2012	Demokrat Digerogoti Rayap dan Parasit	5	0
28	2 Februari 2012	Nasib Demokrat Terancam Nila Setitik	3	3
29	3 Februari 2012	Internal Demokrat Desak Anas Mundur	4	0
30	3 Februari 2012	Abraham Samad Janjikan Kejutan	4	3

31	6 Februari 2012	SBY Risau, Anas Asyik Berkicau	4	1
32	6 Februari 2012	SBY Akui Demokrat Terpuruk	4	2
33	7 Februari 2012	Ternyata Anas Belum Aman	2	2
34	7 Februari 2012	Angelina Seharusnya juga Dikurung KPK	3	2
35	8 Februari 2012	Internal Demokrat Terus Desak Anas Mundur	4	0
36	10 Februari 2012	Politik Uang Pintu Pemecatan Anas	4	0
37	11 Februari 2012	F-PD Dorong BK DPR Periksa M Nazir	3	2
38	12 Februari 2012	Gara-Gara Nazir, 4 Pejabat Dicopot	4	0
39	20 Februari 2012	Anas Akui belum Pecat Angie	4	0
40	24 Februari 2012	Demokrat Galau	2	2
41	24 Februari 2012	KPK dan Kejaksaan Bagi-Bagi Kasus Nazaruddin	3	2
42	29 Februari 2012	Angie -Rosa Diharapkan Jujur Bersaksi	3	1
43	1 Maret 2012	Angie Diingatkan soal Sanksi Berbohong	5	3
44	2 Maret 2012	KPK Periksa Yulianis di Hotel	2	4
45	2 Maret 2012	Majelis Hakim Harus Periksa Anas	4	0
46	6 Maret 2012	JK Sebut Kasus Korupsi Wisma Atlet Struktural	4	3
47	7 Maret 2012	Mantan Bawahan Nazaruddin Berbalik Arah	4	2
48	8 Maret 2012	Anas Arahkan Penggeledahan KPK	3	0
49	8 Maret 2012	Chandra Hamzah Bocorkan Pencekalan Nazaruddin	2	2
50	12 Maret 2012	Strategi Ganti Pengacara di Tengah Jalan	0	7
51	17 Maret 2012	KPK Pasti Panggil Anas 2 Bulan Lagi	2	4

Frequencies

Statistics

Tipe Peliputan

N	Valid	51
	Missing	0

Tipe Peliputan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Satu Sisi	7	13.7	13.7	13.7
	Dua Sisi	44	86.3	86.3	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

Penilaian Positif

N	Valid	51
	Missing	0

Penilaian Positif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	20	39.2	39.2	39.2
	Tidak Ada	31	60.8	60.8	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

Pemberian Pujian

N	Valid	51
	Missing	0

Pemberian Pujian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	17	33.3	33.3	33.3
	Tidak Ada	34	66.7	66.7	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

Penilaian Negatif

N	Valid	51
	Missing	0

Penilaian Negatif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	35	68.6	68.6	68.6
	Tidak Ada	16	31.4	31.4	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

Pemberian Kritik

N	Valid	51
	Missing	0

Pemberian Kritik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	24	47.1	47.1	47.1
	Tidak Ada	27	52.9	52.9	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

Representasi Pro-Kontra

N	Valid	51
	Missing	0

Representasi Pro-Kontra

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sama	22	43.1	43.1	43.1
	Tidak Sama	29	56.9	56.9	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

1 Agustus 2011

SBY Enggan Ultimatum Tim Pemburu Nazaruddin

Koordinasi yang lemah menyebabkan penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat lamban.

Amahl S Azwar

PERBURUAN buron mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tergantung pada keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengultimatum anak buahnya. Jika tidak ada ultimatum, mereka tidak akan bersungguh-sungguh menangkap tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, itu.

Hal itu disampaikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif saat dihubungi di Jakarta, kemarin. "Dia (SBY) tidak akan berani (ultimatum), padahal harusnya begitu."

Buya, demikian sapaan Syafii Maarif, menilai koordinasi yang lemah dalam perburuan Nazaruddin membuktikan pemerintahan tidak berjalan secara efektif. "Sampai malas saya mengomentari Presiden," pungkasnya.

Dalam berbagai kesempatan, Polri menegaskan telah mengendus keberadaan Nazaruddin. Bahkan, tiga tim pemburu dari Polri telah berada di sebuah negara, tempat tersangka bersembunyi. Namun, untuk menangkapnya bagi Polri bukan perkara mudah.

Masalah koordinasi aparat juga mendapat sorotan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. "Presiden mesti menegaskan koordinasi di antara aparat dan kementerian mengenai Nazaruddin," tuturnya.

MI/SUSANTO

Syafii Maarif
Mantan Ketua PP Muhammadiyah

SBY harus bertindak tegas kepada bawahannya yang lamban menangkap sang buron. Terlebih Polri sudah memasukkan Nazaruddin ke *red notice* alias surat permintaan penangkapan internasional. Surat tersebut sudah dikirim ke pusat Interpol di Paris. *Red notice* ini tersebar di 188 negara anggota Interpol. "SBY harus memecat aparat yang tidak serius mencari keberadaan Nazaruddin," kata psikolog politik UI Hamdi Moeloek.

Menurutnya, kelambanan pemerintah untuk mengejar Nazaruddin sudah menjadi keluhan publik. "Seharusnya memang dari awal kasus Nazaruddin ini, SBY serius mencarinya," sahut Hamdi.

Lempar ke negara lain

Polri tak bisa menentukan target untuk menangkap Nazaruddin. Sebab, penangkapan tergantung pada negara tempatnya bersembunyi.

"Kita ketergantungan dengan negara lain. Makanya kita tidak bisa menentukan keterbatasan waktu," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Sutarman, di Mabes Polri, akhir pekan lalu.

Indonesia, lanjutnya, terbentur pada penggunaan identitas palsu oleh Nazaruddin. Tetapi, negara tempatnya bersembunyi menyatakan tak ada pendatang ilegal. "Namun, kita yakin betul dia ada di negara itu. Makanya kita kirim tim," kata Sutarman.

Polri belum bisa menyentuh, apalagi menangkap Nazaruddin. Polri perlu berdiplomasi dengan negara tempat pelarian tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. (Bob/X-6)

amahl@mediaindonesia.com

Calon Pimpinan KPK Dituding Suap Anas

Sutan Bagindo Fachmi

Lahir
Pariaman, Sumatra Barat, 13 September 1951

Jabatan
- Kajati Sumatra Barat
- Salah satu dari 17 calon pimpinan KPK

Kasus yang pernah ditangani
1. Kasus *illegal logging* dengan terdakwa Adelin Lis.
2. Kasus tukar guling antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti dengan terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Beddu Amang, dan Ricardo Gelael.
3. Kasus dana nonbujeter Bulog dengan terdakwa Akbar Tandjung, Dadang Sukandar, dan Winfried Simatupang.
4. Kasus *technical assistant contract* dengan terdakwa Ginandjar Kartasasmita.

Sumber : Tim Riset MI/FOTO:MI/SUSANTO/GRAFIS: TIYOK

Sutan Bagindo Fachmi malah balik mengaku pernah diancam akan diberhentikan dari jabatan Kajati Sumbar oleh Nazaruddin.

Amahl S Azwar

SETELAH beberapa hari absen melancarkan tudingan, tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games 2011 Muhammad Nazaruddin kembali melempar bola panas, kemarin. Dari persembunyiannya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut menuding salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sutan Bagindo Fachmi pernah memberikan uang kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Melalui Blackberry Messenger (BBM) kepada *Media Indonesia*, kemarin, Nazaruddin menyebut Fachmi menyetor Rp1 miliar kepada Anas untuk mendukung pemenangan Anas dalam Kongres Demokrat di Bandung pada Mei 2010. "Syaratnya, pascakemenangan Anas, Demokrat harus membantu Fachmi menjadi Ketua KPK," kata anggota Komisi VII DPR yang kini buron tersebut.

Nazaruddin menyebutkan penyuapan itu berlangsung sebelum kongres. "Itu partisipasi dia untuk memenangkan Anas. Uang diserahkan di Restoran Nipon. Komitmennya nanti, dia jadi salah satu pimpinan KPK yang Demokrat dukung."

Fachmi merupakan salah satu dari 17 calon pemimpin KPK yang lolos seleksi. Ia calon dari jalur kejaksaan dan kini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat.

Menurut Nazaruddin, Fachmi menemui Anas seorang diri. Anas saat itu didampingi Nazaruddin dan salah seorang pengusaha bernama Fahmi.

Fachmi membantah tudingan Nazaruddin tersebut. "Uang Rp1 miliar dari mana buat seorang jaksa seperti saya bisa mendapatkannya," kata Fachmi kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurut dia, Nazaruddin telah berbohong dan ingin menjegal dirinya. "Saya menyuap Anas untuk apa? Untuk jadi Ketua KPK? Kalau iya, kenapa Bambang (Widjojanto) dan Busyro (Muqoddas) yang terpilih? Apa hubungannya itu lho? Apa Anas bisa? Lagian itu jauh hari, masa iya jauh-jauh hari."

Fachmi mengakui mengenal Nazaruddin. Ia menjelaskan pernah diancam dilengserkan dari kursi Kajati Sumbar oleh Nazaruddin. "Dia kan terlibat kasus korupsi di Dhamasraya, Sumbar," terang Fachmi.

Ancaman itu datang, lanjut dia, setelah Fachmi menyatakan Bupati Dhamasraya Marlon Martua sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dhamasraya sekitar satu bulan lalu.

"Nazaruddin meminta agar kasus pembangunan RSUD Dhamasraya senilai Rp52 miliar pada 2009 tidak dilanjutkan. Marlon itu pernah jadi teman kecil Nazaruddin. Selama tiga kajati enggak jalan-jalan, giliran saya jalan, dia marah sama saya."

Di pihak lain, Anas tidak menjawab pesan singkat dari *Media Indonesia*. Telepon selulernya pun tidak aktif.

Namun, dalam beberapa kesempatan Anas menyebut semua tudingan Nazaruddin karangan dan fitnah belaka. "Nazaruddin akan terus membuat karangan-karangan yang dikirim ke media massa," kata Anas, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan terpisah, penyidik KPK menggeledah rumah Nazaruddin di Pejaten, Jakarta Selatan, kemarin. Tim penyidik yang berjumlah sekitar 10 orang mulai memasuki rumah Nazaruddin sekitar pukul 11.00 WIB. Penyidik mengangkut dua kardus yang diduga CPU dan monitor komputer jenis PC ke dalam mobil.

Juru bicara KPK Johan Budi SP membenarkan penyidik menyita komputer Nazaruddin terkait dengan kasus Wisma Atlet. (*/YH/X-7)

amahl@mediaindonesia.com

3 Agustus 2012

5 Agustus 2011

Komite Etik Pastikan Periksa Pimpinan KPK

Ada kekuatan hitam yang tidak ingin memperbaiki ketidakberesan dalam KPK dan mendorong penghancuran lembaga tersebut.

AMAHL S AZWAR

KOMITE Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memeriksa pimpinan KPK. Pemeriksaan dijadwalkan terlaksana pada Selasa (9/8).

"Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (9/8). Nama-nama yang diperiksa, dimintai keterangan, serta jadwal pemeriksaan baru akan kami susun besok," ujar Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua seusai rapat perdana Komite Etik KPK di Jakarta, kemarin.

KPK membentuk Komite Etik untuk merespons tudingan tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin serta mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja terlibat suap dan rekayasa kasus. Belakangan, daftar itu bertambah dengan nama juru bicara KPK Johan Budi SP yang mengaku pernah menemani Ade Raharja dalam pertemuan dengan Nazaruddin.

Setelah itu, M Jasin menyebut nama Ketua KPK Busyro Muqoddas, Haryono Umar, dan Sekjen KPK Bambang Praptono Sunu juga harus diperiksa. Sebab, kata Jasin, mereka pernah bertemu juga dengan Nazaruddin.

Abdullah menambahkan, Komite Etik tidak akan memeriksa nama-nama yang bukan berasal dari unsur komisioner KPK. Adapun Johan Budi SP dan Ade Raharja sekadar dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap mereka akan dilakukan Direktorat Pengawasan Internal KPK.

Dengan demikian, dari lima pemimpin KPK, tinggal Bibit Samad Rianto yang sejauh ini tidak terseret oleh Nazaruddin. Sehingga, hanya Bibit yang mewakili unsur KPK dalam Komite Etik yang terdiri dari tujuh orang. Selain Abdullah dan Bibit, Komite Etik antara lain diisi oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dan praktisi hukum Nono Anwar Makarim.

Akan tetapi, Abdullah tidak menutup kemungkinan Bibit juga akan dimintai keterangan bila namanya disebut selama pemeriksaan.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam, Abdullah mengakui baru membahas mengenai pemberitaan di media massa tentang tudingan Nazaruddin kepada beberapa pejabat KPK.

Untuk penyusunan jadwal pemeriksaan Komite Etik dan klasifikasi sanksi, lanjut dia, baru disusun hari ini.

Adapun pemanggilan pertama oleh Komite Etik baru akan dilakukan pada Selasa (9/8). Pemeriksaan bakal berlangsung secara tertutup.

Kekuatan hitam

Syafii Maarif menilai ada semacam kekuatan hitam yang ingin menghancurkan KPK. "Kita mesti cepat-cepat perbaiki KPK jika memang ada yang tidak beres," tutur Syafii.

Saat ditanya siapa kekuatan hitam tersebut, Syafii tidak menjawab secara eksplisit. Menurut dia, kekuatan hitam itu adalah kekuatan yang tidak mencintai Indonesia.

Ia menambahkan semua orang sebenarnya paham siapa aktor yang berusaha melemahkan KPK. "Saya telah melihat negara ini. Jangan tanya siapa kekuatan hitamnya, jangan berlagak pilon," tegas dia.

Pada 29 Juli, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie meminta agar KPK dibubarkan. "KPK sebagai lembaga *ad hoc*, kalau sudah tidak bisa dipercaya, buat apa didirikan," tandasnya.

Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai Fraksi Partai Demokrat DPR semestinya mengevaluasi Marzuki Alie sebagai Ketua DPR. Apalagi, sambungnya, Marzuki telah tujuh kali mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin juga menepis seruan Marzuki Alie. "Ide membubarkan KPK jauh lebih destruktif. Jangan karena KPK belum maksimal, dibubarkan."

Ia juga menilai KPK tidak sepenuhnya lembaga *ad hoc*. Pasalnya, KPK dibentuk berdasarkan undang-undang dan dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (*/P-1)

amahl@mediaindonesia.com

MI/SUSANTO

RAPAT PERDANA: Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua (ketiga kiri) didampingi anggota memberikan keterangan seusai rapat perdana Komite Etik di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

9 Agustus 2011

Nazaruddin Ditangkap tanpa Pengawal

Sang buron ditangkap saat sedang santai. Ia minta dilindungi Dubes RI untuk Kolombia.

JEROME S WIRAWAN

TERSANGKA kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang, Muhammad Nazaruddin, ditangkap sendirian saat tengah bersantai di tempat umum di Kota Wisata Cartagena, Kolombia, Minggu (7/8) pukul 02.00 waktu setempat.

"Nazaruddin ditangkap aparat Kolombia di Cartagena sendirian tanpa istri dan pengawal," kata Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Menufandu saat dihubungi Media Indonesia, tadi malam.

Penangkapan bermula saat polisi Kolombia melakukan patroli, dini hari itu. Nazaruddin mengaku bernama Syarifuddin sesuai dengan paspornya. Namun, polisi tidak begitu saja percaya karena wajahnya sama dengan informasi yang disebar Interpol, bahwa orang buron yang dicurigai itu bernama Muhammad Nazaruddin. Polisi kemudian menangkapnya.

Kirimkan tanggapan Anda atau berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com
Facebook: Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom

Penjelasan Menufandu berbeda dengan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam. Menurutnya, saat ditangkap, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tengah didampingi istri dan sejumlah orang.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan penggiat jurnalisme warga Iwan Piliang melalui Skype, Nazaruddin mengklaim dia berada dalam perlindungan sejumlah pengawal alias *bodyguard* lantaran khawatir akan keselamatannya. Dalam wawancara itu, Nazaruddin mengaku nyaris terkena tembakan orang tak dikenal.

Menufandu dihubungi aparat Kolombia pukul 08.00, kemudian ia bertolak dari Bogota ke Cartagena. Dalam pertemuan selama 4 jam, Nazaruddin tetap mengaku bernama Syarifuddin. Sang buron yang mengenakan celana jins dan kaus hitam itu usudah 14 hari berada di Kolombia, dan 4 hari di Cartagena.

"Dia sedikit lemas karena tidak tidur. Namun, dia tidak tampak mencoba menyamar dengan menumbuhkan jenggot atau apa pun. Rambutnya pendek, wajah bersih, dan tetap rapi," tutur Menufandu.

Adapun pembicaraan Menufandu dan Nazaruddin seputar masalah ringan, seperti menanyakan kondisi kesehatan.

Nazaruddin mengaku datang ke Kolombia terkait dengan bisnis. "Nazaruddin sempat memuji ekonomi Kolombia," tuturnya.

Nazaruddin kemudian diterbangkan dari Cartagena ke Bogotá menggunakan pesawat Cessna, Minggu malam waktu setempat. "Di dalam pesawat terdapat 6 orang, yakni 2 petugas Interpol, 2 pilot, 1 staf KBRI, dan Nazaruddin," ungkap Menufandu.

Nazaruddin ditempatkan di sebuah rumah khusus Interpol, ia diborgol saat menuju rumah khusus yang berada di Centro, Bogota.

"Nazaruddin minta didampingi saya terus," pungkas Menufandu. Nazaruddin menitipkan satu tas kecil yang berisi dompet, sang, dan paspor.

Tim dari Jakarta, yang terdiri dari Polri, KPK, dan Interpol, tiba di Bogota, kemarin, dan langsung memeriksa jati diri sang buron.

Hasilnya, ada 12 persamaan sidik jari. Setelah itu, di Jakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto menggelar jumpa pers perihal penangkapan Nazaruddin.

Singgah lima negara

Dalam pelarian, Nazaruddin sempat singgah di lima negara, yakni Singapura, Vietnam, kemudian Kamboja. Dari negara terakhir, Nazaruddin kemudian terbang ke Republik Dominika dengan pesawat sewaan.

Sebelum singgah di Cartagena, Kolombia, ia terlebih dahulu transit di Madrid, Spanyol. Kini, tim gabungan dari Jakarta sedang menyiapkan kepulangan Nazaruddin.

Penangkapan Nazaruddin disambut gembira oleh tersangka kasus suap Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang yang juga mantan anak buahnya di PT Anak Negeri.

"Baguslah bukan saya saja yang kena. Puji Tuhan," ujar Rosa saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. (P-3/X-6)

jerome@mediaindonesia.com

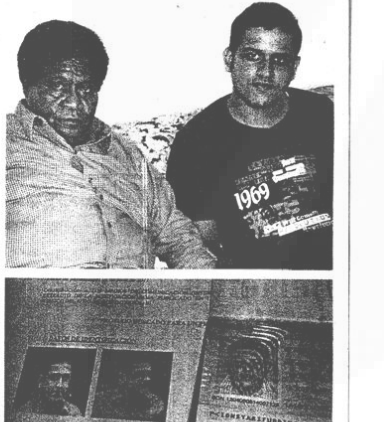

DITANGKAP DI KOLOMBIA: Tersangka kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang, Muhammad Nazaruddin (kanan), didampingi Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Menufandu berada di kantor kepolisian saat ditangkap di Kota Cartagena, Kolombia, Minggu (7/8). Nazaruddin ditangkap polisi Kolombia karena dicurigai menggunakan paspor palsu dengan nama Syarifuddin.

Pelarian Nazaruddin (23 Mei-7 Agustus)

Hari Penting

23 Mei 2011
Meninggalkan diri ke Singapura.

24 Mei
Dicekal KPK.

30 Juni
Diterbangkan KPK setelah tertangkap.

4 Juli
KPK meminta Mabes Polri menerbitkan *red notice*.

7 Agustus
Ditangkap di Cartagena, Kolombia.

Kasus

1. Diduga menggelapkan dana proyek Bandara Hasanuddin, Makassar.
2. Diduga melakukan pelecehan terhadap SPG di Bandung.
3. Diloporkan ke Wagik Seskim MK.
4. Diduga terlibat kasus proyek Kemenakertrans.
5. Diduga terlibat korupsi proyek Wisma Atlet.

Detik-Detik Penangkapan

4-5 Agustus 2011
Tim gabungan mendeteksi keberadaan Nazaruddin di Kolombia.

Minggu, 7 Agustus
Interpol memangkap pria yang identik dengan Nazaruddin di Cartagena, Kolombia.

21.00-22.00 WIB
Menko menapor kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Senin, 8 Agustus
- Djoko Suyanto menapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penangkapan Nazaruddin.
- Nazaruddin diterbangkan ke Bogota.

Sumber: Tim Riset MEDIAINDO TIPIKA

Keterangan:
Tim gabungan: KPK, Kemenkum dan HAM, Mabes Polri dan Kemenlu

9 Agustus 2011

Wafid Akui Bertemu Angie dan Nazaruddin

Pengakuan serupa nyanyian bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menjadi fakta persidangan.

Henri S Siagian

SESKEMENPORA Wafid Muharam mengaku bertemu M Nazaruddin, yang ketika itu Bendahara Umum Partai Demokrat, dan anggota DPR Angelina Sondakh di ruangan Menpora Andi Malarangeng.

Wafid melontarkan pengakuan tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta, saat bersaksi dalam sidang kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa *marketing* PT Duta Graha Indah (PT DGI) Mohammad El Idris, kemarin.

"Yang saya ingat ada Pak Menteri, Ketua Komisi X (Mahyuddin), Angelina, Nazaruddin, dan saya," ujar Wafid, yang kini juga telah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet.

Pertemuan itu, menurut Wafid, bermula saat dirinya diperintah Menpora untuk datang ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Menpora, sambung dia, sudah ada empat orang tersebut. Hanya, Wafid enggan untuk menjelaskan substansi yang dibicarakan dalam pertemuan itu. "Saya datang terlambat pada pertemuan itu. Sehingga, saya sama sekali tidak tahu apa isi pembicaraan mereka," tuturnya.

Seusai pertemuan itu, menurut Wafid, Menpora meminta nya untuk menindaklanjuti suatu hal. Namun, Wafid mengaku tidak mengetahui apa yang diperintahkan atasannya untuk ditindaklanjuti. "Gak tahu," tuturnya, dalam persidangan yang diketuai Hakim Suwidya.

Pertemuan itu pertama kali diungkap Nazaruddin, pada 4 Juli 2011. Ketika itu Nazaruddin mengungkapkan bahwa proyek Wisma Atlet dan proyek Hambalang dibahas dalam tiga kali pertemuan. Pada pertemuan pertama yang digelar Januari 2010, disepakati permohonan anggaran Rp2,3 triliun untuk dua proyek tersebut.

Pertemuan itu, menurut Nazaruddin, dihadiri Menpora yang merangkap Sekretaris Dewan Pembina Demokrat, Angelina Sondakh, Mahyudin, dan dirinya. Pada pertemuan itulah Nazaruddin berkenalan dengan Wafid.

Andi Mallarangeng, seperti dikutip *Metro TV*, ketika itu, membenarkan pernah bertemu dengan Nazaruddin, Wafid, dan Angelina. Namun, kata dia, pertemuan itu tidak membahas proyek dan tender.

Jamuan menteri

Wafid hadir dalam persidangan itu atas perintah jaksa penuntut umum. Selain Wafid, jaksa juga memerintahkan untuk menghadirkan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Dedy Kusdinar, staf Seskemenpora bernama Poniran, dan pengusaha bernama Paulus Iwo.

Poniran dalam persidangan membeberkan bahwa dana talangan yang ia simpan digunakan juga untuk jamuan menteri. Selain, sambung dia, dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Kemenpora.

MAI RFAI

Wafid Muharam
Seskemenpora

"Dana talangan juga digunakan untuk protokol kementerian, misalnya, untuk jamuan makan menteri," ungkapnya.

Poniran memaparkan dirinya memang kerap diminta oleh Wafid untuk menyimpan dana pinjaman yang akan digunakan untuk kegiatan di Kemenpora. Dana pinjaman yang disimpan dalam sebuah brankas dan rekening Bank BCA itu, kata dia, berjumlah sekitar Rp6 miliar, dalam bentuk mata uang dari beberapa negara. Poniran juga menandaskan, hanya dirinyalah yang mengetahui kode kombinasi untuk membuka brankas tersebut.

Pengadilan Tipikor, kemarin, juga menggelar sidang dengan terdakwa mantan *marketing* PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Dalam persidangan itu dihadirkan saksi Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah Laurencius Teguh Khasanto Tan. (*/P-3)

henri@mediaindonesia.com

10 Agustus 2011

Nazaruddin Depresi

Kepada Dubes RI di Kolombia, Nazaruddin mengaku ingin cepat pulang ke Indonesia dan semua urusan lancar.

Jerome Eugene Wirawan

HINGGA hari ketiga dalam tahanan Interpol di pusat Kota Bogota, Kolombia, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berada dalam kondisi fisik yang baik. Namun, tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang, itu tampak mengalami depresi.

Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Menufandu menuturkan kondisi itu kepada *Media Indonesia*, tadi malam.

Menurut Michael, yang baru menjenguk Nazaruddin di tahanan, anggota Komisi VII DPR tersebut mengaku ingin cepat pulang ke Indonesia dan semua urusan berjalan lancar. Di tahanan, lanjut Michael, Nazaruddin juga menjalankan ibadah puasa.

"Sesuai petunjuk Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, KBRI terus memantau keadaan Nazaruddin. Saya pun menguunjungi dia pada malam hari. Kondisinya seperti orang depresi. Namun, dia tetap berpuasa. Pihak Interpol tidak heran, tapi terus mengawasinya," papar Michael.

Kepada Michael, Nazaruddin sempat menitipkan sebuah tas jinjing hitam seukuran tas laptop. Kini, tas tersebut berada di KBRI dan disegel. "Saya pun tidak bisa membukanya," kata Michael.

Pemeriksaan isi tas menunggu kedatangan tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri ke Bogota. Menurut Michael, tim tersebut sedang dalam perjalanan.

Meski demikian, terdapat tim lain dari Indonesia yang bertolak dari Republik Dominika. Michael mengaku tidak tahu dari instansi mana tim tersebut berasal. Ia memperkirakan tim Dominika tiba di Bogota Selasa (9/8) waktu setempat.

Lama penerbangan dari ibu kota Republik Dominika, Santo Domingo, ke Bogota, ialah 2 jam.

Di Tanah Air, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam menjamin keselamatan Nazaruddin dalam proses pemulangan dari Bogota, Kolombia, ke Indonesia. Untuk itu Polri menurunkan tim gabungan ke Bogota.

"Tadi malam (Senin, 8/8) pukul 19.00 WIB kami sudah turunkan tim yang langsung dipimpin Brigjen Anas Yusuf untuk memastikan proses pemulangan Nazaruddin berjalan dengan baik dan dalam keadaan utuh," ujar Anton di Mabes Polri, kemarin.

Brigjen Anas Yusuf adalah Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Menurut Anton, proses pemulangan Nazaruddin bakal ditempuh melalui jalur deportasi.

Jalur tersebut ditempuh karena Nazaruddin diketahui melanggar ketentuan imigrasi dengan menggunakan paspor yang bukan miliknya saat ditangkap polisi setempat. "Saat ini Nazaruddin masih tersangkut masalah hukum di Kolombia karena pemalsuan identitas. Artinya, itu ilegal. Proses pemulangan butuh waktu dan negosiasi dengan pemerintah di sana."

Saat ditangkap, Nazaruddin menyodorkan paspor atas nama Syarifuddin. Ternyata Syarifuddin adalah saudara Nazaruddin.

Kabag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Maryoto Sumadi mengungkapkan paspor Syarifuddin dikeluarkan pada 15 Juni 2005 di Kantor Imigrasi Polonia, Medan.

Syarifuddin sudah ditangkap Polda Sumatra Utara, kemarin. (*/SZ/X-7)

jerome@mediaindonesia.com

Berita terkait hlm 2

Tim Gabungan Penjemput Nazaruddin

Pemimpin

Brigjen Anas Yusuf
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri

10 Agustus 2011

SBY Bisa Ganti Anas

Partai Demokrat berjanji tidak melindungi kader, termasuk ketua umum, bila terbukti bersalah.

RATNA NURAINI

DEWAN Kehormatan (DK) Partai Demokrat sedang mencari fakta keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan kader lainnya dengan kasus yang disebut Nazaruddin.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Jakarta, kemarin, mengungkapkan DK Partai Demokrat sedang bekerja keras mengumpulkan fakta keterlibatan kader partai.

Kemudian fakta temuan DK, lanjut Max, akan menjadi dasar penonaktifan atau pemecatan siapa pun yang terlibat. "Saat ini biarkan DK bekerja dulu. Kami ikuti prosedur. DK sedang melakukan verifikasi," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, saat ini dirinya belum bisa berandai-andai soal penonaktifan Anas. Namun, bila Anas dan kader lainnya terlibat, penonaktifan dan pemecatan akan melalui prosedur internal Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, tambah Max, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya otoritas untuk menggantikan Anas. Semua bukti yang ditemukan oleh DK menjadi acuan keputusan. "Otoritas Pak SBY itu bisa mengganti ketua umum. AD/ART partai demikian," ujarnya.

Namun, dia mengakui penangkapan Nazaruddin berpeluang menyebabkan badai lebih besar lagi di internal partai. "Semua kader harus membuka diri terhadap berbagai tudingan dan kritik. Itu risiko politik, jangan pernah ciut," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta Nazaruddin mengungkapkan secara terbuka semua hal yang pernah diungkap.

Bagi kader Partai Demokrat yang terlibat, lanjutnya, akan diproses melalui DK. "Siapa pun yang terlibat, dari partai

Max Sopacua
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat

mana pun, akan ditindak. Kalau terkait kader Partai Demokrat, yang bersangkutan bisa dipenggal DK." *

Nazaruddin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi buron, ditangkap di kota wisata Cartagena, Kolombia, Minggu (7/8) pukul 02.00 waktu setempat.

Nazaruddin menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kasus Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. Selain itu, di Mabes Polri, Nazaruddin tengah dibidik dalam kasus korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan, serta dugaan pencemaran nama baik Anas Urbaningrum. Selain itu, Nazaruddin dibidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Sumbar) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit di Kabupaten Dharmasraya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mempersilakan pihak kepolisian untuk memeriksa kader Partai Demokrat terkait penangkapan Nazaruddin.

Partai Demokrat, imbuhnya, tidak melindungi kader, termasuk ketua umum, bila terbukti bersalah. "Siapa pun, kalau soal kebenaran, sarus kita tindak. Kita tidak bicara orang. Pertama kepentingan negara, kedua kepentingan partai, kepentingan orang itu paling belakang," ujarnya.

Dirinya berharap Nazaruddin membuka semua tudingannya di hadapan aparat hukum. Kesaksian Nazaruddin penting karena itu dirinya perlu dilindungi.

Tetapi, menurut Mubarok, sebenarnya korupsi yang dilakukan kader Partai Demokrat terhitung kecil jika dibandingkan dengan partai lain. Selain itu, Menurutnya, kesaksian Nazaruddin akan banyak menjaring pihak lain di luar Demokrat. "Bukan hanya itu, kalau nanti dilanjutkan, banyak orang lain yang terkena. Demokrat termasuk sedikit," terangnya. (*/P-1)

ratna@mediaindonesia.com

13 Agustus 2011

Tim Gabungan Cegah Suaka Nazaruddin

Sang buron minta diadili di Kolombia dalam kasus pemalsuan paspor.

Aryo Bhawono

INILAH pemulangan buron termahal dalam sejarah kejahatan di Indonesia. Pemulangan tersangka kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Muhammad Nazaruddin, menelan biaya Rp4 miliar.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu dipulangkan dari Bogota, Kolombia, menggunakan pesawat jet carteran ke Jakarta.

Semula dijadwalkan Nazaruddin tiba di Jakarta, kemarin. Namun, menurut laporan wartawan *Metro TV* **Desi Fitriani** dari Bogota, karena ada tarik-menarik di Bogota, tersangka baru tiba di Jakarta pagi atau siang ini. "Selain itu, transfer pembayaran pesawat belum sampai," ujarnya kepada *Media Indonesia*, tadi malam.

Setiba di Jakarta, Nazaruddin akan langsung diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Mungkin Sabtu tiba di Indonesia," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Jakarta, kemarin.

Pemulangan Nazaruddin dilakukan tim gabungan yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri Brigjen Anas Yusuf.

Kepastian pemulangan Nazaruddin juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Ia menyatakan Nazaruddin diberangkatkan Kamis pukul 17.20 waktu Bogota, atau Jumat pukul 05.20 WIB. "Diperkirakan (lama perjalanan) sekitar 20-24 jam," jelasnya. "Dari Polri, (Nazaruddin) akan diserahkan ke KPK."

Namun, semua pihak berwenang tidak memastikan di mana pesawat bakal mendarat. Pada Rabu (10/8), polisi mengatakan pesawat akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kemarin, polisi mengatakan belum pasti. Selain Halim, pesawat bisa pula mendarat di Pondok Cabe, Soekarno-Hatta, atau di Husein Sastranegara, Bandung.

Sebelum dipulangkan, melalui pengacara terkenal dari Bogota, Abelardo de la Espriella, Nazaruddin sempat mengajukan suaka politik ke Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Agung Kolombia secara tertulis. Namun, hal itu dicegah tim gabungan dan seorang petugas imigrasi Kolombia.

"Nazar ingin diadili di Kolombia dalam kasus pemalsuan dokumen paspor dengan ancaman hukuman empat tahun," kata Desi Fitriani.

Dibiayai KPK

Terkait dengan biaya pemulangan, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyebut biaya sewa pesawat jet Gulfstream sekitar US$500 ribu hingga US$600 ribu atau setara Rp4 miliar bila dikonversi. "Pertimbangannya keamanan."

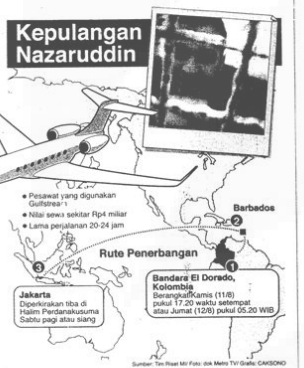

Nazaruddin ditangkap polisi Interpol Kolombia di kota wisata Cartagena, Minggu (7/8). Ia diketahui menggunakan pasporpasporsepupunya, Syarifuddin.

Soal lokasi penangkapan, hingga kini masih simpang siur. Apakah di kafe atau di bandara, juga apakah bersama istrinya, Neneng Sri Wahyuni, serta dua orang lainnya, Rahmat Nasir (WNI) dan Eng Kiam Lim Garrent (warga Singapura).

Di sisi lain, kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, merasa dipersulit untuk menemui kliennya oleh Dubes RI di Bogota, Michael Menufandu. Nazaruddin dipulangkan tanpa didampingi pengacaranya. (*/X-6)

bhawono@mediaindonesia.com

Berita terkait hlm 2

Tangan Nazaruddin Dibongkol

Kasus yang disangkakan kepada Nazaruddin ada tiga klasifikasi dengan total Rp8 triliun lebih.

Akhmad Mustain

SETELAH menempuh perjalanan sekitar 38,5 jam dari Bandara El Dorado Bogota, Kolombia, tadi malam pukul 19.50 WIB pesawat yang membawa tersangka Muhammad Nazaruddin dan tim penjemput mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pesawat jet Gulfstream dengan nomor register N913PD yang disewa senilai Rp4 miliar itu meninggalkan Bogota pada Kamis (11/8) pukul 17.20 waktu setempat atau Jumat (12/8) pukul 05.20 WIB. Pesawat meninggalkan sejumlah negara sebelum mendarat di Halim PK.

Setelah pesawat berhenti, sejumlah polisi masuk ke pesawat bersama tim Imaju (Indonesia Automatic Fingerprints Identification System) untuk melakukan sidik jari tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011.

Kirimkan tanggapan Anda atau berita ini melalui e-mail: [redacted] atau: [redacted] Facebook: [redacted] Twitter: [redacted]

Serouja penumpang yang turun ini lah pria sehingga dapat dipastikan tidak ada Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Anggota Komisi VII DPR dari Demokrat itu ditangkap di Cartagena, Kolombia hari Minggu (7/8).

Saat turun dari pesawat, tangan kiri Nazaruddin diborgol dengan tangan kanan petugas polisi. Buron Interpol itu tampak lesu. Kulitnya kehitaman. Dia mengenakan celana hitam, kaus ungu, dengan rompi antipeluru di balik jaket cokelat.

Nazaruddin dibawa ke Makobrimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian dia dibawa ke KPK dan tiba pukul 22.25. Kedatangan di KPK lalah untuk serah terima dari Ketua Tim Penjemput Brigjen Anas Yusuf kepada KPK. "Yang memimpin pemulangan ini lalah Interpol. Jadi secara resmi diserahkan ke KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Dia menambahkan pemeriksaan pertama di KPK tidak lama karena hanya menyangkut administrasi, status, serta hak dan kewajiban tersangka. Pemeriksaan dilanjutkan pekan depan.

Setelah pemeriksaan di KPK, Nazaruddin dibawa kembali ke Rutan Brimob untuk ditahan. Hadir mendampingi Nazaruddin lalah sepupunya M Nasir.

Barang bukti

Ketua KPK Busyro Muqoddas didampingi Kabareskrim Irjen Sutarman serta Anas Yusuf menggelar konferensi pers mengenai penangkapan Nazaruddin.

Penyidik KPK membuka barang bukti tas milik Nazaruddin yang ditinjukan kepada Duta Besar RI di Kolombia Michael Menufandu.

Di antaranya berisi BB Torch, BB Bold 9700, Nokia C5, Nokia E7, *flashdisk* Sony Vaio, jam tangan, uang US$ 20.000, dan dompet cokelat LV.

Busyro Muqoddas menuturkan terdapat tiga klasifikasi kasus yang disangkakan kepada Nazaruddin. Pertama, melibatkan dua kementerian dengan nilai Rp200 miliar. Kedua melibatkan dua kementerian dengan nilai Rp2,64 triliun. Ketiga melibatkan lima kementerian dengan jumlah 31 kasus. Klasifikasi ketiga tersebut, senilai Rp6,037 triliun.

KPK juga sudah menetapkan status Neneng, sebagai tersangka. (Tim Media/X-4)

mustain@mediaindonesia.com

Berita terkait hlm 2

NAZARUDDIN TIBA: Tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin, turun dari pesawat (atas) dan saat diserahterimakan di KPK, Jakarta, tadi malam.

Muncul Dugaan Cuci Otak

NAZARUDDIN akhirnya kemarin tiba di Indonesia pada pukul 19.51 WIB. Namun, kedatangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu lebih lama daripada yang dijadwalkan pukul 17.40 WIB. Pengacara Nazaruddin, OC Kaligis, menduga adanya proses pencucian otak terhadap anggota DPR itu selama perjalanan ke Tanah Air.

Bahkan kedatangan Nazaruddin lebih lambat 3,5 jam daripada kedatangan OC Kaligis yang juga bertolak dari Kolombia. Kaligis yang menggunakan pesawat komersial tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 16.20.

"Penerbangan Nazaruddin dari Kolombia ke Indonesia menggunakan pesawat carter selama 38 jam bersama polisi dan penyidik KPK akan menjadi ajang cuci otak terhadap Nazaruddin," ujar OC Kaligis seusai mengisi acara di *Metro TV*, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, indikasi pencucian otak diperkuat karena Nazaruddin dipulangkan tanpa diperkenankan didampingi oleh pengacara.

Kaligis mengaku sudah tidak bisa berbuat apa-apa jika nantinya Nazaruddin mencabut semua pengakuan yang disampaikan sebelumnya. "Saya menduga, Nazaruddin juga akan dipaksa untuk mencabut kuasa saya sebagai penasihat hukumnya."

Dugaan terjadi proses cuci otak dan rekayasa lainnya kepada Nazaruddin selama perjalanan pulang diamini oleh penasihat hukum Indonesian Police Watch Jhonson Panjaitan. Dia mengatakan, rekayasa sangat besar terjadi sebab proses penyerahan tidak terbuka.

"Pertanyaan besar, tidak hanya soal Nazaruddin diapakan selama di pesawat, tetapi saat di lokasi transit. Ruang-ruang gelap ini sangat mungkin terjadi," tukas Jhonson.

Dia menambahkan, ada indikasi bahwa Nazaruddin diminta menguranggi nama-nama yang terlibat dalam kasus Nazaruddin dalam pemberkasannya. Atau bahkan mengenai jaringan luas yang terlibat dalam kasus tersebut. "Hak-hak hukum Nazaruddin telah dikunci pihak lain." (*/I-1)

KPK Isolasi Nazaruddin

Pengacara dilarang menjenguk Nazar karena KPK mengkhawatirkan dia diintervensi.

AMAHL S AZWAR

MUHAMMAD Nazaruddin diisolasi total. Pengacara dan anggota keluarga tidak boleh menjenguknya. Meski ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, Nazaruddin bahkan diperiksa tanpa didampingi pengacaranya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Nazar selama 3 jam hingga Minggu (15/8) pukul 01.24 WIB. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang.

Pemeriksaan Nazaruddin yang tanpa didampingi pengacara itu memunculkan tafsir bahwa KPK tidak transparan. Padahal, KUHAP mewajibkan tersangka yang diancam hukuman di atas lima tahun untuk didampingi pengacara. KPK berkilah Nazaruddin sendiri yang tidak mau didampingi pengacara.

Penasihat KPK Said Zainal Abidin mencurigai ada aktor di balik perubahan sikap Nazar yang enggan didampingi pengacara. Kecurigaan itu muncul beralasan sebab Nazar terbang selama 38,5 jam dari Kolombia tanpa didampingi pengacaranya, OC Kaligis. Dia tertangkap Interpol di Cartagena, salah satu pantai di Karibia, setelah menjadi buron KPK selama 75 hari.

OC Kaligis tetap berupaya menemui Nazar yang mendekam di Blok B Rutan Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kaligis bersama Muhammad Nasir, sepupu Nazar, menyambangi tahanan pada pukul 10.00, kemarin. Akan tetapi, keduanya hanya sampai di pintu gerbang.

Cuci otak

Kaligis pun meradang lantaran tak diizinkan menemui kliennya. Padahal, dia sudah menunjukkan kepada penjaga Pasal 70 Undang-Undang 8/1981 tentang KUHAP yang menyebutkan pengacara berhak menghubungi dan bebicara setiap waktu dengan tersangka untuk kepentingan perkaranya.

"Saya tidak salahkan polisi. Tadi polisi bilang dia dapat perintah KPK. OC tidak boleh masuk," tandas Kaligis.

KPK bergeming. Wakil Ketua KPK M Jasin khawatir Nazar terkontaminasi. "Kalau semua boleh menjenguknya, nanti banyak intervensi. Yang bersangkutan juga masih kelelahan. Jadi, butuh istirahat," kilahnya. ✓

Kaligis pun mengkhawatirkan kondisi kliennya. Ia khawatir Nazar mengalami cuci otak. Kekhawatiran Kaligis beralasan. Selama buron, Nazar berkicau bahwa uang korupsi proyek yang dibiayai APBN mengalir ke pimpinan partai berkuasa, Partai Demokrat.

Nazar tidak asal bicara. Ia menyebut alat bukti kicauannya disimpan secara digital. Ketika tampil di *Skype*, ia memperlihatkan *flash disk* bermerek Sandisk. Namun, *flash disk* yang dipamerkan KPK sebagai barang bukti bermerek Sony.

Kini Nazar, menurut ketua KPK Busyro Muqoddas, menghadapi tuduhan terlibat puluhan kasus korupsi dengan nilai total Rp6 triliun. ✓

Perincinannya kasus di dua kementerian yang masuk kategori penyidikan dengan nilai Rp200 miliar, kasus di dua kementerian lain yang masih tahap penyelidikan senilai Rp2,6 triliun, dan 31 kasus di lima kementerian yang masih dalam tahap pengumpulan keterangan. (KG/*/X-3)

amahl@mediaindonesia.com

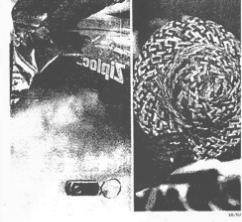

BARANG BUKTI: Petugas membuka tas milik Muhammad Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/4) malam. Tas itu di antaranya berisi *flash disk* bermerek Sony. Petugas juga memperlihatkan topi anyaman yang dipakai Nazaruddin saat tampil di *Skype*. Namun, *compact disc* dan *flash disk* merek Sandisk yang pernah ditunjukkan Nazaruddin di *Skype* tidak ada dalam tas tersebut.

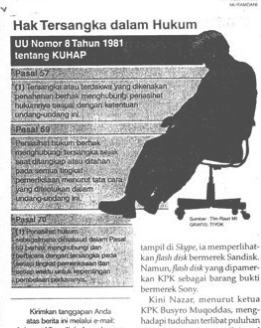

Hak Tersangka dalam Hukum

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Sumber: Tim Riset & GRAFIS: TYOK

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: **interspub@mediaindonesia.com** atau **mediaindonesia.com**

Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: **@Mldotcom**

Neneng bakal Diburu Interpol

SETELAH berhasil menangkap buron, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin melalui jasa Kepolisian Internasional (Interpol), Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera melayangkan *red notice* (surat permohonan penangkapan) kepada Interpol untuk menangkap Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin.

"*Red notice* itu kan harus sesuai prosedur. Kita lihat dulu kalau dia (tersangka) terbukti berada di luar negeri, baru kita ajukan ke Interpol," ujar Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

KPK sudah menetapkan Neneng sebagai tersangka kasus proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2008.

Sama seperti suaminya, Neneng juga mangkir dalam panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Ia telah dua kali tidak hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan proyek pengada[illegible] barang yang merugikan keuangan negara sekitar Rp6 miliar itu.

[illegible]ersadian Neneng misteriusnya. Saat jumpa pers Sabtu (13/8) malam, K[illegible] ta KPK Busyro Muqoddas mengaku tidak mengetahui keberadaan Neneng. Padahal, Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Menufandu mengatakan, saat-saat kapan Nazaruddin di Bogota dan Rafael Nunez, Kolombia, Neneng mendampingi sang suami. Selain Neneng, Rahmat Nasir (WNI) dan Eddi Kiam Lim Garrent, warga Singapura, juga mendampingi Nazaruddin.

Kadiv Hubmas Polri Irjen Anton Bachrul Alam [illegible] kan menyalakan Neneng dan dua rekan Nazaruddin bakal ditawas bersama Nazaruddin dalam pesawat carteran, Gulfstream, dari Bogota ke Jakarta (*Media Indonesia*, 13/8). Namun, kenyataannya pesawat yang dibayar Rp6 miliar itu mendarat, Neneng dan dua rekan Nazaruddin tidak tampak. (SZ/X-6).

15 Agustus 2011

Chandra Hamzah Diminta Nonaktif

KPK tidak bakal melibatkan nama-nama yang terlibat dalam penanganan kasus Nazaruddin.

AMAHL S AZWAR

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah diminta nonaktif dari penyelidikan kasus yang melibatkan tersangka suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin.

"Untuk mengembalikan kepercayaan publik, memang pihak yang diduga terlibat konflik kepentingan sebaiknya tidak terlibat," ujar peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan, saat Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di KPK. Saat itu, Bibit dan Chandra sedang didera kasus dugaan suap oleh Anggodo Widjojo. Anggodo ialah adik buron KPK Anggoro Widjojo.

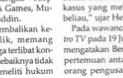
MOELIANTO

Chandra M Hamzah
Wakil Ketua KPK

"Itu upaya membangun integritas penyidikan yang dilakukan KPK," ujar Abdullah.

Dia mengingatkan, pemulangan Nazaruddin ke Tanah Air merupakan momentum awal bagi KPK untuk membongkar pola korupsi di dalam elite politik. Karena itu, KPK harus membuktikan tidak ada satu pun intervensi politik yang menghalangi penyelidikan kasus Nazaruddin.

Abdullah juga mengimbau Komite Etik KPK harus bergerak cepat untuk mencari fakta dari tudingan Nazaruddin yang juga menyeret Wakil Ketua KPK M Jasin, mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, dan juru bicara KPK Johan Budi SP.

Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, berdasarkan prosedur standar operasi, KPK telah melarang keterlibatan unsur pimpinan yang memiliki konflik kepentingan dalam penyelidikan suatu kasus.

Menurut Abdullah, secara otomatis Chandra tidak akan mencampuri kasus yang melibatkan namanya sendiri. "Siapa saja yang punya konflik kepentingan dengan suatu kasus, tidak boleh ikut serta, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan," katanya.

Akan tetapi, menurutnya, Chandra Hamzah tidak perlu nonaktif dari KPK. "Karena beliau tidak akan mencampuri kasus yang melibatkan nama beliau," ujar Hehamahua.

Pada wawancara dengan *Metro TV* pada 19 Juli, Nazaruddin mengatakan Benny ikut dalam pertemuan antara dirinya, seorang pengusaha, dan Chandra Hamzah. Pertemuan itu untuk merekayasa perkara pengadaan baju hansip dalam pemilu yang ditangani KPK.

Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolombia, pada Minggu (7/8). Pada 13 Agustus, sang buron tiba di Tanah Air dengan pesawat jet yang disewa senilai Rp4 miliar.

Pisahkan tugas

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas juga berharap Chandra mampu memisahkan urusan pribadi dan tugas. "Dia tahu diri, bisa memisahkan antara substansi tugas dan soal pribadi. Lagi pula masih ada unsur pimpinan yang lain," ujar Erry.

Menurut Erry, penangkapan Nazaruddin merupakan salah satu kunci membuka banyak kasus korupsi lain. Ia pun mengimbau publik mengawasi proses pengadilan terhadap mantan anggota Komisi III DPR itu.

Erry menambahkan fakta di pengadilan jauh lebih penting ketimbang menduga-duga tanpa fakta. "Tunggu pengadilan saja deh daripada menduga-duga tanpa fakta. Mudah-mudahan terbuka semuanya," imbuh dia.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap Komite Etik KPK juga turut mengawasi pemeriksaan Nazaruddin.

"Untuk menghilangkan kecurigaan publik, Komite Etik KPK sebaiknya ikut melakukan pengawasan," ujarnya. (*/P-1)

amahl@mediaindonesia.com

16 Agustus 2011

FOTO-FOTO: MEDIA INDONESIA

DUENGUK DI RUTAN: Tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 Muhammad Nazaruddin dyenguk sepupunya, Muhammad Nasir, tim Komisi III DPR, dan pengacaranya, OC Kaligis, di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tadi malam.

Sumber: Tim Riset MetroTV, Wawancara, Berbagai Sumber

Nazaruddin Ketakutan Tampak Linglung

KPK menyebut ada dua tim pengacara yang mengaku menjadi kuasa hukum Nazar, berasal dari tim OC Kaligis dan Elza Syarief.

Nurulia Juwita Sari

MUHAMMAD Nazaruddin mengalami kelelahan yang begitu luar biasa. Tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 itu berada dalam kondisi kebingungan dan ketakutan.

Saat ditemui tim Komisi III DPR di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, kemarin, Nazar tampak linglung, la lebih banyak diam dan lesu.

"Masih terlihat linglung, belum stabil. Apakah karena perjalanan panjang atau karena apa, kita tidak tahu," tutur anggota Komisi III DPR Ahmad Yani kepada wartawan.

Nazar mendekam di sel sejak Sabtu (13/8) setelah terbang selama 38,5 jam dari Kolombia. Dia ditangkap oleh Interpol di Cartagena, salah satu pantai di Karibia, setelah menjadi buron KPK selama 75 hari.

Sejak ditahan itulah Nazar diisolasi KPK. Ia tidak diperkenankan menerima kunjungan OC Kaligis selaku pengacaranya dan Muhammad Nasir, sepupu Nazar yang anggota Komisi III DPR, pada Minggu (14/8). Itu lah sebabnya, Kaligis dan Nasir kemarin mengadu kepada Ketua DPR Marzuki Alie.

Marzuki didampingi Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Anis Matta. Dua Wakil Ketua Komisi III DPR juga hadir, yaitu Aziz Syamsudin dan Fahri Hamzah. Dalam pertemuan itu disepakati tim Komisi III DPR mendampingi Kaligis dan Nasir untuk menjenguk Nazar.

Marzuki berpesan agar fisik dan mental Nazar tetap dijaga. Pada kesempatan itu, Kaligis menyerahkan kepada pimpinan dewan salinan surat permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi Nazar.

Sebelum menjenguk Nazar, Kaligis mendatangi Komnas HAM. Ia mengadukan KPK yang menghalang-halangi dirinya bertemu dengan kliennya.

Kuasa hukum

Nasir dan Kaligis terlihat lega setelah menemui Nazar. Pertemuan itu didampingi tim Komisi III yang dipimpin Azis Syamsuddin. Anggota tim terdiri atas Nudirman Munir, Herman Heri, dan Ahmad Yani.

Dalam pertemuan selama 20 menit itu, Nazar mengaku sudah dua hari tidak makan. Ia juga mengeluhkan kenyamanan ruang tahanan. Ahmad Yani tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Nazar tidak mau makan.

"Apa karena takut diracun?" tanya wartawan.

"Saya enggak *ngerti*," jawab Yani.

Sebelum bertemu pimpinan dewan, Nasir sempat mengkhawatirkan kondisi Nazar. Ia menjelaskan bahwa Nazar yang berada dalam kondisi sakit itu ketakutan saat diberi makan. Anehnya lagi, kata Nasir, setelah memint: dokter, dan dokter didatangkan, Nazar justru menolak diperiksa dokter itu.

"Nazar sudah dicuci otaknya dan diracun," ujarnya.

Meski Kaligis sudah bertemu Nazar, KPK tetap beranggapan bahwa Nazar belum mempunyai kuasa hukum yang legal. Juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan, saat Nazar dibawa ke KPK pada Sabtu (13/8), terdapat dua tim pengacara yang mengaku menjadi kuasa hukum Nazar, yaitu tim OC Kaligis dan Elza Syarief.

Menurut Kaligis, ia mendapat kuasa tertulis, sedangkan Elza hanya mendapatkan kuasa lisan dari Nazar. Menurut Kaligis, Nazar tetap meminta ia menjadi kuasa hukumnya. Di sisi lain, Elza yang didemui kemarin enggan menjelaskan perihal penunjukan dirinya selaku kuasa hukum Nazar. (KG/SZ/*)(X-3)

nurulia@mediaindonesia.com

Berita terkait hlm 2 & 7

16 Agustus 2011

Nazaruddin dan Menpora Saling Koordinasi

Persoalan konflik kepentingan kerap membuat upaya pemberantasan korupsi tersendat.

Fardiansah Noor

PERTEMUAN antara pemilik PT Permai Group Muhammad Nazaruddin, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Seskemenpora Wafid Muharam pada awal 2010 memang sempat membicarakan beberapa proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurut Wafid Muharram, dalam pertemuan tersebut Nazaruddin sempat mengatakan ia akan berkoordinasi dengan Menpora Andi Mallarangeng untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut.

"Saya bukan pengambil keputusan. Saya punya pimpinan juga. Pak Nazar bilang, nanti dia yang bilang ke Pak Menteri," kata Wafid Muharam saat bersaksi dalam lanjutan persidangan Rosa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Sayangnya dalam kesaksian tersebut, Wafid tidak menjelaskan terkait proyek apa yang akan dikoordinasikan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Menpora Andi Mallarangeng.

Meski tidak juga menjelaskan, dalam persidangan tersebut Rosa mengungkapkan pertemuan di rumah makan Jepang Arcadia itu sudah membicarakan berbagai proyek. "Pak Nazar sudah macam-macam bicaranya, tapi sudah mengarah ke perusahaan. Mungkin ada anggaran tentang Hambalang atau Wisma Atlet. Waktu itu Bapak (Wafid) sempat bilang, saya (Wafid) siap menjalankan perintah. Kalau pimpinan-pimpinan sama sebelah sudah oke, jalankan saja," urai Rosa.

Menurut Rosa, ini merupakan hal yang wajar kalau Wafid melupakan kronologi pertemuan tersebut. Kata Rosa, dalam pertemuan tersebut ia melihat Wafid terlalu sibuk menelepon. "Bapak enggak sempat bicara-bicara karena Bapak langsung dipanggil Pak Menteri," cetus Rosa.

Dalam persidangan Wafid berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan majelis hakim. Bahkan Hakim Hendra Yosfin pun sempat mengingatkan Wafid agar menjawab dengan jujur terkait cek Rp3,2 miliar yang diterimanya saat dia tertangkap KPK. Apakah itu dana pinjaman atau *fee* untuk proyek Kemenpora.

Tinggal Bibit

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah secara otomatis tergeser dari pengembangan kasus yang M Nazaruddin. Selain Chandra, nama-nama lain yang diduga terkait Nazaruddin melalui pemberitaan media massa yakni Ketua KPK Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin, dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar pun nonaktif dari penyelidikan kasus tersebut.

"Yang tanda tangan semua surat mengenai pengembangan kasus Nazaruddin hanya saya. Hal ini dilakukan supaya pengembangan kasus tidak terganggu masalah yang remeh-remeh," ujar Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, saat ditemui di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menambahkan Chandra tidak boleh ikut di dalam pemeriksaan apa pun terkait Nazaruddin. Sebab, menurut dia, Chandra memiliki dugaan konflik kepentingan di dalam kasus yang melibatkan mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut. (*/SZ/P-2)

fardiansah@mediaindonesia.com

16 Agustus 2011

Benny Akui Pertemuan Nazaruddin-KPK

Komite Etik mendengarkan rekaman percakapan yang membahas skenario pembunuhan Chandra Hamzah dan Ade Raharja.

AMAHL S AZWAR

M/ANGGA YUNAMI

PENUHI PANGGILAN: Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman memenuhi panggilan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

POLITIKUS Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, memenuhi panggilan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Komite Etik mengumpulkan bahan terkait tudingan Muhammad Nazaruddin mengenai pertemuannya dengan pimpinan KPK membahas perkara tertentu.

Benny yang juga Ketua Komisi III DPR itu diperiksa selama sekitar 1,5 jam oleh Komite Etik yang dipimpin Abdullah Hehamahua. Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet di Palembang, Sumsel, pernah menyebut Benny menghadiri pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah di rumahnya serta bertemu Deputi Penindakan KPK (saat itu) Ade Raharja pada 2010 di sebuah restoran Jepang.

"Komite Etik menanyakan kepada saya dua pertemuan itu. Pertama, pertemuan di restoran Jepang di Casablanca dengan Ade Raharja, Nazaruddin, dan Saan Mustopa (Wakil Sekjen Demokrat). Kedua, pertemuan di rumah Nazaruddin dengan Chandra Hamzah," ujar Benny seusai diperiksa.

Pada pertemuan pertama, Benny mengaku datang terlambat. Di sana telah hadir Ade, Nazaruddin, Saan, dan penyidik KPK bernama Roni Samtana. Pada pertemuan itu, Benny juga telah meminta maaf kepada Ade sekaligus meminta agar tidak mengikuti informasi apa pun dari Nazaruddin.

"Mengapa? Karena kami dari Partai Demokrat tidak ingin ada intervensi terhadap proses penegakan hukum, terutama terhadap KPK," kata Benny.

Pada pertemuan kedua, kata Benny, dia datang sebagai bawahan Nazaruddin di Demokrat. Dalam pertemuan itu tidak bicara kasus atau transaksi, juga tidak ada penyerahan uang seperti dituding Nazaruddin.

Anggota Komite Etik Ahmad Syafii Maarif mengatakan Benny mengaku mengetahui upaya Nazaruddin melobi KPK. Namun, Benny meminta Ade Raharja untuk tidak mengikuti permintaan Nazaruddin.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan ketika masih dalam pelarian di luar negeri, Nazaruddin mengatakan dalam pertemuan dengan Chandra dibahas permintaan seorang pengusaha agar kasus pengadaan pakaian seragam hansip untuk pemilu tidak diproses KPK. Bahkan dalam pertemuan itu, Chandra menerima sejumlah dana yang diserahkan pengusaha tersebut.

Dalami

Saat menanggapi pengakuan Benny, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan Komite Etik perlu mendalami pengakuan Benny mengenai dua pertemuan itu.

"Inisiatif memengaruhi kasus itu berasal dari Nazaruddin, tetapi Benny mengatakan Ade tidak perlu mengikuti. Apakah itu penyimpangan oleh KPK atau Nazaruddin, perlu ditelusuri lebih dalam," ujar Febri.

Menurut Febri, jika ada upaya intervensi seperti itu, seyogianya Ade menyampaikan kepada pimpinannya.

Komite Etik juga mendengarkan rekaman percakapan yang diduga membahas skenario penyapan nyawa Chandra Hamzah dan Ade Raharja. Namun, menurut Abdullah Hehamahua, dirinya tidak bisa mengungkapkan identitas pembicara di dalam rekaman tersebut. (Ant/X-4)

amahl@mediaindonesia.com

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: **interupsi@mediaindonesia.com** atau **mediaindonesia.com**
Facebook: **Harian Umum Media Indonesia**
Twitter: **@MIdotcom**

18 Agustus 2011

Nazaruddin Janji tidak Seret Demokrat

Tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games itu meminta kepada SBY untuk melindungi istrinya.

Amahl S Azwar

EFISODE nyanyian Muhammad Nazaruddin berakhir sudah. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tidak segarang dulu saat menjadi buron di luar negeri dalam wawancara dengan berbagai media.

Nazaruddin malah kini berjanji tidak akan menyeret koleganya di Partai Demokrat dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus hukum yang membelitnya.

"Dia bilang, pada berita acara pemeriksaan (BAP) pada Kamis (18/8) dia akan mengatakan, 'Saya sendiri yang salah, masukkan saya ke pengadilan *copet-copet*. Partai Demokrat dan KPK tidak salah. Hukum saya secepat-cepatnya'," tutur kuasa hukum Nazaruddin, Otto Cornelis Kaligis, saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Kaligis mengaku sudah menemui kliennya di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/8). Dalam pertemuan selama 2 jam itu, Nazaruddin masih terlihat kebingungan. Matanya pun terlihat sembap.

Nazaruddin, kata Kaligis, kebingungan memikirkan kondisi istrinya, Neneng Sri Wahyuni, dan anak-anaknya yang kini belum diketahui persis berada di negara mana. KPK menetapkan Neneng sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Dalam kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp8,9 miliar.

"Nazaruddin akan meminta kepada Presiden SBY supaya istrinya yang tidak tahu apa-apa jangan ditahan KPK. Ia juga meminta istrinya diberi perlindungan," ungkap Kaligis.

Kaligis bersama sejumlah anggota Komisi III DPR memaksa menemui Nazaruddin di Mako Brimob setelah advokat senior itu merasa dipersulit untuk bertemu kliennya, Senin (15/8). Dalam pertemuan itu, Nazaruddin tampak linglung. Ia lebih banyak diam dan lesu. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games 2011 itu mengalami cuci otak.

Nazar mendekam di sel sejak Sabtu (13/8) setelah terbang selama 38,5 jam dari Kolombia. Dia tertangkap oleh Interpol di Cartagena, setelah menjadi buron KPK selama 75 hari.

Buron Interpol

Terkait dengan Neneng Sri Wahyuni, KPK memastikan pengajuan *red notice* (perintah penangkapan). "*Red notice* sedang dalam proses. Ya, pasti ke sana (diajukan ke Polri)," ujar Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sebelum bengkang ke luar negeri, Neneng tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi.

Di sisi lain, Busyro mengeluhkan kekurangan tenaga penyidik untuk mendalami kasus-kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin, yakni 31 kasus di lima kementerian. Dari puluhan kasus itu, negara berpotensi dirugikan Rp6 triliun.

Tudingan Nazaruddin

1. Anas Urbaningrum menggunakan dana APBN dalam pemenangan Kota Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung.
2. Andi Mallarangeng menerima dana dari proyek Wisma Atlet.
3. Angelina Sondakh (F-PD), Wayan Koster (F-PDIP), dan Mirwan Amir (F-PD) menerima aliran dana proyek Wisma Atlet.
4. M Jasin, Chandra M Hamzah, dan Ade Raharja terlibat nekayasa kasus Wisma Atlet bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
5. Benny K Harman (F-PD) ikut hadir dalam pertemuan dengan Chandra M Hamzah di rumah Nazaruddin.
6. Jafar Hafsah (F-PD) mengetahui aliran dana Wisma Atlet.

Sumber: Tim Riset MEDIA INDONESIA/ METRO TV/SINAR/IL TIVOK

Soal isu Nazaruddin bakal diracun, Menko Polhukam Djoko Suyanto menjamin tidak akan ada hal itu. "Kepolisian tidak akan sembarangan mengelola tahanan Nazaruddin. Pesannya sudah jelas, menjaga keselamatannya." (KG/*/X-6)

amahl@mediaindonesia.com

18 Agustus 2011

Berlebihan, DPR Besuk Nazaruddin

Pembuktian kasus korupsi di pengadilan jauh lebih valid dan transparan daripada membuat konsesi setengah kamar.

NURULIA JUWITA SARI

TEATRIKAL NAZARUDDIN TOBAT. Santri melakukan aksi teatrikal dengan mengenakan topeng mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarin. Dalam aksi itu, mahasiswa bertopeng dengan tulisan Nazarudding mengaku bertobat dan siap bicara sejujur-jujurnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

HEBOH kedatangan sejumlah anggota Komisi III DPR menjenguk tersangka kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games M Nazaruddin menuai kecaman. Kritik paling lantang disuarakan dari rekan Nazaruddin di Partai Demokrat.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai langkah beberapa anggota Komisi III DPR menemui bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, sebagai tindakan berlebihan. "Kita melihat tindakan itu berlebihan. Jangan kamu mentang-mentang DPR, semua mau kita tabrak di sana," ujarnya ditemui seusai mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPR, Selasa (16/8).

Rombongan Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, pada Senin (15/8) mendampingi sepupu Nazaruddin, Muhammad Nasir, dan pengacara OC Kaligis menemui Nazaruddin. Rombongan sempat tidak diizinkan masuk dan bersitegang dengan aparat serta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berlebihan karena izin kan ada di KPK. Bagaimana bisa masuk ke penahanan tanpa izin. Tidak bisa jadi semau gue *selonong boy*. Harus ikut aturan. Citra DPR harus kita jaga dari perbuatan, tingkah, dan manuver-manuver politik," cetusnya.

Selain Azis dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), anggota Komisi III yang ikut menjenguk adalah Nurdiman Munir (F-PG), Herman Herry (F-PDIP), dan Ahmad Yani (F-PPP).

Kepergian anggota Komisi III ke Mako Brimob tersebut justru tidak diketahui Benny K Harman selaku Ketua Komisi III DPR. Menurutnya, ia baru mengetahui perihal kunjungan tersebut dari pemberitaan media massa.

Ketika ditanya apakah itu berarti kunjungan anggota Komisi III tersebut tidak meminta izin dirinya, Benny enggan berkomentar banyak.

"Itu kesimpulan Anda. Kalau mereka ke sana itu atas nama pribadi. Biasa saja. Kita dulu juga menjenguk Panda Nababan," terang anggota F-PD itu.

Rasa kemanusiaan

Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan sangat mungkin pihaknya akan berkunjung ke Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua dalam waktu dekat untuk menjenguk Nazaruddin.

Jafar menegaskan, kunjungan tersebut sebagai bentuk rasa kemanusiaan saja. Terkait dengan ancaman terhadap Nazaruddin, Jafar menilai keselamatan Nazaruddin sudah dijamin KPK.

Di satu sisi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak menyalahkan larangan kunjungan membesuk Nazaruddin di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

"Ada aturan main dong, masa enggak ada aturan main. Namun, kan enggak harus setiap saat, ada waktunya ada jamnya di situ kan enggak sendiri ada aturan internal," kata Patrialis.

Terkait kedatangan Komisi III DPR, Menkum dan HAM enggan berkomentar lebih jauh. "*No comment* soal dipaksa atau enggak. Tentu di sana ada prosedur, tapi kalau anggota DPR ingin lihat rakyatnya, ya tidak apa-apa," tuturnya.

Manuver Nazaruddin yang memberberkan sejumlah kasus korupsi mendapat sorotan dari masyarakat Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Kemarin, Forum Santri se-Sulawesi Barat menggelar peringatan Hari Kemerdekaan RI dengan aksi teatrikal. Dalam upacara itu, seorang peserta yang berperan sebagai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin mengaku bertobat dan siap bicara sejujur-jujurnya di KPK.

Aksi itu dihelat di Desa Pambusung, Polewali Mandar, Sulbar, tempat kelahiran mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang dikenal karena integritasnya.(*/FH/P-2)

nurulia@mediaindonesia.com

MEDIAINDONESIA

SEUSAI DIPERIKSA KPK: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin.

Nazaruddin Mengaku Lupa Semuanya

Ia berjanji tidak akan menceritakan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat dan KPK demi kelangsungan bangsa ini.

AMAHL S AZWAR

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mendadak amnesia. Ia mengaku lupa semua hal yang berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang.

Tersangka kasus suap itu juga mengaku sudah lupa atas pengakuannya saat menjadi buron. Anggota Komisi VII DPR itu bahkan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak mengganggu anak dan istrinya.

"Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak-istri saya. Saya enggak akan *ngomong* apa-apa. Saya lupa semuanya. Saya enggak tahu apa-apa," tutur Nazaruddin.

Ia menuturkan hal itu kepada wartawan setelah diperiksa selama 2 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, kemarin. Ia tiba di Gedung KPK pada pukul 10.35 WIB.

Saat dibawa petugas dengan tangan terborgol, Nazar yang mengenakan kemeja biru bergaris putih dengan kerah baju berwarna putih dan celana jins hitam itu hanya menunduk. Ia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Ternyata menurut kuasa hukumnya, OC Kaligis, Nazar sudah menyiapkan surat untuk SBY.

Dalam surat tertanggal 18 Agustus itu, Nazar mengaku rela dihukum penjara bertahun-tahun–bahkan tanpa proses persidangan–asalkan SBY memberi ketenangan kepada istri dan anak-anaknya.

"Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apa pun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji, saya tidak akan menceritakan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa ini', tulis Nazar.

Ketika menjadi buron, Nazar berkicau bahwa uang korupsi proyek yang dibiayai APBN mengalir ke pimpinan Partai Demokrat dan elite partai di Badan Anggaran DPR.

Nazar juga menyebut uang US$5 juta dan Rp35 miliar yang diangkut dengan mobil buks dipakai untuk memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung, tahun lalu.

Presiden Yudhoyono yang merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat enggan berkompromi dengan tawaran Nazar.

"Beliau berpesan proses hukum dari Saudara Nazaruddin dijalankan berdasarkan aturan berlaku. Kalau dikatakan menggangu anak-istri, tidak ada sedikit pun kaitan dengan Pak SBY," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.

> **"Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak-istri saya. Saya enggak akan *ngomong* apa-apa. Saya lupa semuanya."**
>
> **Muhammad Nazaruddin**
> Tersangka kasus suap

Masih bungkam

Nazar masih bungkam saat diperiksa. Dalam berita acara pemeriksaan, Nazar mengatakan ia tidak akan memberi keterangan sebelum dipindahkan dari Mako Brimob ke LP Cipinang. Ia juga memohon tidak diborgol.

Kaligis enggan menjawab saat ditanya wartawan apakah Nazar mendapat tekanan di Mako Brimob. "Tanya saja dia. Jangan tanya lagi kenapa. Saya tidak bisa tafsirkan. Nanti jadi polemik," kilahnya.

KPK belum bersikap atas permintaan Nazar. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan pihaknya akan menanyakan langsung kepada Nazar soal keinginan pindah rumah tahanan. Terkait dengan sakit lupa Nazar, Bibit mengatakan yang penting alat buktinya lengkap. (Mad/*/X-3)

amahl@mediaindonesia.com

Berita terkait hlm 2

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: **interupsi@mediaindonesia.com** atau **mediaindonesia.com**
Facebook: **Harian Umum Media Indonesia**
Twitter: **@MIdotcom**

22 Agustus 2011

Nazaruddin Sebut Pernah Bertemu Busyro

KPK belum berencana memindahkan penahanan Nazaruddin. KPK juga akan memperketat orang yang hendak menemui Nazaruddin.

Ardi Teristi Hardi

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kembali bernyanyi. Kali ini, dia mempertanyakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang pura-pura tidak kenal Nazaruddin.

"Nazaruddin bilang sama saya, kenapa Busyro sekarang pura-pura tidak kenal sama dia," ujar kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, saat dihubungi melalui telepon seluler di Jakarta, kemarin.

Menurut Kaligis, Nazaruddin mengaku pernah bertemu dengan Busyro sekitar satu tahun lalu, atau saat pemilihan calon pemimpin KPK pengisi posisi Antasari Azhar.

Saat itu, kata Kaligis, Busyro bersaing ketat dengan advokat Bambang Widjojanto menuju tahap *fit and proper test* di DPR. Saat itu, Bambang mendapat dukungan dari Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR.

MEDIAINDO

Busyro Muqoddas
Ketua KPK

"Busyro lantas bertemu dengan Nazaruddin dan seorang politikus di daerah Kemang, Jakarta Selatan, untuk memperoleh dukungan. Busyro sekarang bisa jadi Ketua KPK itu karena dukungan Demokrat," ujar Kaligis.

Nyanyian itu memperkuat pernyataan Wakil Ketua KPK M Jasin pada 26 Juli. Jasin menyebut nama pejabat KPK lain yang pantas diperiksa Komite Etik KPK, termasuk Busyro Muqoddas. Pasalnya, menurut Jasin, Busyro juga pernah bertemu dengan Nazaruddin.

Beberapa jam sebelum pernyataan Jasin, Busyro menyatakan KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa kebenaran tudingan Nazaruddin terhadap nama-nama pejabat KPK, yakni Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, M Jasin, dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja.

Saat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Busyro Muqoddas menegaskan tidak pernah bertemu Nazaruddin seperti yang dikatakan OC Kaligis. "Ngelindur kalau saya ketemu Nazar. Saya malas menanggapi orang yang ngelindur. Itu orang yang ngigau saja. Enggak benar sama sekali," kata Busyro, Sabtu (20/8).

Tidak dipindah

Busyro juga menegaskan, KPK tidak akan memindahkan Nazaruddin dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua. "Sampai saat ini, tidak ada alasan akurat memindahkan Nazaruddin," terangnya.

Dia juga menegaskan KPK memiliki hak untuk menolak orang-orang yang hendak menemui tahanan. "Seharusnya seperti itu. Kalau tidak ada urgensi yang jelas, (permintaan bertemu dengan M Nazaruddin) akan kami tolak," tegas Busyro.

Anggota tim kuasa hukum Nazaruddin, Afrian Bondjol, mengaku telah mengajukan permohonan resmi ke KPK terkait dengan pemindahan penahanan.

"Itu permintaan klien kami. Dan ini tidak mengada-ada. Kami hukannya meminta Nazaruddin untuk tidak ditahan atau menjadi tahanan kota, kita hanya ingin pindah rumah tahanan," tutur Afrian.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memastikan, tidak ada tekanan terhadap Nazaruddin di Mako Brimob. "Kami juga tidak yakin akan ada yang mencoba memengaruhi Nazaruddin terkait faktor risiko Nazaruddin akan berbicara secara terbuka kepada masyarakat luas," jelas dia.

Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jhonson Panjaitan menilai posisi Nazaruddin telah tersandera. Akibatnya, Nazaruddin akan lebih memilih untuk diam. "Nazaruddin stres karena istrinya tersandera oleh mafia," jelas Jhonson. (Mad/Ant/P-1)

ardi@mediaindonesia.com

22 Agustus 2011

Nazaruddin Amankan Barang Bukti di Singapura

Dalam surat balasan yang dikirim ke Mako Brimob, Presiden meminta Nazar menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada KPK.

Berbalas Surat

Nazaruddin, 18 Agustus

Sepanjang berbicara kebenaran saya tetap pada saya, meski pahit getir saya hadapi.

Saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji memberikan kenyangan lahir dan batin bagi keluarga saya. Khususnya bagi istri dan anak-anak saya.

Saya berjanji tidak akan mencentuskan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK.

SBY, 21 Agustus

Saya sarankan Saudara kooperatif.

Sampaikanlah seluruh informasi yang Saudara ketahui kepada KPK agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak peduli dari unsur mana pun atau dari partai politik apa pun.

Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, komprehen, dan akuntabel—jauh dari proses tawar-menawar atau negosiasi, ataupun bentuk apa pun.

Tim Riset MEDIA INDONESIA/GRAFIS: TYOK

Amahl S Azwar

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah mengamankan semua barang bukti di Singapura terkait keterlibatan sejumlah nama yang ia sebut selama menjadi buron.

Adrian Bondjol, kuasa hukum Nazar, menjelaskan bahwa barang bukti itu berupa dokumen yang terkait dengan kasus-kasus yang pernah diungkapkannya saat masa pelarian. "Pokoknya alat bukti yang ada di Singapura esensial sifatnya," katanya di Jakarta, kemarin.

Nazar sejak Sabtu (13/8) mendekam di sel Mako Brimob setelah terbang selama 38,5 jam dari Kolombia. Dia tertangkap oleh Interpol di Cartagena, salah satu pantai di Karibia, setelah menjadi buron KPK selama 75 hari.

Selama masa pelarian, Nazar lantang menuding sejumlah elite politik tersangkut berbagai kasus. Misalnya, dalam kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games, terlontar nama politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Koster, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga dituding dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Tidak hanya itu, Nazar menyebut uang US$5 juta dan Rp35 miliar yang diangkut dengan mobil boks dipakai untuk memenangkan Anas menjadi ketua umum dalam kongres di Bandung, tahun lalu. Mereka yang dituding Nazar itu sudah membantah.

Surat balasan

Menurut Afrian, seluruh alat bukti yang dimiliki Nazar itu disimpan oleh pengacaranya di Singapura. Dokumen-dokumen itu berbeda dengan yang selama ini dipamerkan Nazar.

Pada saat diwawancarai via jaringan Skype, Kamis (21/7) malam, Nazar memamerkan *flash disk* bermerek Sandisk dan *compact disc*. Akan tetapi, *flash disk* yang disita KPK bermerek Sony. Padahal, di *flash disk* dan *compact disc* itulah Nazar mengklaim punya data seputar aliran dana dan rekaman pertemuannya dengan sejumlah orang yang dituding ikut terlibat.

Afrian menjelaskan, sebetulnya Nazar memiliki empat *flash disk* yang selalu dibawanya saat masih menjadi buron. Saat ditanya mengapa cuma satu yang disita KPK, Afrian mengatakan, "Penyitaan barang bukti itu dari awal sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Nazar punya salinannya."

Ia berharap agar KPK memeriksa semua pihak yang disebut Nazar, tidak perlu menunggu Nazar bersuara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berharap Nazar menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada KPK agar menjadi bernilai di hadapan hukum. "Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak peduli dari unsur mana pun atau dari partai politik apa pun," tulis Presiden dalam suratnya kepada Nazar.

Surat Presiden tertanggal 21 Agustus itu sebagai balasan atas surat Nazar tiga hari sebelumnya. Dalam surat tertanggal 18 Agustus, Nazar mengaku rela dihukum penjara tanpa proses persidangan asalkan SBY memberi ketenangan kepada istri dan anak-anaknya. (Mad/Che/X-3)

amahl@mediaindonesia.com

23 Agustus 2011

Nazaruddin Mengaku Terintimidasi di Tahanan

Psikiater mengatakan, jika dalam seminggu ini Nazar tidak dipindahkan dari Mako Brimob, mentalnya hancur.

Amahl A Azwar

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bungkam saat diperiksa selama 3,5 jam oleh Komite Etik KPK, kemarin. Ia bungkam karena merasa terintimidasi selama mendekam dalam sel di Rutan Mako Brimob.

Tersangka korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang itu datang ke KPK mengenakan kemeja biru sekitar pukul 15.00 WIB tanpa diborgol. Nazar memenuhi panggilan Komite Etik KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran etika pimpinan KPK.

ANTARA/HENDRA NURYATI

M Nazaruddin
Tersangka kas. s korupsi

"Kalau di Komite Etik, saya belum mau jawab sebelum saya dipindah," ujar Nazar kepada wartawan sesaat setelah keluar dari Gedung KPK.

Nazar tetap berkukuh minta dipindahkan dari sel Mako Brimob. Saat diperiksa sebagai tersangka pada 18 Agustus, Nazar juga melancarkan gerakan tutup mulut. "Jangan kembalikan saya ke tempat penahanan di Mako Brimbob," tutur Nazar dalam berita acara pemeriksaan.

Sejauh ini Nazar mengaku terintimidasi. Akan tetapi, Dea Tunggaesti, selaku pengacara Nazar, mengaku belum mengetahui bentuk intimidasi tersebut.

"Nazar tidak mau bilang kepada kita apa bentuk intimidasinya. Dia enggak mau *ngomong*," kilah Dea.

Sumber *Media Indonesia* menyebutkan bahwa Nazar trauma berada di lingkungan kepolisian karena ia mengalami siksaan selama perjalanan 30 jam dari Kolombia menuju Indonesia. Dia tertangkap oleh Interpol di Cartagena, Kolombia, setelah menjadi buron KPK selama 75

Alami siksaan

Menurut sumber itu, Nazar dipukul di bagian tulang rusuk sebelah kanan. Setelah dipukul, Nazar kemudian diberikan obat penenang lalu tidur terlelap. Traumatik itulah yang kini dialami Nazar.

Saat dimintai konfirmasi, OC Kaligis, pengacara Nazar, hanya mengatakan kliennya sejak di Kolombia sudah memohon agar dirinya tidak dianiaya dan kasusnya tidak dipolitisasi.

Juru bicara KPK Johan Budi SP langsung menampik informasi penganiayaan atas Nazar. "Tidak ada (pemukulan). Semua didokumentasikan."

Johan juga tidak tahu-menahu pendapat psikiater bahwa Nazar depresi.

Nazar, menurut Kaligis, sudah diperiksa oleh dokter Handoko yang ditunjuk Rutan Mako Brimob. "Dia dokter Handoko) mengatakan, kalau seminggu tidak dipindah, ini mentalnya hancur sehingga tidak ada gunanya dia diperiksa."

Sebaliknya, Wakil Ketua KPK M Jasin tidak menyetujui permintaan agar Nazar pindah ke Rutan Cipinang atau Tangerang. Rutan Mako Brimob lebih aman jika dibandingkan dengan Rutan Cipinang atau Tangerang.

Boleh saja KPK berkukuh memempatkan Nazar di Mako Brimob, tapi risikonya Nazar tetap bungkam dan Komite Etik tidak mendapatkan informasi terkait dengan tuduhan Nazar.

Nazar pernah menuduh Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah bersama Deputi Penindakan KPK Ade Raharja bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat pengusutan korupsi Wisma Atlet hanya sampai kepada Nazar sebagai tersangka. (*/X-3)

23 Agsts 2011

Nama Angelina kembali Disebut

Dugaan Keterlibatan Angelina Sondakh

Nazaruddin, Manteri Kemenpora Andi Mallarangeng

● Menerima aliran dana Wisma Atlet.

8 Agustus

Marzuki Alie dan Anas Urbaningrum

● Mengakui ikut pertemuan dengan Nazaruddin dan Angelina Sondakh di ruangan Menpora Andi Mallarangeng.

10 Agustus

Rosalina Manulang, Yulianis

Direktur Keuangan PT Permai Group

● Mindo Rosalina Manulang sering mengajukan pencairan uang untuk dua anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh dan Wayan Koster.

22 Agustus

Rosalina Manulang

Direktur Marketing PT Anak Negeri

● **Angelina Sondakh minta uang**
"Pak Nazar pernah bilang, Rosa coba kau kontak si artis. Kayaknya dia butuh uang"

● Mengakui isi transkrip Blackberry Messenger antara dirinya dan Angelina Sondah
"Aku diminta Ketua Besar, lagi *kepengin* apel malang."
'Apel malang' berarti rupiah dan 'apel washington' berarti dolar.

Sumber: Tim Riset MKPDD, berbagai sumber/ TEMPO

Penyebutan nama politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet sudah yang kesekian kalinya.

KRISTANTYO WISNUBROTO

FAKTA bahwa anggota Komisi IX DPR RI Angelina Sondakh sempat meminta sejumlah uang kepada pemilik PT Permai Grup M Nazaruddin terkuak dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang menuturkan hal itu dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Dia menyebutkan bahwa dirinya pernah diperintah atasannya, M Nazaruddin, untuk menanyakan soal permintaan uang yang disampaikan politikus Demokrat Angelina Sondakh.

"Pak Nazar pernah bilang, 'Ros coba kau kontak si artis. Kayaknya, dia butuh uang!'," paparnya.

Berkiak dari perintah atasannya itu, Rosa mengaku kemudian menanyakan langsung soal uang itu kepada yang bersangkutan. Dalam persidangan itu, semula Rosa memang tampak enggan menjelaskan tentang sosok orang yang dijuluki 'si artis' oleh Nazar. Tapi akhirnya, dia mengaku bahwa yang dimaksud itu adalah Angelina Sondakh.

Rosa mengungkapkan (ke Nazaruddin) iya, katanya dia (Angelina Sondakh) minta uang. Yang minta uang Angelina," tandasnya.

Hanya saja, saat jaksa Hendarbeni Sayekti menanyakan urgensi permintaan tersebut, Rosa tidak menjelaskannya lebih lanjut. Pada kesempatan itu, Rosa juga membantah dirinya pernah mengajukan permintaan sejumlah uang melalui Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup Yulianis untuk Sesekempora Wafid Muharam maupun pihak DPR.

Pengakuan lain Rosa dalam persidangan itu adalah soal penggunaan istilah 'apel malang' dan "apel washington' ketika melakukan pembicaraan dengan Angelina melalui layanan Blackberry Massanger.

Dalam persidangan Rosa beberapa waktu lalu, Yulianis sempat mengungkapkan bahwa dua politikus Senayan, Angelina Sondakh dan I Wayan Koster, adalah orang-orang kerap berhubungan dengan Rosa. Dia bersaksi Rosa kerap mengajukan permohonan uang dari kas PT Permai Grup untuk diberikan kepada dua politikus Senayan itu terkait proyek Wisma Atlet.

Idris sakit

Sementara itu, persidangan kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet dengan terdakwa Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris terpaksa ditunda. Pasalnya di awal persidangan, El Idris mengaku kurang enak badan sehingga tidak dapat mengikuti sidang yang sedianya akan berlangsung kemarin pagi. "(Saya) Tidak sehat. Tadi buang-buang air. Kalau boleh, ditunda, Pak," kata El Idris.

Ketua Majelis Hakim Suwidya sempat membujuk El Idris untuk tetap mengikuti sidang. Sebab, kata Suwidya, penundaan akan menimbulkan konsekuensi. Yakni, sambung dia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum harus menyiapkan tuntutan dan pembelaan.

Hakim juga sempat menduga keluhan kesehatan El Idris itu muncul akibat adanya tekanan psikis menjelang pemeriksaan sebagai terdakwa. Namun, El Idris nyatanya tetap berkukuh. "Nanti jawabannya ngawur terus, Pak."

Akhirnya majelis hakim pun memutuskan melanjutkan persidangan hari ini, Selasa, (23/8) pukul 09.00 WIB.

Kasus Wisma Atlet bermula saat El Idris tertangkap tangan bersama Sesekempora Wafid Muharam dan mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang pada April lalu. (F-3)

kristantyo@mediaindonesia.com

24 Agustus 2011

Komite Etik Sebut Nazar Mengarang

Nazaruddin mengklaim pernah didatangi orang bersenjata di kamar selnya pada malam hari.

AMAHL S. AZWAR

TERSANGKA kasus suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin memilih bungkam di hadapan Komite Etik KPK. Sebelum permintaan pindah dari sel Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, diloloskan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu akan tetap bungkam.

M/SUJANTO

> **"Berarti ketahuan kalau Nazar bohong. Apa dia tidak tahu kalau KPK punya CCTV?"**
>
> **Abdullah Hehamahua**
> Ketua Komite Etik KPK

Namun, Komite Etik KPK tidak percaya begitu saja atas permintaan anggota Komisi VII DPR tersebut. "Dia berhak diam. Kami tidak bisa memaksa. Kita belum percaya juga apakah kalau dipindahkan lantas Nazaruddin mau ngomong," kata anggota Komite Etik Syafii Maarif di Gedung KPK, kemarin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menegaskan perpindahan seorang tersangka dari rumah tahanan tidak semudah membalik telapak tangan. Menurut dia, pihak rutan lain seperti di Salemba ataupun Cipinang mesti dilibatkan.

Sejauh ini Nazar mengaku teritimidasi, termasuk saat berada di sel Mako Brimob. Salah satu anggota kuasa hukum Nazaruddin, Dea Tunggaesti, mengaku belum mengetahui bentuk intimidasi itu. "Nazar tidak mau bilang kepada kita."

Sumber *Media Indonesia* menyebutkan Nazar trauma karena pernah dipukul di bagian tulang rusuk sebelah kanan saat perjalanan pulang dari Bogota menuju Jakarta. Setelah itu, Nazar diberi obat penenang dan tidur terlelap.

Kuasa hukum Nazaruddin dari firma OC Kaligis & Associates pun lantas mengirim surat resmi kepada komite perlindungan HAM anggota parlemen dunia, The Joint Committee on Human Rights.

Salah satu kuasa hukum Nazar, Afrian Bondjol, mengatakan dugaan pelanggaran HAM terhadap kliennya mulai terasa sejak penjemputan. "Kita berkirim surat supaya dipantau," tutur Afrian, kemarin.

Orang bersenjata

Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua juga mendengar cerita dari sumber lain yang menyebutkan Nazar mengklaim pernah didatangi orang bersenjata di kamar selnya pada malam hari. Komite etik lantas mempertanyakan kejujuran Nazaruddin mengingat aksi itu tidak terekam di dalam CCTV sel.

"Berarti ketahuan kalau dia bohong. Apa dia tidak tahu kalau KPK punya CCTV?" papar Abdullah, kemarin.

Komite etik juga sempat menanyakan kepada Nazar soal intimidasi lainnya. Atas pertanyaan itu, Nazar mengatakan anggota Komite Etik KPK Bibit Samad Rianto yang pernah berkarier di kepolisian pasti mengerti bentuk intimidasi apa yang dia dapat.

"Pak Bibit kan polisi. Pasti tahulah maksud saya," tutur Abdullah. Hehamahua menirukan kesaksian Nazaruddin.

Saat menanggapi klaim dari pengacara OC Kaligis bahwa Nazaruddin mesti dipindah dalam satu minggu supaya tidak mengalami depresi, Abdullah mengatakan Nazar bisa mengontrol emosinya.

Abdullah juga menegaskan tidak ada jaminan Nazaruddin tidak kembali mengarang cerita baru jika dipindahkan dari Mako Brimob. Komite etik juga tidak akan melakukan tes uji kebohongan menggunakan *lie detector* karena Nazaruddin akan mampu mengelabui *lie detector*. (X-7)

amahl@mediaindonesia.com

24 Agustus 2011

SBY Sangsikan Pengurus PD

Tim pencitraan akan menangani sejumlah kader Partai Demokrat yang terlilit kasus.

Aryo Bhawono

KEPERCAYAAN Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah kian tergerus melihat kinerja DPP PD. Dengan begitu, SBY sampai membentuk tim tersendiri untuk memperbaiki citra partai.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, kemarin, menilai perintah membentuk tim pencitraan memperlihatkan SBY telah memasuki wilayah teknis kebijakan partai.

"Sebetulnya SBY mengarah jauh dari kapasitas sebagai ketua dewan pembina. Hal semacam itu kan seharusnya masuk kebijakan rutin DPP," ujarnya.

Qodari menilai SBY menganggap pengurus partai telah gagal dalam memberikan dukungan pencitraan terhadap dirinya selaku Presiden. Bahkan, tampilnya kader Partai Demokrat di depan publik justru memunculkan polemik bagi partai.

Dia memperkirakan, ada dua tugas utama yang harus ditangani tim pencitraan, yakni banyak kader Partai Demokrat yang terlibat masalah, seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati.

Persoalan kedua adalah DPP Partai Demokrat dianggap tidak mampu mengelola pencitraan partai. "Tim inilah yang lalu tampil menjadi *damage control* (pengontrol kerusakan). Seperti dalam kasus Nazaruddin, mereka yang akan menata komunikasi dengan publik," imbuhnya.

Anak muda

Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan pembentukan tim tersebut tidak bermaksud menciptakan faksi di internal Partai Demokrat.

Tim tersebut, lanjut Ramadhan, dibentuk karena situasi yang mengharuskan pengembalian citra dan nama baik Demokrat. "Pak SBY sudah tekankan semua kader harus solid. Tim dibentuk untuk pencitraan," ujarnya.

Dia mengatakan, tim pencitraan itu bakal didominasi aktivis dan anak muda internal partai. "Rencananya terdiri dari anak-anak muda. Tapi nama-nama belum ditentukan," ujarnya.

Ramadhan melanjutkan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat pada 25-26 Juli menyepakati pembentukan tim komunikasi yang terdiri dari lima orang.

Namun, untuk mempercepat pengembalian citra Demokrat, sambung Ramadhan, SBY menginstruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 30 kader yang punya kemampuan komunikasi. (*/P-1)

bhawono@mediaindonesia.com

26 Agustus 2011

Nazaruddin Tuding Pimpinan KPK Takut

Unsur pimpinan KPK merasa khawatir Nazaruddin akan membeberkan banyak hal.

Amahl S Azwar

KENDATI tetap memilih untuk bersikap bungkam saat diperiksa penyidik, tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet, M Nazaruddin, nyatanya belum berhenti melancarkan serangan ke KPK.

Kemarin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu melontarkan pernyataannya terkait sikap KPK atas permintaan pemindahan penahanan atas dirinya. Nazaruddin yang tetap bersikukuh meminta dipindah dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, itu menuding KPK tengah dilanda ketakutan.

> **"Polri memperlakukan tahanan KPK itu dengan manusiawi. Tidak ada penekanan-penekanan. Apalagi zaman sekarang. Tidak ada yang menekan."**
>
> **Anton Bachrul Alam**
> Kepala Divisi Humas Polri

"Menurut saya, pimpinan KPK sengaja tidak mau memindahkan saya dari Rutan Mako Brimob ke Cipinang karena takut saya kembali ke kondisi normal dan tidak bisa diintimidasi," ujar Nazaruddin seperti ditirukan oleh Afrian Bondjol, kuasa hukumnya, kemarin.

Ketakutan itu, menurut Nazaruddin, antara lain karena unsur pimpinan KPK khawatir dirinya akan membeberkan banyak hal. Khususnya, sambung dia, yang terkait dengan aktivitas pimpinan KPK dan pejabat lainnya.

Dalam masa pelarianmya di luar negeri, sebelum akhirnya tertangkap pada 7 Agustus 2011, Nazaruddin sempat menyebutnyebut sejumlah nama petinggi di KPK. Menurut dia, para petinggi tersebut pernah menemui dirinya di sebuah kesempatan di luar Gedung KPK.

Nama-nama yang disebut itu, di antaranya Ketua KPK Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja. Nama Busyro disebut Nazaruddin melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis. Nazaruddin menyoal alasan Busyro yang kini berpura-pura tidak mengenal dirinya. Padahal, menurut Nazaruddin, Busyro pernah bertemu dengannya sekitar satu tahun lalu.

Pertemuan itu, menurut Nazaruddin, tepatnya dilakukan pada masa pemilihan calon pemimpin KPK. Pertemuan menjelang tahap *fit and proper test* di DPR itu dilaksanakan di sebuah tempat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tujuannya, ditirukan Kaligis, untuk mendapat dukungan dari Demokrat. Nyanyian Nazaruddin itu memperkuat pernyataan Wakil Ketua KPK M Jasin pada 26 Juli, yang menyebut, Busyro pernah bertemu dengan Nazaruddin.

Soal Chandra, Nazaruddin memberberkan bahwa pada November 2010 Chandra datang ke rumahnya dan menerima uang terkait kasus proyek baju hansip. Chandra pun mengakui pernah bertemu Nazaruddin. Namun, menurut Chandra, pertemuan itu berlangsung sebelum Pemilu 2009.

Chandra juga menyebut, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum-lah yang mengenalkannya dengan Nazaruddin. Chandra M Hamzah ialah salah satu dari lima pemimpin KPK periode 2007-2011 yang dilantik pada 18 Desember 2007 di Istana Negara.

Nama Ade Raharja juga disebut Nazaruddin sebagai orang yang pernah menemui dirinya. Ade pun mengakui pertemuannya dengan Nazaruddin. Menurut jenderal polisi bintang dua itu, pertemuan dengan Nazaruddin yang berlangsung di sebuah rumah makan di kawasan Casablanca, Jaksel.

Pertemuan pertama, menurut Ade, terjadi pada Januari 2010, sedangkan pertemuan kedua berlangsung pada November 2010. Ketika itu, Nazaruddin disebut sempat menyinggung penyelidikan kasus solar *home system*.

Terkait permintaan pemindahan penahanan dengan alasan adanya tekanan terhadap Nazaruddin, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam pun memberi jaminan khusus, bahwa tak ada tekanan di Rutan Brimob. "Polri memperlakukan tahanan KPK itu dengan manusiawi. Tidak ada penekanan-penekanan. Apalagi zaman sekarang. Tidak ada yang menekan," ujarnya. (Bob/*P-3)

amahl@mediaindonesia.com

27 Agustus 2011

Menpora Akui Bertemu Nazar

KPK harus gigih mencari kiat agar Nazaruddin buka mulut untuk membeberkan kasus korupsi APBN.

Irvan Sihombing

MENTERI Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengakui pernah bertemu dengan tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games, Palembang, Muhammad Nazaruddin, di ruang kerjanya di lantai 10 Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Pertemuan itu berlangsung sekitar Februari-Maret 2010.

Informasi mengenai pertemuan tersebut sempat diungkapkan salah seorang terdakwa kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Palembang, Wafid Muharram, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seskemenpora Wafid Muharram mengakui Nazaruddin pernah bertemu ke kantor Kemenpora. Namun pertemuan itu terjadi di ruang kerja Andi Mallarangeng di lantai 10 Kantor Kemenpora. Ikut hadir dalam pertemuan itu anggota Badan Anggaran DPR Angelina Sondakh dan Ketua Komisi X DPR Mahyudin. Semua peserta pertemuan itu berasal dari Partai Demokrat. "Saat itu, saya dipanggil Menpora Andi Mallarangeng dan diperkenalkan kepada mereka."

Andi yang ditemui di Jakarta, kemarin, membenarkan hal tersebut. Namun, ia buru-buru berkilah pertemuan tersebut hanya silaturahim. "Saya (rasa) enggak ada yang luar biasa, cuma silaturahim. Cuma hal-hal yang umum. Yang jelas tidak ada bicara soal proyek. Kalau itu, semua harus sesuai prosedur," ucapnya.

Namun, Andi yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengaku tidak pernah menginstruksikan apa pun kepada Wafid. Padahal, Wafid menyebutkan Menpora menginstruksikan sesuatu kepadanya.

Ketika dimintai konfirmasi soal pernyataan Wafid bahwa Menpora yang mengenalkan Angelina dan Mahyudin, Andi membantah. "Oh, tidak ada itu. Tidak ada."

Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan, terdakwa kasus suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang kembali diperiksa. Penyidik mencecar sejumlah pertanyaan terkait hubungan dirinya dengan Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Komisi X DPR, dan Badan Anggaran DPR.

Soal Blackberry

Pengacara OC Kaligis tidak mempermasalahkan perihal temuan Blackberry di sel kliennya, Muhammad Nazaruddin di Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Dulu (Aulia) Pohan pakai, Nurdin (Halid) pakai, tidak ada masalah. Dia (Nazaruddin) ini memang sedang dikekang," ujar Kaligis, kemarin.

Kaligis mengaku sepengetahuannya Nazaruddin hanya memiliki satu tablet *iPad* yang dipergunakan untuk mengikuti pemberitaan di media massa.

Menyoal hal itu, Mabes Polri sedang memeriksa asal muasal telpon seluler Blackberry milik Nazaruddin. Menurut Kabareskrim Komjen Sutarman, BlackBerry yang ditemukan itu hasil razia kepala tahanan di Mako Brimob. "Sekitar empat hari lalu," jelasnya. (SZ/San/Bob/*/P-2)

irvan@mediandonesia.com

1 Februari 2012

Anas Konsolidasi

Ada 'rayap' dari luar partai dan 'parasit' dari dalam partai yang dituding membuat kisruh Demokrat.

MUHAMMADIYAH PUTRAM

BERPOSE: Anas Urbaningrum (kiri) berpose bersama Edhie Baskoro Yudhoyono di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, kemarin.

AKHMAD MUSTAIN

ANAS Urbaningrum mencoba keluar dari tekanan. Ketua Umum Partai Demokrat itu, kemarin, mengumpulkan seluruh jajaran pengurus dewan pimpinan pusat partai untuk melakukan rapat konsolidasi.

Dalam pidato rapat konsolidasi itu Anas memberikan 10 arahan. Salah satunya ia meminta agar seluruh kader Demokrat tidak berpolitik ke dalam seperti pesan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi berpolitik ke luar.

"Adu domba ada dan akan tetap ada. Dalam bentuk sederhana berupa pancingan pernyataan antarkader yang digiring ke titik asimetris tertentu," kata Anas.

Ia membantah rapat tersebut terkait dengan penyikapan atas munculnya desakan agar dirinya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. "Ini rapat rutin. Desakan-desakan mundur tersebut hanyalah rumor," ujar Anas ketika tiba di Kantor DPP Partai Demokrat, kemarin.

Namun, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Benny Harman mengatakan rapat itu bukan cuma untuk konsolidasi. Rapat juga membahas 'rayap' dari luar partai dan 'parasit' dari dalam partai yang ia duga menjadi penyebab kekisruhan di Demokrat.

"Ada pihak tertentu di luar partai yang tidak menghendaki Demokrat tumbuh jadi partai yang makin kuat dan solid," ujarnya sesaat sebelum mengikuti rapat.

Sejauh ini, Anas disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin serta dua saksi lain, Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis, terlibat kasus korupsi Wisma Atlet. Namun, Anas membantah keterlibatan tersebut.

Terkait dengan itulah, Dewan Pembina Demokrat menggelar rapat yang digagas Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng pada 23 Januari dan dipimpin Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie. Keputusannya ialah menyiapkan empat nama pengganti Anas. Sejumlah nama yang santer disebut ialah Gubernur Jatim Soekarwo, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Marzuki Alie, dan Andi Mallarangeng.

"Saya kalau diperintah Ketua Dewan Pembina enggak bisa menolak. Tapi kalau ditawari, menolak," ujar Soekarwo di Surabaya, kemarin. Adapun Djoko Suyanto hanya menjawab, "*No way*." (*/FLX-7)

mustain
@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 3

Kekuatan Anas dalam Kongres 2010

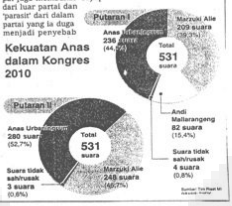

Sumber: Tim Pasar M/ Aksaran Tinaliya

1 Februari 2012

Demokrat Digerogoti Rayap dan Parasit

Kalau Anas Urbaningrum diindikasikan terlibat dan dijadikan tersangka, Partai Demokrat juga tidak akan menggelar KLB karena secara teknis KLB harus diusulkan 2/3 dari jumlah total DPD.

Arvo Bhawono

DPP Partai Demokrat saat ini sedang mengidentifikasi kader-kader Partai Demokrat yang sedang menggerogoti dan mencoba menghancurkan partai dari dalam ibarat rayap dan parasit.

Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman merasakan penggerogotan terhadap kepemimpinan Anas Urbaningrum di Partai Demokrat. Penggerogotan itu juga dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

"Kita identifikasi dulu rayap-rayap itu termasuk yang di internal," ujarnya ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Benny memaparkan, rayap dan parasit politik itu berasal dari internal maupun kiriman dari luar partai. Mereka tidak menginginkan Partai Demokrat tumbuh menjadi kuat pada 2014.

Padahal, tambahnya, pada 2014 seharusnya sudah memasuki tahapan politik transisional. Yaitu, saat yang tepat untuk kemunculan tokoh baru yang lebih muda dan segar dalam kepemimpinan bangsa Indonesia. Kekuatan rayap dan parasit di internal yang menggerogoti inilah yang tidak ingin melihat tokoh baru muncul di Partai Demokrat.

Benny mengakui bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kini tengah terjerat dengan isu dugaan suap Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun, Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk menunggu proses hukum.

"Kami tidak akan mendahului proses hukum, kami hargai proses hukum, kami serahkan sepenuhnya pada proses hukum sebagai rujukan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi partai," ungkapnya.

Ketua Komisi III DPR tersebut mencontohkan sikap partai atas serangan politik yang menerpa Partai Demokrat ibarat cerita janda dan bulan purnama.

"Suatu ketika, seorang janda dengan anjingnya keluar rumah malam-malam ketika bulan purnama muncul. Setiap bulan purnama muncul, anjingnya selalu menggonggong. Bulan purnama tadi semakin bersinar cahayanya, bulan purnama tidak pernah meredup meskipun anjing terus menggonggong tiap malam," tuturnya.

Diberantas

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana memperingatkan rayap dan parasit politik di internal partainya harus diberantas. Rayap sangat merugikan karena membuat keropos.

"Rayap bikin keropos. Ikan koi kalau memberi makannya tepat, tidak jadi masalah. Tapi kalau rayap, bisa membuat keropos itu. Rayap itu harus disemprot sampai meninggal," tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah kabar bahwa Partai Demokrat merencana menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menggusur Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum.

Menurut Mubarok, rapat DPP Partai Demokrat (PD) di Kemayoran maupun Cikeas tidak pernah membahas rencana KLB.

"Kalaupun Anas diindikasikan terlibat dan dijadikan tersangka, PD juga tidak akan menggelar KLB karena secara teknis KLB harus diusulkan 2/3 DPD," tegasnya. (*/Ant/P-4)

bhawono
@mediaindonesia.com

2 Februari 2012

Nasib Demokrat Terancam Nila Setitik

Semua kader harus berupaya untuk membesarkan partai dengan bekerja sesuai kewenangan masing-masing. Energi sebaiknya ditumpahkan untuk kepentingan rakyat.

Hafizd Mukti

GESEKAN politik di internal Partai Demokrat (PD), partai pemenang Pemilu 2009 yang kelahirannya dibidani oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kini Presiden RI, masih terasa panas.

Pernyataan bernada saling serang antarkubu di partai itu masih kental mewarnai pemberitaan media massa. Ada dua kubu yang tampak bersitegang, yakni kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kendali Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan kubu yang hendak melengserkan Anas.

Pada Selasa (31/2), Anas mengumpulkan pengurus harian DPP di markas PD di Kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Pertemuan itu disebut-sebut sebagai ajang konsolidasi bagi kubu Anas guna meng-*counter* serangan politik di internal partai yang lahir 9 September 2002 itu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PD Ruhut Sitompul mengakui ada perbedaan pendapat di dalam tubuh partai itu terkait posisi Anas. Menurutnya, ada kelompok yang ingin Anas segera dinonaktifkan dan ada juga kelompok yang ingin Anas tetap menjabat ketua umum sampai status hukumnya jelas.

"Ada yang mendukung dan ada juga yang minta segera nonaktif. Aku sih melihatnya ada kelompok yang sudah lama membangun partai ini bersama Pak SBY dan tidak ingin partai jatuh karena nila setitik. Tapi itulah demokrasi, orang bebas berpendapat," kata Ruhut di Jakarta, kemarin.

> "Pada prinsipnya sangat sederhana, elemen PD harus bekerja sesuai kewenangan dan tugas masing-masing."
>
> **Anas Urbaningrum**
> Ketua Umum Partai Demokrat

Ruhut juga meminta Anas agar segera menanggapi tudingan-tudingan dari Nazaruddin. "Jangan diam. Kasihan sama dia (Anas) nanti kena sanksi sosial. Lawan dong Nazar," paparnya.

Tidak terganggu

Anas mengaku tidak terganggu oleh rumor politik yang menginginkan dirinya turun dari jabatan ketua umum.

"DPP tidak akan terganggu rumor politik yang ada. Rapat kemarin merupakan penegasan komitmen 2012 untuk semakin tancap gas dalam menjalankan program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden SBY," jelas Anas melalui pesan elektronik yang diterima *Media Indonesia*, kemarin

Selanjutnya, Anas mengimbau agar tidak hanya DPP yang menjalankan komitmen partai, tetapi seluruh divisi dan departemen, termasuk Fraksi PD di DPR perlu memacu peningkatan kinerja masing-masing.

"Selain itu, konsolidasi partai sampai tingkat bawah menjadi target lain di 2012 ini," kata Anas mengingatkan.

Saat ditanya soal dualisme pendapat di tubuh PD mengenai posisinya sebagai ketua umum, khususnya antara DPP dan DP, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menjawab, "Pada prinsipnya sangat sederhana, elemen PD harus bekerja sesuai kewenangan dan tugas masing-masing."

Dalam kaitan itu, Anas mengharapkan agar seluruh kader PD mengedepankan persatuan dan kerja keras. "Kerja keras, kerja keras, dan kerja keras adalah pilihan yang paling tepat dan bertanggung jawab. Saya yakin bisa, karena kader-kader PD sehat, dewasa, dan waras," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan (PPSK) DPP PD Khatibul Umam Wiranu meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah dengan tidak memosisikan Anas sebagai pihak yang bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

"Kita tidak bisa memosisikan dirinya (Anas) sebagai yang bersalah sebelum pengadilan menyatakan hal itu," ujar Umam. (Ant/P-3)

hafizd@mediaindonesia.com

3 Februari 2012

Internal Demokrat Desak Anas Mundur

Ketua KPK Abraham Samad akan mengungkap perkembangan menarik kasus Wisma Atlet pada hari ini.

FAI DIANSAH NOOR

KETUA Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mulai ditinggalkan orang dekatnya. Ruhut Sitompul yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas justru mendesaknya mundur dari jabatan ketua umum.

Desakan agar Anas mundur dikumandangkan Ruhut di Jakarta, kemarin. Ruhut yang kini menjabat Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat adalah juru bicara tim sukses Anas pada Kongres Partai Demokrat 2010.

Ruhut bersuara lantang hanya dua hari setelah kubu Anas mengklaim Demokrat solid. Klaim itu disampaikan setelah Anas memimpin rapat konsolidasi dewan pimpinan pusat partai pada 31 januari.

Menurut Ruhut, Anas didesak mundur dari menyelamatkan partai dari dampak serangan terkait tengah kasus korupsi yang didakwakan kepada Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. "Anas negarawan dan mundur sementara. Saya minta dia fokus pada kasus ini," tukas Ruhut.

Bukan hanya Nazaruddin yang menyebut Anas terlibat kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet dan Hambalang. Dua saksi kunci, Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang, juga tanpa sungkan menyebut keterlibatan Anas.

Seruan hati

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai desakan Ruhut agar Anas mundur sebagai seruan hati. Ia mengakui suara seperti itu tak hanya didengungkan di Jakarta, tapi juga dari daerah-daerah.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto menilai penonaktifan Anas akan membuat kredibilitas partai tetap terjaga. "Dari hasil sejumlah survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Demokrat mulai menurun belakangan ini," tukasnya.

Elektabilitas partai berkuasa itu kian anjlok. Hanya dalam tempo delapan bulan melorot tajam hingga 7%. Pada Juni 2011, elektabilitas Demokrat bertengger di posisi 21%, kini tinggal 14%.

Dani mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak. Jika bukti keterlibatan Anas kuat, Dani minta KPK jangan melakukan pembiaran.

Ketua KPK Abraham Samad hanya berjanji bakal ada perkembangan menarik soal kasus tersebut. Dia akan mengungkapkan perkembangan menarik itu dalam jumpa pers pada hari ini.

Janji Abraham itu disampaikan kepada Laskar Anti Korupsi Pejuang '45 yang kemarin berdemonstrasi menuntut Anas dijadikan tersangka. Laskar itu juga berunjuk rasa di kediaman Anas di kawasan Jakarta Timur. (*/X-3)

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui email: interng@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com Facebook: Hari Umum Media Indonesia Twitter: @MiNotcom

Anas Nyaring Disebut

fardiansah
(@mediaindonesia.com

3 Februari 2012

Abraham Samad Janjikan Kejutan

Ketua KPK diharapkan tidak gentar menghadapi upaya menentang penetapan tersangka baru.

Fardi asan Noor

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berjanji akan menetapkan tersangka baru kasus Wisma Atlet dalam waktu dekat.

Janji Abraham itu diungkapkan oleh politikus Partai Gerindra Permadi setelah bertemu Abraham di Gedung KPK di Jakarta, kemarin. Pertemuan tertutup itu juga diikuti oleh Laskar Anti Korupsi Pejuang '45.

"Dia bicara serius. Saya lihat ekspresinya sangat serius bilang akan ditetapkan tersangka baru," ujar Permadi.

Permadi juga mengungkapkan, Abraham tidak perlu takut berhadapan dengan arus kuat yang menentang agar tidak ada penetapan tersangka baru, termasuk penolakan dari pimpinan KPK lain. "Sejarah akan buktikan siapa yang menjadi pengkhianat dan siapa yang menjadi pejuang," ujar Permadi menirukan ucapan Abraham.

Dalam pertemuan tertutup itu, lanjut Permadi, Abraham mengakui ada perbedaan pendapat terkait penentuan tersangka baru dalam kasus itu.

Namun, lanjut Permadi, Abraham bersikukuh untuk bersikap karena itu harus ditentukan. Selain itu, ia juga meminta Abraham untuk tegar dan kuat menghadapi tantangan internal KPK.

Bahkan, Permadi [illegible] aku meminta Abraham untuk tak jujur mengatakan ke publik siapa pimpinan KPK yang menolak menetapkan tersangka baru.

Selain bertemu Abraham, rombongan Laskar Anti Korupsi Pejuang '45 juga berdemonstrasi di depan Kantor KPK. Mereka meminta KPK segera menetapkan sejumlah petinggi Partai Demokrat dijadikan sebagai tersangka. Mereka menyebut petinggi Partai Demokrat yang dimaksud ialah Ketua Umum Anas Urbaningrum, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, dan Wakil Sekjen Angelina Sondakh.

Enggak seru

Di kesempatan berbeda, Abraham Samad dengan didampingi ajudannya secara tidak terjadwal mendatangi press room (ruang wartawan) KPK. Dia menyebut KPK akan membuat kejutan. "Lihat saja besok. Kalau diberitahukan enggak serulah," kata Abraham.

Saat ditanya, apakah terkait tersangka baru di kasus Wisma Atlet, Abraham menolak menyebut. "Kalau saya sebutkan sekarang, nanti tidak surprise lagi," kata Abraham lagi.

Hingga saat ini sudah dua saksi yang menyebut nama Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus pemilik Grup Permai.

Kesaksian [illegible] lina Marliani [illegible] Permai [illegible] salah satu anak perusahaan Grup Permai, [illegible] jutaan [illegible] untuk Anas.

Begitu juga kesaksian Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, pada 25 Januari. Ia mengatakan ada catatan [illegible] Anas sebesar [illegible] 100 juta [illegible] sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010. Selain ke Anas, ada juga aliran uang ke calon ketua umum lainnya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng sebesar Rp150 juta. Data itu berbagai kesempatan, politikus Partai Demokrat [illegible] menepis [illegible].

"Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Pejuang '45 Abdul Muskin Alatas mengatakan KPK harus segera menetapkan tersangka baru terhadap para petinggi Partai Demokrat yang disebut terdakwa dalam kasus Wisma Atlet M Nazaruddin. (*/I-1)

farid.noor@mediaindonesia.com

6 Februari 2012

SBY Risau, Anas Asyik Berkicau

Angelina Sondakh dipecat dari jabatan wakil sekjen terhitung sejak Sabtu (4/2).

AHMAD MUSTAIN

PADA saat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) risau karena popularitas partainya terus menurun, Ketua Umum Partai Demokrat *Anas Urbaningrum* malah asyik berkicau.

Kerisauan SBY tebersit dalam konferensi pers seusai bertemu sejumlah pendiri dan deklarator Partai Demokrat di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, kemarin. Pertemuan selama 1 jam yang dimulai pukul 15.00 WIB itu membahas korupsi yang membelit kader. Hadir antara lain Venije Rumangkang dan Sutan Bhatoegana.

SBY mengatakan Anas telah memberikan bantahan bahwa dirinya terlibat dalam dugaan kasus suap dan politik uang. "Saya pegang teguh pernyataan dan kata-kata itu, kecuali KPK berkata lain."

Vitamin pahit

Nama Anas disebut-sebut terkait dengan korupsi Wisma Atlet yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat.

Selain Anas, nama lain yang disebut ialah Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh, Menpora Andi Mallarangeng, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Mirwan Amir, dan anggota Fraksi PDIP DPR I Wayan Koster.

Sejauh ini KPK baru menetapkan Angelina sebagai tersangka dan mengenakan status cekal Wayan Koster.

Anas tidak hadir dalam pertemuan di kediaman SBY karena kemarin ia berkunjung ke Keluarga Besar Pelajar Islam (PII) Yogyakarta atas undangan Soetrisno Bachir, mantan Ketua Umum PAN. Pada saat SBY menggelar konferensi pers, Anas malah asyik berkicau.

Salah satunya ialah membalas *tweet* seorang *follower*-nya bernama Andini Aziz. *Follower* itu yakin Anas tidak bersalah. *@AndiniAziz69*, fitnah dan serangan adalah vitamin pahit untuk jaga kesehatan. Salam berkah akhir pekan', tulis Anas pada akun *@anasurbaningrum*.

Pada saat Anas bebas melenggang, Dewan Kehormatan Partai Demokrat memecat Angelina Sondakh dari jabatan wakil sekjen terhitung sejak Sabtu (4/2) malam. (Yol/AU/*/X-3)

Tren Suara Tiga Partai Besar (%)

Hasil Jajak Pendapat Lingkaran Survei Indonesia

Hasil Jajak Pendapat Lembaga Survei Indonesia

SBY menyadari kasus korupsi yang membelit sejumlah elite Demokrat telah menyebabkan popularitas partai itu merosot. Realitas itu, kata SBY, tak bisa diingkari.

Dua lembaga survei menyebut popularitas Demokrat saat ini merosot tajam. Hanya dalam tempo delapan bulan hingga Januari, menurut Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Demokrat melorot 7% sehingga tinggal 14%. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia juga menyebutkan elektabilitas Demokrat saat ini cuma 13,7% (lihat grafik).

Popularitas Demokrat yang terus merosot itulah yang mendorong internal partai mendesak Anas mundur dari jabatan ketua umum. Usulan itu ditolak SBY. Walau enggan menonaktifkan Anas, SBY berharap ketua umum dan jajaran partai lainnya tidak pasif, tidak tiarap.

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com
Facebook: Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom

mustain
@mediaindonesia.com

6 Februari 2012

SBY Akui Demokrat Terpuruk

Kader yang merusak citra partai, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang ada di fraksi DPR RI akan dikenai sanksi.

Akhmad Mustain

KETUA Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa dirinya diminta untuk membersihkan kader-kader yang merusak nama baik partai, termasuk yang ada di DPR.

"Diharapkan para kader, pembersihan kepada para kader yang merusak nama baik partai, di mana pun, termasuk yang ada di fraksi DPR RI bisa dijalankan," kata Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Ia juga menegaskan Demokrat saat ini dalam kondisi terpuruk akibat perilaku beberapa kadernya yang dituding melakukan korupsi, yang tidak sejalan dengan kebijakan partai.

"Perlu ada solusi atas masalah yang dihadapi oleh partai atas ulah sekelompok kader," ujar SBY.

Ia mengatakan, perilaku melanggar hukum sejumlah kader telah merusak nama baik partai. "Nila setitik rusak susu sebelanga. Untuk itu, PD akan memberikan sanksi moral dan sanksi disiplin serta sanksi akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kader. Saya masih mendegar kader yang melakukan perbuatan tidak terpuji di daerah. Akan saya lakukan penindakan, meski tidak masuk ranah hukum kepolisian atau KPK."

Terhadap kader PD yang akhir-akhir ini disebut KPK, katanya, hal terbaik yang dilakukan sekarang adalah menghormati dan menunggu putusan dari KPK. Karena, itu adalah proses hukum yang sah dan adil.

Kemudian, ujarnya, proses hukumlah yang menentukan apakah seseorang itu salah atau tidak. "Karena sekarang proses hukum sedang berjalan, kita tunggu, apa nanti hasilnya," tuturnya.

Dipecat

Di sisi lain, Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberhentikan Angelina Sondakh dari jabatannya sebagai Wakil Sekjen (Wasekjen) DPP Partai Demokrat. Angie dinilai telah melanggar etika partai.

"Surat pemberhentiannya sudah ditandatangani kemarin (Sabtu) malam," ujar anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan surat pemberhentian itu telah diserahkan kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, dan selanjutnya akan melakukan tindak lanjut pemecatan itu. Pemecatan itu karena Angie telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet.

Pengamat politik Eep Saefullah Fatah menilai PD saat ini sedang dalam kondisi 'darurat partai'.

Sementara itu, acara tahlilan memperingati setahun meninggalnya Adjie Massaid tadi malam tidak dihadiri oleh pejabat Partai Demokrat. "Tidak ada pejabat dari Demokrat yang hadir," kata Candra Rajasa, sepupu almarhum Adjie.

Menurut Mudji Massaid, adik almarhum Adjie Massaid, kasus yang menimpa Angie tidak memengaruhi keluarga.

"Dalam beberapa hari ke depan Angie akan mengadakan konferensi pers," ucap Candra. (Yoi/P-3)

mustain
@mediaindonesia.com

7 Februari 2012

Ternyata Anas belum Aman

Setidaknya ada lima faksi dalam tubuh Demokrat. Ada faksi yang sedang menggalang daerah untuk kongres luar biasa.

Hafizd Mukti

POSISI Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di ujung tanduk. Internal Demokrat tetap mendesak Anas mundur dan KPK terus mengusut dugaan keterlibatannya dalam korupsi Wisma Atlet.

Desakan mundur itu justru dikumandangkan hanya sehari setelah Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Anas tidak dinonaktifkan. Kemarin, Ketua Departemen Kominfo Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali menyerukan agar Anas mundur.

Saat menggelar konferensi pers pada Minggu (5/2), Yudhoyono mengatakan, "Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK."

Sebaliknya, Ruhut berargumentasi, jika Anas tidak mundur, elektabilitas PD akan terus merosot. "Kita enggak mau tersandera, ini faktanya."

Adalah fakta bahwa berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Demokrat terus anjlok dan kini tinggal 13,7%. Penurunan kepercayaan publik itu, kata Ruhut, merupakan sanksi sosial bagi Demokrat karena tak kunjung memutuskan sikap terhadap Anas.

Demokrat mengambil sikap tegas jika dukungan publik menurun di bawah angka 10%. Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman mengatakan tindakan tegas itu dilakukan tanpa menunggu proses hukum. Namun, Hayono tidak memastikan apakah tindakan yang dimaksud ialah mencopot Anas.

Anas sendiri tidak gentar. Ia menilai tuntutan mundur dari Ruhut bukan sesuatu yang serius. "Langkah ke depan, hanya tiga kata, yaitu kerja keras, kerja keras, dan kerja keras," kata Anas di Yogyakarta.

MI/PANCA SYURKANI

> "Langkah ke depan, hanya tiga kata, yaitu kerja keras, kerja keras, dan kerja keras."
>
> **Anas Urbaningrum**
> Ketua Umum Partai Demokrat

Galang daerah

Kerja keras mesti dilakukan Anas karena sesungguhnya Demokrat sudah terbelah. Hayono mengakui setidaknya ada lima faksi di tubuh Demokrat yang memiliki kepentingan masing-masing.

Hayono tidak memerinci lima faksi itu. Sebuah sumber menyebutkan ada faksi Andi Mallarangeng, faksi Marzuki Alie, faksi Anas, faksi deklarator, dan faksi anak kos. Ada faksi yang menggalang daerah untuk mengusur Anas lewat kongres luar biasa.

Selain menghadapi dinamika internal, Anas mesti bersiap-siap menghadapi KPK. Ketua KPK Abraham Samad saat ditanya kapan Anas dijadikan tersangka hanya menjawab, "Insya Allah, ikuti saja perkembangannya."

Abraham dan Anas kemarin berada dalam satu ruangan di Yogyakarta meski keduanya tidak saling sapa saat menghadiri penguluhan Denny Indrayana sebagai guru besar. Abraham minta publik mengawal kasus Wisma Atlet. Saat ditanya lagi apakah ada rencana menetapkan Anas tersangka, Abraham menjawab, "Insya Allah, doakan saja."

Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin, menambahkan bahwa pihaknya tidak memandang latar belakang partai politik dalam menetapkan tersangka.

Dari sejumlah kader Demokrat yang disebut-sebut di persidangan Wisma Atlet, baru Angelina Sondakh yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Lainnya belum disentuh, seperti Anas, Andi Mallarangeng, dan Mirwan Amir. (AT/AU/*/X-3)

hafizd@mediaindonesia.com

Angelina Seharusnya juga Dikurung KPK

Kepercayaan masyarakat kepada KPK bisa kembali merosot kalau ada tebang pilih kasus.

Ardi Teristi

BELUM MENAHAN ANGELINA: Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh merayakan ultah anaknya, Keanu Massaid, di Jakarta beberapa waktu lalu. KPK belum mau menahan Angelina Sondakh meski sudah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kemarin masih belum mau menahan anggota Badan Anggaran DPR Angelina Sondakh meski sudah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet.

Padahal, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan pemilik PT Anak Negeri M Nazaruddin langsung ditahan KPK begitu menjadi tersangka dalam kasus itu.

"Angie (Angelina) seharusnya sudah ditahan kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jika tidak, artinya ada tebang pilih oleh KPK dalam kasus suap Wisma Atlet," terang pengacara senior Adnan Buyung Nasution di Yogyakarta, kemarin.

"Semua yang terlibat harusnya dikurung semua sehingga bisa dikonfrontasi di dalam tahanan. KPK harus mengejar, jangan separuh-separuh," tambah pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu.

Ia mengingatkan KPK, jika tidak ditahan, Angie dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti untuk menghapus jejaknya di kasus itu.

Ditempat yang sama, praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyayangkan langkah KPK yang terkesan diskriminatif itu. "Jika yang lain langsung ditahan, apa alasannya yang kali ini tidak ditahan?" tanya Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia itu.

Ia mengaku khawatir kepercayaan masyarakat akan kembali merosot terhadap KPK dan akan menyamakan kualitas pimpinan KPK yang baru sama dengan sebelumnya. "Publik akan bertanya-tanya tentang alasan Angie tidak ditahan, sedangkan yang lain ditahan. Ini kan kasus skala besar, kasus *money politics* yang menurut saya musuh nomor satu di Republik ini," paparnya.

Saat ditemui, Ketua KPK Abraham Samad mengaku masih belum bisa menahan Angie karena berkas penyidikannya belum lengkap.

"KPK akan segera melakukan penahanan setelah semua prosedur terpenuhi. Jadi bukan tidak ditahan, melainkan belum," katanya.

Ia menjamin begitu KPK melengkapi semua berkas, penahanan akan langsung dilakukan. "Kapan waktunya, itu sangat bergantung pada seberapa cepat penyidik bekerja mengumpulkan berkas yang diperlukan. Sabar saja, insya Allah akan dilakukan penahanan, tetapi dalam berapa lama itu tergantung penyidiknya," katanya.

Hormati putusan

Di kesempatan berbeda, Angelina Sondakh mengatakan dirinya menghargai apa pun keputusan Partai Demokrat terkait dengan posisinya di partai itu.

"Saya serahkan sepenuhnya ke Partai Demokrat. Saya sangat menghargai keputusan apa pun demi jayanya Partai Demokrat," kata sahabat Angie yang juga pengurus Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Kahfi Siregar, saat membacakan pesan yang dikirim Angie kepada dirinya.

Hal itu diungkapkan Angie menanggapi pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai wakil sekjen di DPP Partai Demokrat. Dalam pesannya, Angie mengatakan ia juga akan menghormati setiap langkah yang akan diambil penegak hukum.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Angie mengaku hingga kini masih belum menentukan pengacaranya. "Belum menentukan *lawyer* karena saya belum menerima surat panggilan pemeriksaaan," katanya. (Ant/P-2)

ardi@mediaindonesia.com

7 Februari 2012

8 Februari 2012

Internal Demokrat Terus Desak Anas Mundur

KPK dinilai lamban dalam menuntaskan kasus suap Wisma Atlet karena masih banyak penghuni yang tidak bersih.

Akhmad Mustain

TUNTUTAN dari kalangan internal agar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur terus mencuat. Bagi mereka, Anas harus lengser demi menyelamatkan masa depan partai.

Pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (5/2), yang memastikan Anas tidak akan dinonaktifkan ruparya disambut sebagian orang dalam dengan setengah hati.

Mereka memang menyatakan loyal kepada SBY, tetapi bukan berarti tak lagi menyoal Anas yang namanya terkait dengan kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games.

Salah satu deklarator Demokrat yang selama ini menginginkan Anas mundur, Ventje Rumangkang, menegaskan mesti ada perubahan agar elektabilitas partai tidak kian terpuruk. Akibat kasus korupsi yang membelit sejumlah kadernya, elektabilitas Demokrat terus anjlok.

"Survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai berkuasa itu tinggal 13,7%. "Perubahan bisa saja dengan mengganti ketua umum dan itu sah-sah saja," tukas Ventje, kemarin.

Namun, ia tidak bisa memaksakan kehendak karena semua kader harus sejalan dengan ketua dewan pembina. Ventje mengatakan aspirasi para deklarator yang menginginkan Anas mundur juga tidak disampaikan kepada SBY pada pertemuan Minggu (5/2). "Apa pun yang dilakukan SBY akan kami dukung meskipun berbeda secara hati, Jawab sendiriah."

Deklarator lainnya, Subur Budhisantoso, merasa prihatin dengan prahara Demokrat karena banyak kader yang tersangkut kasus hukum. "Semua yang salah di partai harus dihukum, itu intinya dan tidak ada kecuali."

Tuntutan agar Anas mundur sebelumnya juga dilontarkan Ketua Departemen Kominfo Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurut dia, jika Anas *ngotot* bertahan, elektabilitas Demokrat akan terus merosot.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Syarieffuddin Hasan pun mendesak Anas yang selama ini membantah terlibat dalam skandal Wisma Atlet memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik. "Beliau itu sudah sering memberikan pernyataan, tetapi tidak gamblang."

Secara terpisah, Sekreteris Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, setelah diberhentikan dari wasekjen partai karena menjadi tersangka, Angelina Sondakh segera dicopot dari anggota DPR.

Di sisi lain, praktisi hukum Johnson Panjaitan menilai KPK bekerja lamban dalam menuntaskan kasus suap Wisma Atlet. Menurutnya, Angelina seharusnya sudah sejak dari dulu ditetapkan sebagai tersangka. "Bukan hanya Angie, Anas juga."

PESAN UNTUK KPK: Poster dengan foto Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, dan Angelina Sondakh yang berisi pesar KPK memproses hukum pimpinan Partai Demokrat tersebut terpampang di depan Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, kemarin.

Penentang Anas

Ventje Rumangkang
Deklarator Partai Demokrat

"Perubahan bisa saja dengan mengganti ketua umum dan itu sah-sah saja."

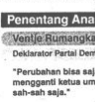

Ruhut Sitompul
Ketua Departemen Kominfo Partai Demokrat

"Kita enggak mau tersandera ini faktanya. Anas negarawa dan mundur sementara. Say minta dia fokus pada kasus

FOTO: MI/SUSANTO/DRM

Lambannya KPK dalam bekerja, menurut dia, disebabkan masih banyak penghuni KPK yang tidak bersih. "Perlu ada audit terhadap berkas-berkas dan o orang di sekitar (Ketu Abraham Samad." (HZ

mustain@mediaindonesi

10 Februari 2011

POLITIK UANG

Pintu Pemecatan Anas

Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah banyak menerima pengaduan.

AKHMAD MUSTAIN

POLITIK uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres di Bandung 2010 adalah fakta yang tak terbantahkan. Itulah pintu masuk penonaktifan Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum.

Koordinator Divisi Kaderisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Riau Ronny Riansyah di Pekanbaru, kemarin, mengakui bahwa politik uang dalam kongres itu sebuah fakta dan kebenaran.

Ronny yang menjadi peserta kongres itu menuturkan bahwa setiap ketua DPD dan DPC mendapat uang dari kubu Anas sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta. "Pada saat uang diserahkan tidak menyuruh memilih Anas, cuma dibilang ini titipan dari Mas Anas Urbaningrum," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka mengakui menerima uang dari kubu Anas. Uang itu diterima bertahap. Hari pertama Rp30 juta. Sisanya, US$7.000, diserahkan 3 jam menjelang pemilihan. Uang itu diberikan kepada 11 pengurus DPC dan Diana mengaku menerima Rp5 juta.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Advokasi dan Hukum Benny K Harman yang pernah bergabung dalam tim sukses Anas di Jakarta, kemarin, mengakui ada pemberian uang.

Akan tetapi, kata dia, uang itu untuk akomodasi para kader daerah. "Apa bisa orang ke Bandung tanpa uang? Apa kita bawa (pengurus) DPC pakai jin?" tukasnya.

Saat ditanya apakah pemberian uang itu dibenarkan, Benny menjawab, "Ini kan demokrasi. Tim saya kan kasih *service, why not?* Kalau orang memilih karena (uang) itu, urusan mereka toh."

Banyak pengaduan

Lain lagi pendapat Ketua DPP Bidang Kominfo Ruhut Sitompul. Menurut dia, jika benar terjadi politik uang dalam kongres, Anas bisa dicopot dari ketua umum. Politik uang jelas melanggar tata tertib internal partai. Itulah sebabnya isu politik uang diproses Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Dewan Kehormatan memastikan kasus politik uang itu akan diusut. Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi menjelaskan pihaknya sudah banyak menerima pengaduan soal tersebut.

Menurut dia, Komisi Pengawas yang merupakan perpanjangan tangan Dewan Kehormatan segera mengusut. "Tuduhan itu banyak sekali sehingga pengaduannya harus disaring, apakah memang bisa menjadi bukti permulaan atau sekadar memunculkan masalah, kita akan tangani."

Tidak mau ketinggalan, KPK yang sedang menangani kasus Wisma Atlet juga akan mengusut apakah ada aliran dana ke kongres. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK memang tidak mengurusi partai, tetapi perorangan yang menerima aliran dana korupsi. (Tim/X-3)

mustain
@mediaindonesia.com

Politik Uang di Partai Demokrat

Bukti aliran uang

- Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Permai Group, mengantar dana ke Kongres Partai Demokrat sebesar Rp30 miliar dan US$5 juta.
- Diana Maringka, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, mengakui menerima uang.
- Ronny Riansyah, Koordinator Divisi Kaderisasi DPD Partai Demokrat Riau, mengungkapkan adanya pembagian uang di Kongres Partai Demokrat 2010.
- Rusian, Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Demokrat Kalsel, tidak membantah adanya politik uang.
- Benny K Harman, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Advokasi dan Hukum, mengakui adanya pemberian uang untuk akomodasi

11 Februari 2012

F-PD Dorong BK DPR Periksa M Nasir

M Nasir menggunakan fasilitas DPR untuk membesuk adiknya, M Nazaruddin, di dalam rutan.

Nurulia Juwita

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir dianggap melanggar kode etik. Bahkan rekan satu fraksi Nasir mendorong Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memeriksa Nasir.

Menurut anggota Komisi III dari F-PD Ruhut Sitompul di Jakarta, kemarin, kunjungan itu tidak ada kaitannya dengan tugas sebagai anggota Komisi III.

Dia juga menilai Nasir telah memanfaatkan jabatan sebagai anggota Komisi III untuk menemui terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet M Nazaruddin di luar jam kunjungan. "Kalau tidak ada hubungan saudara dengan Nazaruddin, kami bisa terima. Silakan saja BK DPR menindak."

Pada 9 Februari, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku telah memergoki Nasir beserta sejumlah pengacara mengunjungi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang pada Rabu (8/2) sekitar pukul 23.00 WIB.

Denny mengaku memergoki Nasir yang merupakan sepupu Nazaruddin datang ke Rutan Cipinang antara lain bersama mantan pengacara terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang, Jufri Taufik dan Arif Rahman. Mereka masuk ke rutan dengan menggunakan kartu khusus bagi anggota Komisi III DPR.

> "Patut diduga ada maksud tertentu sehingga Nasir memilih mengunjungi saudaranya tengah malam."
>
> **Didi Irawadi**
> Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat

Anggota Komisi III DPR dari F-PD Didi Irawadi Syamsuddin juga menegaskan, kunjungan Nasir tidak ada kaitan dengan tugas anggota dewan. "Soal tersebut tidak diketahui fraksi dan kelompok Fraksi Partai Demokrat di Komisi III. Itu jelas urusan pribadi," ujarnya.

Dia mengakui akses untuk mengunjungi rutan dan LP yang dimiliki anggota Komisi III DPR bukan untuk kepentingan pribadi. "Patut diduga ada maksud tertentu sehingga Nasir memilih mengunjungi saudaranya tengah malam."

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengungkapkan, M Nasir tidak memiliki kartu khusus untuk memasuki rutan. Menurutnya, hanya ada 16 kartu akses bagi anggota DPR. "Yang bersangkutan tidak masuk daftar anggota Komisi III yang memegang kartu," kata Amir.

Juru bicara KPK Johan Budi memastikan Jufri Taufik tidak termasuk daftar kuasa hukum Nazaruddin. "Dari surat kuasa yang diajukan pihak Nazaruddin, di situ tidak ada nama Jufri. Yang ada antara lain Hotman Paris Hutapea dan Elza Syarief. Selama proses persidangan tidak ada pendampingan yang bersangkutan," ungkap Johan.

Kerap berkunjung

M Nasir mengakui kunjungan ke Rutan Cipinang hanya untuk menjenguk sang adik yang sedang sakit. "Kemarin kan Nazar sakit, saya sebagai saudara jenguk dah. Dia itu takut diinfus, jadi saya ke sana sekaligus beri dukungan," ujarnya.

Akan tetapi, menurut dia, kunjungan itu berlangsung sekitar pukul 21.00 selama sekitar setengah jam. Dia juga mengunjungi adiknya seorang diri tanpa kehadiran pengacara.

Dan dia mengaku kerap mengunjungi Nazaruddin di luar jam besuk. Dan untuk bisa memasuki rutan di luar jam besuk, dia membenarkan menggunakan fasilitas selaku anggota dewan.

Menurutnya, kewenangan itu melekat kepada setiap anggota. "Itu sudah melekat selama 24 jam bagi anggota dewan. Sidak (inspeksi mendadak) ke mana saja tidak masalah."

Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan dari Nasir terkait dengan kunjungannya ke Rutan Cipinang. Namun, ia membenarkan anggota dewan punya hak untuk menjalankan fungsinya.

"Saya enggak tahu di Komisi III. Tidak ada pemberitahuan. Tapi, setiap anggota punya hak untuk menjalankan fungsinya dalam koridor pengawasan," jelas Benny. (OX/Ant/P-1)

nurulia@mediaindonesia.com

12 Februari 2012

Gara-Gara Nasir, 4 Pejabat Dicopot

Kunjungan anggota dewan ke lembaga pemasyarakatan (LP) hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Akhmad Mustain

MENTERI Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Amir Syamsuddin mencopot empat pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terkait dengan kunjungan anggota Komisi III DPR dari F-PD, Muhammad Nasir, ke Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang di luar jam besuk.

Keempat pejabat yang dicopot itu adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum dan HAM DKI Jakarta Tawin Tarib, Kepala Divisi Pemasyarakatan Hafiluddin, dan Kepala Rutan Cipinang Suharman. Sebelumnya, pada 10 Februari, Kemenkum dan HAM telah mencopot Kepala Pengamanan Rutan Cipinang Foneka Afandi.

"Pencopotan ini *tentu* sudah dipertimbangkan dengan matang. Kami melihat ini perlu diputuskan dengan tepat dan cepat. Karena itu, hari ini dilakukan penggantian," tegas Amir di Jakarta, kemarin.

Penggantian pejabat yang dicopot tersebut, kata Amir, akan dilakukan melalui proses *fit and proper test* dengan memperhatikan integritas dan kapasitas calon. "Semuanya dilakukan sebagai bentuk *reward and punishment*," ujarnya.

Penyimpangan

Ia menegaskan kunjungan anggota dewan M Nasir untuk menemui saudara sepupunya, M Nazaruddin, yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, merupakan penyimpangan.

Pada prinsipnya, kata dia, Kemenkum dan HAM mendukung pengawasan yang dilakukan anggota DPR, tapi implementasinya harus sesuai dengan aturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Bahkan seorang kuasa hukum yang memiliki hak menemui kliennya di penjara pun tetap tidak bisa 24 jam berkunjung seenaknya," tegasnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum dan HAM) Denny Indrayana mengungkapkan dalam buku miliknya, M Nazaruddin, tersebut, M Nasir datang ke rutan sekitar pukul 21.00 WIB.

"Sedangkan saya datang sekitar pukul 23.00, yang berangkutan (M Nasir) masih di sana. Sesuai aturan, kunjungan di rutan atau LP maksimal sampai tengah jam," katanya.

Denny juga mengatakan berdasarkan catatan di buku tamu Nazaruddin, Nasir telah beberapa kali melakukan kunjungan di luar jam kunjungan, termasuk pada hari libur.

> "Bahkan seorang kuasa hukum yang memiliki hak menemui kliennya di penjara pun *tetap tidak bisa 24 jam* berkunjung seenaknya."
>
> **Amir Syamsuddin**
> Menkum dan HAM

Lebih lanjut Amir mengatakan kini pihaknya telah membangun jaringan CCTV yang tersambung langsung ke ruangan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Menurutnya, hal itu dilakukannya guna membenahi perbaikan sistem di Ditjen Pas.

"CCTV di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota lainnya akan segera ditambah serta langsung disambungkan ke ruang kerja Menteri dan Wamenkum dan HAM," katanya.

Sejumlah anggota Komisi III DPR mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan M Nasir.

Anggota Komisi III dari F-Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan wajar bila masyarakat mempertanyakan tujuan kedatangan Nasir ke Cipinang pada tengah malam, sebab kunjungan normal hanya dilakukan di siang hari maupun sore hari. (*P-3)

mustain
@mediaindonesia.com

20 Februari 2012

Anas Akui belum Pecat Angie

Ibas diminta Anas untuk segera mengatur jadwal rapat pengurus membahas pemecatan Angie.

Akhmad Mustain

ANGELINA Sondakh hingga kini masih resmi menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat. Rapat pemecatan Angie, begitu tersangka korupsi Wisma Atlet itu disapa, belum digendakan.

Kepastian status Angie itu diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada wartawan di Pangkalpinang, Sabtu (18/2) malam. "Angie belum dipecat, nanti ada rapat untuk itu yang diatur Pak Sekjen," tukasnya.

Seusai melantik pengurus DPD Partai Demokrat Bangka Belitung, Anas meminta Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie 'Ibas' Baskoro Yudhoyono untuk segera mengatur jadwal rapat pengurus.

Ibas yang ikut mendampingi Anas hanya berujar, "Secepatnya kita akan adakan rapat."

Angie ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pada 3 Februari dan keesokan harinya, 4 Februari, Dewan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi pemecatan Angie dari jabatan wakil sekjen. Surat rekomendasi tersebut diteken Amir Syamsuddin yang ketika itu masih menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan. Rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memecat Angie baru berlaku setelah ditindaklanjuti DPP Partai Demokrat.

Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Partai Demokrat menyebutkan, antara lain, Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutuskan, dan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan pengurus partai. Akan tetapi, berdasarkan ayat (7) pasal itu, keputusan Dewan Kehormatan tersebut dijalankan oleh DPP. Dengan begitu, sudah 16 hari keputusan Dewan Pembina memecat Angie *dicuekin* DPP.

MUHAMMADIYAH

> "Angie belum dipecat, nanti ada rapat untuk itu yang diatur Pak Sekjen."
>
> **Anas Urbaningrum**
> Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Bersifat otomatis

Semula rapat DPP untuk memecat Angie sudah diagendakan pada 14 Februari, tapi ketika itu Anas dan Ibas berhalangan hadir. Padahal, pada 11 Februari, TB Silalahi yang mengetikan posisi Amir sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan mengeluarkan ultimatum.

"Kita beri tempo tujuh hari. Kalau tidak ada tindak lanjut, kita berhak juga memanggil DPP kenapa belum dilaksanakan," tukas Silalahi. Tenggat itu sudah terlampaui.

Namun, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan penonaktifan Angie dari jabatan wakil sekjen bersifat otomatis ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, menurut dia, penonaktifan tersebut tidak butuh surat keputusan (SK) DPP.

"Begitu kader ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah otomatis dinonaktifkan sementara. Tidak usah pakai SK," ujar Mubarok, kemarin.

Sejauh ini Angie masih mempersiapkan diri untuk diperiksa KPK. Akan tetapi, KPK baru memeriksa Angie setelah Menpora Andi Mallarangeng bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin dalam perkara korupsi Wisma Atlet pada Rabu (22/2).

Ada hubungan antara kesaksian Andi dan pemeriksaan Angie sebab dalam surat dakwaan mantan Seskemenpora Wafid Muharam disebutkan bahwa proyek Wisma Atlet dibicarakan di ruang kerja Menpora dan Angie hadir dalam pembicaraan itu. (RF/X-3)

mustain@mediaindonesia.com

Demokrat Galau

Rekomendasi Dewan Kehormatan untuk menonaktifkan Angie sudah 20 hari tidak ditindaklanjuti DPP.

ARYO BHAWONO

ANGGOTA Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengakui partainya kini sedang galau. Pasalnya, sejumlah kader Partai Demokrat dituduh terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi.

Apalagi, kata Hayono, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah diizinkan hakim untuk menjadi saksi yang meringankan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet. "Ya, kami galau melihat kondisi sepesti ini," tukas Hayono di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, satu per satu petinggi Partai Demokrat diperiksa di pengadilan dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Mereka yang sudah diperiksa sebagai saksi ialah Wakil Sekjen Partai Demokrat Max Sopacua, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Hukum dan Advokasi Jenny K Harman, dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Edy Sitanggang. Ketua majelis hakim Darmawati Ningsih

Angelina Sondakh yang juga berstatus tersangka kasus yang sama, Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat DPR Mahyuddin, dan Menpora Andi Mallarangeng yang merangkap Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.

Masuk daftar tunggu saksi ialah Anas, Wakil Ketua Umum sudah mengizinkan kuasa hukum Nazaruddin untuk menghadirkan empat orang itu sebagai saksi yang meringankan terdakwa.

Hayono mengatakan pemeriksaan para petinggi partai itu berimbas negatif terhadap citra politik Demokrat. Masalah yang seharusnya dihadapi secara pribadi, kata dia, ditanggung partai karena mereka menduduki jabatan penting di Partai Demokrat.

Pentingnya Anas Jadi Saksi

1. Kesaksian Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan bahwa Anas ialah salah satu pemilik Permai Group saat perusahaan itu berkantor di Tebet.
2. Mindo Rosalina Manulang melalui kuasa hukumnya, Ahmad Rifai, mengatakan bahwa Anas dan Nazaruddin ialah pengendali Permai Group.
3. Mobil Toyota Alphard milik Anas merupakan hasil [illegible] dari korporasi PT Anugerah Nusantara (Permai Group).
4. Ada uang Rp30 miliar dan US$5 juta yang [illegible] ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat. Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sumber: Tim Pengacara Nazaruddin/FOTO: ANTARA/GRAFIS: TYOK

Jaga citra

Ironisnya, buruk rupa partai malah televisi dibelah. Fungsionaris Demokrat Ferry Juliantono kemarin mengadukan dua televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia. Pemberitaan tak berimbang dua televisi itu dituding telah membuat citra partainya turun. Langkah Ferry disesalkan Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Menurut dia, DPP belum pernah membicarakan pengaduan terhadap media massa.

Kastorius menjelaskan, untuk menjaga citra, kader Partai Demokrat yang sudah menjadi tersangka dinonaktifkan dari jabatan struktural. Angelina Sondakh, misalnya, sudah direkomendasikan Dewan Kehormatan untuk dinonaktifkan sejak 4 Februari.

Suaidi Marasabessy, Sekretaris Komite Pengawas yang merupakan organ Dewan Kehormatan, menjelaskan bahwa rekomendasi itu mesti dijalankan DPP dalam tempo tujuh hari. Akan tetapi, rekomendasi yang keluar 20 hari lalu itu tak kunjung dijalankan.

Itulah sebabnya, Suaidi di Jakarta, kemarin, mengatakan Dewan Kehormatan harus meminta konfirmasi kepada DPP perihal rekomendasi pencopotan Angelina Sondakh. (X-3)

bhawono
@mediaindonesia.com

KPK dan Kejaksaan Bagi-Bagi Kasus Nazaruddin

KPK dan Kejaksaan Agung membuat nota kesepahaman terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi demi efisiensi penanganan kasus.

HAFIZD MUKTI

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung membuat kesepakatan pembagian tugas dalam penanganan kasus terkait dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Nazaruddin kini menjadi terdakwa dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan juga tersangka tindak pidana pencucian uang terkait dengan pembelian saham PT Garuda Indonesia hingga senilai Rp300 miliar yang dilakukan perusahaan-perusahaannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan pembagian tugas atas kasus-kasus yang terkait dengan Nazaruddin merupakan kesepakatan fungsi koordinasi supervisi yang dilakukannya bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Andi Nirwanto.

Menurut Bambang, disepakati, Kejaksaan Agung menangani subjek hukum yang menyangkut pegawai negeri sipil (PNS).

"KPK menangani subjek hukum yang terkait dengan korporasi dan pengendalinya," kata Bambang ketika memberikan keterangan bersama Andi di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Dia memaparkan ada empat perkara yang dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPK dan Kejaksaan Agung. Keempatnya ialah perkara pembangunan dan pengadaan laboratorium di beberapa universitas, perkara pengadaan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan, perkara pengadaan laboratorium komputer di madrasah, serta perkara pengadaan peralatan riset dan laboratium di beberapa rumah sakit.

Selain pembagian tugas penanganan perkara, ungkap Bambang, KPK dan Kejaksaan Agung bersepakat bertukar data dan informasi dalam penanganan perkara-perkara itu.

MI/ADAM DWI

Andi Nirwanto
Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus

Andi menambahkan, KPK dan Kejaksaan Agung membuat nota kesepahaman terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi demi efisiensi penanganan kasus. Menurutnya, dalam kerja sama itu akan selalu dilakukan koordinasi dan supervisi. "Kalau ada kebocoran, kan KPK akan tegur kita. Silakan teman-teman memonitor perkembangannya sampai di mana," cetus Andi.

Saat ini Kejaksaan Agung telah menyidik dugaan korupsi pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah se-Indonesia dan korupsi pengadaan laboratorium komputer di Universitas Negeri Jakara (UNJ).

Kejaksaan Agung sudah meminta keterangan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang. Kuasa hukum Rosa, Ahmad Rifai, pernah menegaskan Rosa terlibat dalam berbagai proyek itu lantaran perintah atasannya, M Nazaruddin.

Bantahan Mirwan

Nazaruddin juga sempat menyebutkan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir memberikan sumbangan sebesar Rp20 miliar pada Kongres Partai Demokrat di Bandung, pada 2010.

Nazaruddin menuding uang yang diberikan dari kantong pribadi Mirwan itu bertujuan memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai. Menurut Nazaruddin, uang itu didapat Mirwan dengan menyisihkan *fee* dari berbagai proyek yang mendapatkan restu wakil ketua banggar itu.

"Dari mana saya dapat Rp20 miliar untuk sumbang Anas? Proyek yang mana? Saya tidak pernah kerja proyek dan saya bukan pengusaha," tegas Mirwan di sela rapat DPR bersama Kementerian Keuangan, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri di kompleks parlemen Senayan, kemarin.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku jika memiliki Rp20 miliar, lebih baik uang tersebut disimpan untuk anak dan istrinya. Dia menyangkal semua tuduhan Nazaruddin dalam persidangan dan menyebutnya sebagai fitnah.

"Kerjaan dia bohong terus," cetus Mirwan. (*/P-4)

hafizd@mediaindonesia.com

29 Februari 2012

20 Februari 2012

Angie-Rosa Diharapkan JUJUR Bersaksi

Kesaksian bersama diharapkan akan mengungkapkan kebenaran fakta.

HILLARIUS U GANI

ANGELINA Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang diharapkan jujur mengungkapkan fakta sebenarnya saat keduanya dikonfrontasi sebagai saksi dalam sidang dugaan suap Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin di Jakarta, hari ini.

MAY GINO F HADI

Angelina Sondakh

ANTARA/FRANKY OCTAVIANUS

Mindo Rosalina Manulang

"Kami berharap keduanya memberikan informasi yang selama ini belum disampaikan kepada KPK. Misalnya, Angelina Sondakh terkait dengan percakapannya di Blackberry Messenger (BBM)," ujar juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Mengenai sikap Angie--panggilan Angelina Sondakh--yang dalam kesaksian sebelumnya membantah semua tudingan, Johan menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengejar pengakuan. KPK punya cara menelusuri lebih jauh apakah yang disampaikan di persidangan itu benar atau tidak.

"Tetapi kalau di persidangan, yang punya kewenangan ialah hakim untuk memutuskan apakah keterangan saksi itu palsu atau tidak," ujarnya.

Menurut rencana, Angie bersama Rosa--panggilan Mindo Rosalina Manulang--dihadirkan dalam sidang hari ini yang dimulai pukul 08.00 WIB. Kesaksian bersama itu diagendakan setelah dalam persidangan sebelumnya majelis hakim pengadilan tipikor yang diketuai Darmawati Ningsih memerintahkan Angie dan Rosa dikonfrontasikan.

Keterangan keduanya diperlukan untuk mencocokkan sejumlah keterangan dalam persidangan sebelumnya. Misalnya, percakapan BBM di antara keduanya pada 2010, soal kata-kata 'bos besar', 'ketua besar', 'apel malang', dan 'apel washington'.

Percakapan BBM terkait dengan proyek Wisma Atlet itu sudah diakui Rosa, sedangkan Angie membantahnya karena ia mengaku baru memiliki Blackberry pada akhir 2010.

Anas pada Jumat

Anggota tim kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, menyatakan pihaknya akan mengecek silang semua yang sudah disampaikan Rosa bahwa mereka berdua intens berhubungan melalui BBM.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dari kesaksian Angie sebelumnya. Salah satunya soal Blackberry (BB) miliknya. "Ada dua BB yang disampaikan Rosa, tapi hanya satu yang muncul," katanya.

Junimart mengatakan sidang hari ini juga akan menghadirkan mereka yang pernah bekerja dengan kliennya di Permai Group seperti sopir Nazaruddin bernama Aan sebagai saksi meringankan.

Ia juga menjelaskan bahwa permintaannya kepada Anas Urbaningrum untuk menjadi saksi bukan dalam sidang hari ini. Menurutnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu akan dihadirkan pada persidangan berikutnya, Jumat (2/3).

Selain Anas, tiga anggota DPR dari Partai Demokrat juga akan dihadirkan dalam persidangan. Mereka adalah Max Supacoa, Benny K Harman, dan Eddy Sitanggang.

Junimart mengaku hingga kemarin ia belum mengetahui apakah nama-nama tersebut sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. (*/X-5)

hillarius@mediaindonesia

1 Maret 2012

Angie Diingatkan soal Sanksi Berbohong

Nazaruddin diberi kesempatan dua kali persidangan untuk menghadirkan Tim Pencari Fakta Partai Demokrat.

Mirza Andreas

KENGOTOTAN anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh dalam membantah berbagai fakta persidangan membuat majelis hakim memberi peringatan sanksi bagi pemberi keterangan palsu.

Ketua majelis hakim Darmawati Ningsih memberikan peringatan itu terhadap Angelina, yang kerap dipanggil Angie, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Darmawati mengutip Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu berbunyi, 'Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.'

Meski demikian, Angie tetap pada keterangan kesaksian sebelumnya. Angie pun menjawab, "Saya tetap pada keterangan pada persidangan yang lalu."

Pada 15 Februari, Angie telah dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin. Dalam persidangan itu, Angie berkukuh membantah semua isi percakapan Blackberry Messenger (BBM) antara dirinya dan Direktur Penuasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Mantan Puteri Indonesia itu juga menegaskan tidak memiliki Blackberry hingga akhir 2010.

Dalam persidangan itu, Darmawati menanyakan isi BBM antara Angie dan Rosa yang menyebut soal apel malang, apel washington, semangka, bos besar, dan *commitment fee* proyek Wisma Atlet. Menurut Rosa, apel malang adalah uang rupiah, sedangkan apel washington adalah dolar Amerika.

Pihak terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin pun mengajukan foto Angie serta dua telepon seluler di atas meja di depannya. Salah satunya diduga BB. Foto itu dibuat pada 2009. Namun, Angie bertahan baru memiliki BB pada akhir 2010 meski mengakui foto itu dirinya.

Dalam persidangan kemarin, Angie kembali menegaskan tidak pernah berhubungan melalui BBM dengan Rosa.

Persidangan itu awalnya beragenda konfrontasi Angie dengan Rosa. Sari mendampingi politikus Partai Demokrat Ida Fauziyah dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Namun, Angie dan Rosa tak hadir dengan alasan sakit. Sari pun hanya hadir beberapa pengawal. Akan tetapi, lantaran Rosa sakit, konfrontasi ditunda.

Hadirkan TPF

Setelah menghadirkan sejumlah saksi meringankan, pihak Nazaruddin pun berencana menghadirkan Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat pada persidangan berikut.

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief, mengungkapkan, buruh waktu lebih panjang untuk mendengar kesaksian. TPF itu beranggotakan antara lain Jafar Hafsah, Max Sopacua, Benny K Harman, dan Ruhut Sitompul.

Majelis hakim pun mengabulkan untuk menghadirkan saksi dari pihak terdakwa dalam dua kali persidangan. (*P-1)

mirza@mediaindonesia.com

2 Maret 2012

KPK Periksa Yulianis di Hotel

Hanya Yulianis, Wapres Boediono, dan mantan Wapres Jusuf Kalla yang diperiksa di luar Gedung KPK.

HAFIZD MUKTI

TERNYATA Yulianis menjadi pujaan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memeriksa Wakil Direktur Keuangan Grup Permai itu sebagai saksi kasus suap Wisma Atlet di hotel bintang lima.

"Apakah Yulianis diperiksa di Hotel Ritz-Carlton? Benar. Yang punya ide? Yang punya inisiasi Yulianis," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, kemarin.

Busyro mengatakan hal itu menjawab pertanyaan anggota dewan dalam rapat sebelumnya, Senin (27/2). Ia didampingi tiga pemimpin KPK lainnya, yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain.

Menurut Busyro yang saat kejadian menjabat Ketua KPK, pemeriksaan di hotel atas permintaan Yulianis dengan alasan keamanan. Pasal 113 KUHAP menyebutkan, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Harga kamar per malam di hotel itu sekitar Rp1 juta. "Ditanya dari mana pembayaran hotel itu? Bukan dari kami. Tapeser gun kami tak keluarkan uang untuk pemeriksaan saksi di sana," kata Busyro.

Minta maaf

Kebijakan KPK jilid II itu menuai kecaman. Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan menilai KPK bersikap diskriminatif karena memperlakukan Yulianis di luar batas kewajaran.

"KPK telah memperlakukan Yulianis sama seperti Wapres Boediono dan mantan Wapres Jusuf Kalla yang diperiksa di luar Kantor KPK," katanya.

Boediono diperiksa KPK pada 29 April 2010 terkait kasus Bank Century dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

Ketika itu, Boediono diperiksa di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. Masih terkait kasus sama, Kalla diperiksa di kediamannya pada 27 Januari 2011.

Sejauh ini hanya tiga orang itu yang diperiksa KPK di luar kantor. Yulianis diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Nazaruddin yang ki ni menjadi terdakwa kasus suap Wisma Atlet. Kuasa hukum Nazaruddin, Rufinus Hutauruk, menilai bahwa pemeriksaan di luar Kantor KPK memperlihatkan sebuah skenario untuk menyudutkan Nazaruddin.

Rufinus menjelaskan, Yulianis dua kali diperiksa di luar Kantor KPK, yaitu di Apartemen Ritz-Carlton JCBD pada 1 Juli 2011 dan di Great Western Resort Serpong, Tangerang, pada 13 Agustus 2011.

Pemimpin KPK jilid III terbelah menghadapi kebijakan KPK sebelumnya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengistimewakan Yulianis karena hal itu terkait faktor keamanan saksi.

Ketua KPK Abraham Samad justru meminta maaf secara terbuka dalam rapat.

Ia minta maaf kepada DPR dan seluruh rakyat Indonesia jika kinerja KPK jilid II memiliki masalah. "Saya minta maaf kalau di masa lalu terdapat kesalahan yang dilakukan dalam penyelidikan oleh penyidik KPK." (*/K-3)

hafizd@mediaindonesia.com

2 Maret 2012

Majelis Hakim Harus Periksa Anas

Sudah empat saksi yang menyebut Anas sebagai *big boss* di PT Anugrah Nusantara.

FARDIANSAH NOOR

TIM kuasa hukum terdakwa dugaan suap pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, mendesak hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menghadirkan Anas Urbaningrum sebagai saksi.

Menurut Elza Syarief, salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Ketua Umum Partai demokrat itu harus menjawab kesaksian persidangan yang menyebutnya sebagai *big boss* di PT Anugrah Nusantara.

"Kami minta kepada majelis hakim untuk menghadirkan Anas Urbaningrum sebagai saksi," ujar Elza kepada *Media Indonesia* di Jakarta; kemarin.

Dalam persidangan Rabu (29/2) lalu, Heri Sunandar, Baskoro, dan Hidayat yang merupakan karyawan PT Anugrah Nusantara menyebut Anas sebagai salah satu pemilik perusahaan itu. Ketiga saksi itu juga menyebut Anas berkantor di salah satu ruangan di Gedung Anugrah Raya di Jalan Abdullah Syafii No 9 Tebet, Jakarta Selatan, yang menjadi kantor PT Anugrah Nusantara.

"Majelis hakim harus menanyakan benar tidaknya kesaksian itu kepada Anas. Silakan saja Anas selama ini mengelak, tetapi kali ini sampaikan di pengadilan, bukan di media massa," kata Elza.

Disebutnya Anas sebagai pemilik PT Anugrah Nusantara juga sudah disampaikan oleh Direktur Pemasaran PT Anak Negeri (salah satu perusahaan milik Nazaruddin) Mindo Rosalina Manulang di sidang pengadilan tipikor, Januari lalu. Ia bahkan menyebut Attiyah Laila, istri Anas, menjadi komisaris di PT Alam Berlimpah, salah satu perusahaan Nazaruddin lainnya.

"Kepemilikan Anas di PT Anugrah Nusantara saya ketahui saat terjadi jual beli saham dengan Nazaruddin pada 1 Maret 2007. Jual beli itu terjadi saat perusahaan PT Anugrah berkantor di Tebet, Jakarta Selatan," ujar Rosa kala itu.

Ada buktinya

Saat lari keluar negeri, Juli 2011 silam, Nazaruddin pernah menunjukkan akta kepemilikan PT Anugrah Nusantara kepada publik. "Lihat baik-baik, PT Anugrah Nusantara ini merupakan *holding* dari perusahaan saya. Terlihat ada stempel. Ada notarisnya, ini ada tanda tangan Anas yang bermeterai. Itu ada stempel jempol Anas. Tanda tangan dan jempol. Yang semua saya omongkan ada datanya, nanti saya kirimkan semua," kata Nazaruddin dalam pembicaraannya dengan pegiat jurnalis warga Iwan Piliang melalui teknologi audiovisual *Skype*.

Tak cuma itu, ia juga menyebut mobil Toyota Alphard milik Anas merupakan hasil balik nama dari PT Anugrah Nusantara. "Ini ada BPKP mobilnya," paparnya.

Nazaruddin juga menyatakan ada aliran dana dari PT Anugrah Nusantara menjelang pemilihan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ia membeberkan bukti berupa 16 kuitansi pengeluaran sebesar US$4,80 juta tertanggal 22-24 Mei 2010.

"Ini bukti kuitansinya, tetapi aslinya sama Anas," ujarnya. (*/P-2)

fardiansah
@mediaindonesia.com

6 Maret 2012

JK Sebut Korupsi Wisma Atlet STRUKTURAL

KPK sudah memberi isyarat pemanggilan Anas terkait dengan pengusutan kasus korupsi Hambalang.

DONNY ARDHIKA

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kasus suap Wisma Atlet yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat sebagai korupsi struktural.

Korupsi, kata Kalla yang akrab disapa JK, tidak lagi dilakukan perorangan, "Nah, nazaruddin itu mainnya (korupsi) struktural. Korupsi berjemaah maknanya saling melindungi."

Ia mengatakan hal itu dalam dialog bertema *Lawan korupsi dari ucan bersama kampus* di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, kemarin.

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, kini menjadi terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet. Mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh yang masih aktif sebagai anggota DPR Fraksi Demokrat juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus yang sama.

Petinggi Demokrat ain yang ter eret dalam pusaran korupsi Wisma Atlet ialah Menpora Andi Mallarangeng yang merangkap Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Andi sudah bersaksi di pengadilan bersama Mahyuddin, Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir turut disebut-sebut para saksi dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dugaan keterkaitan sejumlah petinggi partai itulah yang mendasari Kalla menyebutnya sebagai korupsi struktural. "Kalau Angie (Angelina Sondakh) itu kan Nazaruddin cs, itu jelas (jadi tersangka dan terdakwa), mungkin kerja (umum) belum (menjadi tersangka). itu artinya (ada) korupsi struktural. Jadi, ada keinginan korupsi struktural," tandas Kalla.

Kompas.com - Para mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendengarkan pemaparan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (5/3/2012).

Tidak mengerti

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengaku tidak mengerti maksud JK yang menyebutkan terjadi korupsi struktural di Partai Demokrat.

"Saya tidak paham maksudnya korupsi di Partai Golkar dan korupsi di Demokrat," katanya.

Ketua Umum Partai Golkar, lanjut Mubarok, JK jelas lebih paham mengenai politik dan korupsi partainya. Tentang korupsi yang terjadi di Partai Demokrat, kata dia, JK hanya mendapatkan berita dari media. "Partai Demokrat ini sedang sedih (menjadi) objek. Kasus korupsi akhirnya dibesar-besarkan. JK hanya tahu permasalahannya dari media," kata Mubarok.

Saat ditemui terpisah di Jakarta, kemarin, Angelina Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik meminta publik tidak lagi mengaitkan kasus Wisma Atlet dengan Partai Demokrat jika tidak terdapat bukti yang kuat. "Tidak perlu dikembangkan opini untuk mendorong KPK memanggil seseorang atau mengembangkan opini agar KPK tidak memanggil siapa pun," kata Anas di Yogyakarta, Minggu (4/3).

KPK sudah memberi isyarat akan memanggil Anas terkait dengan pengusutan kasus Hambalang.

Namun, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Widjajanto belum bisa memastikan kapan Anas dipanggil. "Laporan penyidik (terkait pemanggilan Anas) belum sampai ke saya," katanya. (Mad/FX/3)

Mantan Bawahan Nazaruddin Berbalik Arah

Pengacara Nazaruddin diperiksa sebagai saksi pelapor terkait tersangka kesaksian palsu Angelina Sondakh.

EDNA AGITA

Kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin membuat banyak orang dilaporkan ke polisi atas tudingan kesaksian palsu.

Setelah sebelumnya satu tersangka kasus sogok Wisma Atlet Angelina Sondakh dilaporkan pengacara Nazaruddin atas tudingan kesaksian palsu, kini giliran mantan Manajer HRS Permai Group Ferdian Rico Baskoro diadukan ke Polda Metro Jaya atas tudingan yang sama.

Nuril Anwar, mantan staf ahli Nazaruddin, melaporkan Rico, panggilan akrab Ferdian Rico Baskoro, atas dugaan pemberian keterangan palsu ketika bersaksi pada persidangan kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (29/2).

"Dalam rangka meminta penyidik mengusut dan memproses hukum Saudara Rico Baskoro yang memberikan keterangan palsu di Pengadilan Tipikor, Rabu (29/2)," terang kuasa hukum Nuril, Patra M Zen, di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Patra menjelaskan keterangan palsu yang diungkapkan Rico terkait dengan relasi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Permai Group, perusahaan milik Nazaruddin. Tiga poin yang dituding keterangan palsu ialah Anas disebut pengendali dan pemilik Permai Group, Anas disebut memimpin rapat-rapat di Permai Group, dan Anas sering datang ke Permai Tower di Mampang, Jakarta.

"Semua itu tidak benar," cetus Patra.

Dia mengatakan telah melampirkan sejumlah barang bukti kepada penyidik. Bukti itu antara lain laporan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta saat Rico menjadi saksi yang meringankan bagi Nazaruddin, juga transkrip jalannya persidangan.

"Kita akan mengajukan saksi-saksi yang tahu benar dan mengenal Rico Baskoro," imbuh Patra.

Nuril mengakui hal yang disebutkan Rico tidak benar. Nuril orang dekat Nazaruddin karena telah menjadi staf ahli mantan anggota Komisi III DPR itu sejak 2007. Dia mengaku cukup mengetahui hal-hal terkait dengan Permai Group.

"Saya mengetahui apa pun saja soal Permai Group," tandas Rico.

Kasus Angie

Terkait dengan keterangan palsu yang dilakukan Angie, panggilan akrab Angelina Sondakh, salah satu kuasa hukum Nazaruddin sudah diminta keterangan sebagai saksi pelapor oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Diperiksa sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, kaitannya dengan laporan saya sebelumnya. Tentang pemberian keterangan palsu Angelina Sondakh pada sidang di Pengadilan Tipikor 15 Januari lalu," ungkap Fakrizt di Polda Metro Jaya, kemarin.

Fakridz sebagai perwakilan Nazaruddin melaporkan mantan Putri Indonesia itu ke Polda Metro Jaya pada Selasa (21/2) dan menyebutkan keterangan palsu yang diungkapkan Angie pada persidangan kasus korupsi Wisma Atlet dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu keterangan palsu Angie ialah belum memiliki Blackberry ketika melakukan komunikasi dengan tersangka kasus yang sama, Mindo Rosalina Manulang, pada 2009.

"Saya juga telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti transkrip percakapan dan foto-fotonya yang sedang memegang Blackberry," pungkas Fakrizt. (F-4)

edna@mediaindonesia.com

8 Maret 2012

Anas ARAHKAN Penggeledahan KPK

Hakim tipikor memutuskan untuk tidak menghadirkan Anas Urbaningrum sebagai saksi dalam persidangan Nazaruddin.

Mirza Andreas

NAMA Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kian sering disebut dalam sidang kasus Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, saksi Muhajidin Nur Hasyim memberikan lagi peran Anas di Permai Group, konsorsium yang disebut milik Anas. Salah satu perusahaan di bawah naungan Permai Group, PT Anak Negeri, memenangi tender Wisma Atlet kemudian menyuhkontrakkan ke Duta Graha Indah lalu mendapat *fee*. Kasus itulah yang kini membawa Nazaruddin ke pengadilan tipikor.

Sebelumnya nama Anas disebut saksi Mindo Rosalina Manulang, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri; Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Permai Group; Baskoro, mantan Manajer HRD PT Anugrah Nusantara (Permai Group); Muhammad Nazaruddin, serta saksi lainnya.

Kepada majelis hakim yang diketuai Darmawati Ningsih, Hasyim--adik kandung Nazaruddin--menjelaskan dirinya ditunjuk Anas sebagai *owner* konsorsium Permai Group, sedangkan Anas sebagai *owner* pemilik modal.

Saat Rosa ditangkap KPK pada 21 April 2011, kata Hasyim, Anas menginstruksikannya agar dia mengarahkan penyidik KPK untuk hanya menggeledah ruangan Rosa.

"Saya ada di sana (Kantor Permai Group, saat penggeledahan). Hampir 1 jam sekali saya ditelepon beliau (Anas)," jelas Hasyim.

Namun, dia mengaku gagal melaksukan tugas itu karena penyidik KPK telah menggeledah beberapa ruangan. Namun, Anas tetap menginstruksikan agar hanya ruangan Rosa yang digeledah. "Usahakan lantai dan ruangan lain tidak digeledah," ujar Hasyim menirukan perintah Anas.

Aliran dana

Dalam sidang itu, Hasyim juga menyebut adanya aliran dana Rp105 miliar ke kongres Demokrat untuk pemenangan Anas. Dana diserahkan dalam dua tahap. Sebelum kongres dana Rp70 miliar diantar ke Senayan City untuk kepentingan Anas. Sisanya Rp35 miliar digelontorkan saat kongres.

Selain itu, Anas juga pernah menerima US$1 juta dari Permai Group. Uang itu berasal dari beberapa proyek, salah satunya Wisma Atlet.

Hasyim juga mengatakan Anas pula yang memerintahkan Yulianis selaku Dirut PT Executive Money Changer, dalam konsorsium PT Anugrah Nusantara, untuk membeli saham PT Garuda Indonesia.

> Ada aliran dana **Rp105 MILIAR** 'ke kongres Demokrat.

Bahkan untuk membeli saham Garuda, Yulianis memaisukan tanda tangan sejumlah direksi perusahaan.

Majelis hakim, kemarin, juga memutuskan menolak permohonan kuasa hukum Nazaruddin untuk menghadirkan tim pencari fakta (TPF) Partai Demokrat serta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi.

Alasannya, kuasa hukum Nazaruddin tidak segera memberikan surat kesediaan para saksi untuk hadir di persidangan. (Ant/*JX-4*)

8 Maret 2012

Chandra Hamzah Bocorkan Pencekalan Nazaruddin

Anas disebut menjanjikan akan menyelesaikan segala hal terkait masalah Nazaruddin dan Partai Demokrat.

Mirza Andreas

TERDAKWA kasus suap pembangunan Wisma Atlet M Nazaruddin kembali membeberkan mengenai pencekalan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu kabur ke Singapura, Senin (23/5/2011), sehari sebelum KPK mengajukan surat pencegahan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Nazaruddin menyebutkan kepergiannya ke Singapura sehari sebelum pencekalan itu resmi diperintahkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang sudah mendapatkan bocoran dari Chandra Hamzah, ketika itu menjabat wakil ketua KPK.

Dalam pelarian, Nazaruddin sempat singgah di lima negara, di antaranya Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Dari negara terakhir, Nazaruddin terbang ke Republik Dominika dengan pesawat sewaan. Sebelum singgah di Cartagena, Kolombia, ia terlebih dulu transit di Madrid, Spanyol.

Nazaruddin kemudian ditangkap petugas di Cartagena, Kolombia. Dia ditangkap saat bersantai di tempat umum di kota wisata tersebut, Minggu (7/8/2011) pukul 02.00 waktu setempat. Enam hari kemudian (13/8) Nazar diterbangkan ke Indonesia.

Ketika ditangkap, Nazaruddin mengaku bernama Syarifuddin sesuai dengan paspornya. Tapi polisi tidak percaya.

"Saya berani sumpah pocong kalau yang menginformasikan besok saya mau dicekal adalah Anas. Saya tanyakan, Mas dari mana informasinya? Katanya ini dari Chandra. Besok akan keluar surat pencekalannya," papar Nazaruddin sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, kemarin.

Bahkan, tambah Nazaruddin, pada kesempatan itu Anas menjanjikan akan menyelesaikan segala hal terkait masalahnya dan Partai Demokrat. Dia menjelaskan saat dirinya hendak kembali ke Indonesia, Anas sempat melarangnya dan memintanya untuk tetap tenang di Singapura.

Selain menyebut Chandra Hamzah sebagai pembocor pencekalannya, Nazaruddin juga menyebut nama Busyro Muqoddas, kini wakil ketua KPK. Menurutnya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai ketua KPK itu turut merencanakan skenario rekayasa pencekalannya.

Pernah bujuk

Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoggana membantah tudingan yang mengatakan Anas Urbaningrum menyuruh Nazaruddin pergi ke Singapura sebelum dicekal KPK. Sutan juga menegaskan kepergian dirinya ke Singapura pada Rabu (1/6/2011) untuk bertemu Nazaruddin justru atas perintah DPP Demokrat.

"Saya ke Singapura ditugaskan DPP. Demokrat tak ada kaitan dengan kasus itu dan sudah menjadi ranah tipikor."

Adapun Chandra Hamzah hingga pukul 21.00 WIB tadi malam tidak merespons telepon dan pesan singkat *Media Indonesia*.(*/P-4)

mirza@mediaindonesia.com

Strategi GANTI PENGACARA di Tengah Jalan

Berbagai upaya ditempuh untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Namanya juga usaha.

Asyto Bhawono

JIKA menyimak perjalanan proses hukum dugaan suap proyek Wisma Atlet, masyarakat seperti disuguhi aksi akrobat para pihak yang tersangkut di kasus itu.

Selain kasusnya itu sendiri, menarik juga diikuti langkah gonta-ganti pengacara dalam kasus tersebut. Sebut saja tindakan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang yang sampai empat kali mengganti kuasa hukumnya. Atau terdakwa dalam kasus itu Muhammad Nazaruddin yang sudah dua kali mengganti pengacaranya.

Bukan cuma ganti pengacara, akal lompat katak pengacara seperti yang dilakukan Jufri (sebelumnya pengacara Rosa), diamdiam menemui Nazaruddin dan mengaku menjadi pengacara Nazaruddin meski tidak pernah terlibat dalam persidangan di pengadilan tipikor.

Apakah gonta-ganti pengacara itu akibat ketidakcocokan hubungan kedua*nya*, atau*kah* itu bagian dari strategi untuk melepaskan diri dari jeratan hukum?

Di mata pengacara senior Adnan Buyung Nasution, langkah gonta-ganti pengacara adalah bagian dari strategi untuk memperlama jalannya persidangan. Tanpa mau merujuk ke kasus Wisma Atlet sebagai contohnya, ia menyebut strategi itu biasanya dipakai untuk mengaburkan bukti-bukti sehingga akan mengaburkan keyakinan majelis yang mengadilinya.

> Jadi kalau sering berganti pengacara, ada apa di situ? Di sini hakim harus bertanya dan menegur."
>
> **Adnan Buyung Nasution**
> Pengacara senior

"Seringnya mengganti pengacara dimanfaatkan untuk mengarahkan kasus. Bisa saja pengacara baru tidak memiliki data yang sama dengan pengacara terdahulu. Dengan cara ini, bisa-bisa proses pengadilan berjalan lamban," ujar Adnan Buyung dalam perbincangan dengan *Media Indonesia*, akhir pekan lalu.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kejelian hakim dalam melihat keadaan itu. "Hakim haruslah*nya* menegur orang yang suka gonta-ganti pengacara. Penggantian pengacara yang terlalu sering dikhawatirkan membuat rancu jalannya persidangan," terangnya.

Ia menjelaskan, memilih dan mengganti pengacara merupakan hak seseorang dalam proses hukum. Namun, sambungnya, pengacara juga memiliki kode etik dalam menerima tawaran menangani kasus. Artinya, pengacara juga harus proaktif menanyakan alasan penggantian pengacara itu, bukan asal menerima kasus saja.

"Hubungan pengacara dengan klien itu sifatnya rahasia, hubungan mereka pribadi dan kor fidensial. Jadi kalau sering berganti pengacara, ada apa di situ? Di sini hakim harus bertanya dan menegur," tegasnya.

Hakim, lanjutnya, juga bisa mengadukan perilaku pengacara yang sembarangan menerima limpahan klien. Pengaduan itu dapat diadukan ke Dewan Etika Pengacara.

"Para pengacara itu harusnya juga saling menghormati. Jangan sampai melarikan diri ke klien lain tetapi berkedok perkembangan kasusnya berbeda. Bisa-bisa proses pengadilan berjalan lamban," tandasnya.

Rugikan klien

Di tempat terpisah, pengacara Taufik Basyari mengemukakan aksi gonta-ganti pengacara itu bisa memengaruhi arah persidangan.

Perubahan strategi pembelaan yang dilakukan oleh pengacara baru dapat mengubah pendirian klien atas berbagai fakta persidangan.

"Perubahan inilah yang akan memengaruhi jalannya persidangan," katanya.

Namun ia mengingatkan, perubahan pendirian itu dapat merugikan si klien sendiri. Pasalnya, pengacara baru harus memulai untuk memahami kasus dari awal di tengah proses persidangan yang sudah berjalan.

"Rata-rata penggantian pengacara itu akan merugikan klien. Pada umumnya penggantian pengacara karena soal kepercayaan klien. Karena itu, hal ini merugikan karena korban waktu untuk adaptasi," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan penggantian pengacara itu harus diwaspadai karena bisa saja klien hanya dipengaruhi oleh pengacara baru untuk kepentinganya sendiri.

"Kepentingan ini bisa karena uang atau kepentingan lainnya. Maka itu, tetap harus diperhatikan penggantian itu," ujarnya. (*/P-2)

bhawono@mediaindonesia.com

ANDRIANTO/DIA MAHARANI

DILARANG BERTEMU NAZARUDDIN: Kuasa Hukum Nazaruddin, OC Kaligis, (kanan) didampingi sepupu Nazaruddin, Muhammad Nasir (kiri), memasuki*n* proses *h*ukum kliennya yang di*h*ari KPK, Jakarta, Senin (15/8/2011).

Gonta-ganti Pengacara dalam Kasus Wisma Atlet

1. OC Kaligis & Aassociates
Ditunjuk menjadi kuasa hukum Nazaruddin saat di pelarian. Namun akhirnya mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Nazaruddin pada Desember 2011.

MI/Susanto

1. Kamaruddin Simanjuntak
Menjadi kuasa hukum Rosa pada 23-27 April 2011. Dipecat setelah Kamaruddin menyebutkan Rosa anak buah Bendahara Umum Partai Demokrat Muhaimin Iskandar.

Dok. METRO TV

2. Jufri Taufik
Menjadi kuasa hukum Rosa pada 27 April–17 Oktober 2011. Tidak menjadi pengacara Rosa setelah pengadilan memberikan putusan vonis kepada Rosa.

Pengacara

12 Maret 2012

KPK Pasti Panggil Anas 2 Bulan Lagi

Pemanggilan Anas dalam kasus Hambalang dalam hitungan dua bulan itu terlalu lama dan menjadi basi.

Ahmad Mustain

PUBLIK harus bersabar menunggu kasus pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor, memasuki babak penting. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memastikan KPK akan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang.

Namun, kapan pemanggilan itu dilakukan, Busyro tidak mengungkapkan secara detail. Ia hanya memberikan rentang paling lambat dua bulan.

"Saya belum menanyakan jadwal kepada penyidik, tetapi jelas akan kami panggil (Anas). Mungkin enggak sampai dua bulan," terang Busyro seusai memberikan kuliah umum di Kantor Wapres, kemarin.

Busyro menegaskan, KPK ingin kasus tersebut cepat tuntas. "Semakin cepat diselesaikan, semakin cepat pula diminimalisasi potensi korupsi itu. Publik diuntungkan. Jadi tidak ada manfaatnya bagi kami untuk memperlambatnya."

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: **Interupsi@mediaindonesia.com** atau **mediaindonesia.com**
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: **@MediaIcom**

Dugaan keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ia menuding Anas telah menerima *fee* Rp50 miliar dari proyek Hambalang.

"Pada April 2010, Anas memutuskan agar PT Adhi Karya memenangi proyek Hambalang. Sebagai *fee*, Anas memperoleh Rp50 miliar," ujar M Nazaruddin di sela-sela persidangan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 27 Januari lalu.

Nazar menyebut alasan Anas memuluskan PT Adhi Karya memenangi proyek bernilai Rp1 triliun tersebut karena perusahaan itu sanggup membiaya pemenangan Anas di Kongres Demokrat di Bandung.

Anas membantah tudingan tersebut. Berkali-kali ia menyebut tudingan itu sebagai fitnah. Bahkan, Anas sampai berkata, "Satu rupiah saja Anas korupsi proyek Hambalang, gantung Anas di Monas."

Kemarin, seusai rapat Fraksi Demokrat, ketika ditanya rencana pemanggilan dirinya dalam kasus Hambalang oleh KPK Anas berujar, "Tunggu sajalah, biar proses hukum saja."

Ketua KPK Abraham Samad, Kamis (15/3), menjelaskan KPK telah memanggil 37 saksi dalam kasus Hambalang. Saksi-saksi tersebut berasal dari pejabat PT Adhi Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenpora, BPN Jabar, dan Kemenkeu.

BERPOSE: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum didampingi Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kiri), Ketua Fraksi Jafar Hafsah (kanan), dan Sekretaris Fraksi Saan Mustopa berpose sebelum rapat internal fraksi di Gedung DPR, kemarin.

Kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, menilai pemanggilan Anas sebagai saksi kasus Hambalang dalam hitungan dua bulan itu terlalu lama. "Jadi basi dan tidak ada gunanya."

Junimart menjelaskan, seharusnya KPK segera memangil Anas karena dalam persidangan jelas disebutkan oleh beberapa saksi bahwa Anas merupakan pemilik PT Permai Group yang juga terkait proyek Hambalang. Ia menilai Busyro cenderung mempercepat pengusutan Nazaruddin daripada Anas. "Ada apa ini?" tanyanya.

Selain dalam kasus Wisma Atlet dan kasus Hambalang, Busyro memang mengatakan Nazaruddin diduga terlibat dalam tujuh kasus di dua kementerian dengan total proyek lebih dari Rp2 triliun.

Untuk pengusutan tujuh kasus tersebut, KPK akan menerapkan undang-undang pencucian uang. (*/X-7)

mustain
@mediaindonesia.com